

Saatnya Ekonomi Restoratif

HALAMAN
BALIKAN COVER

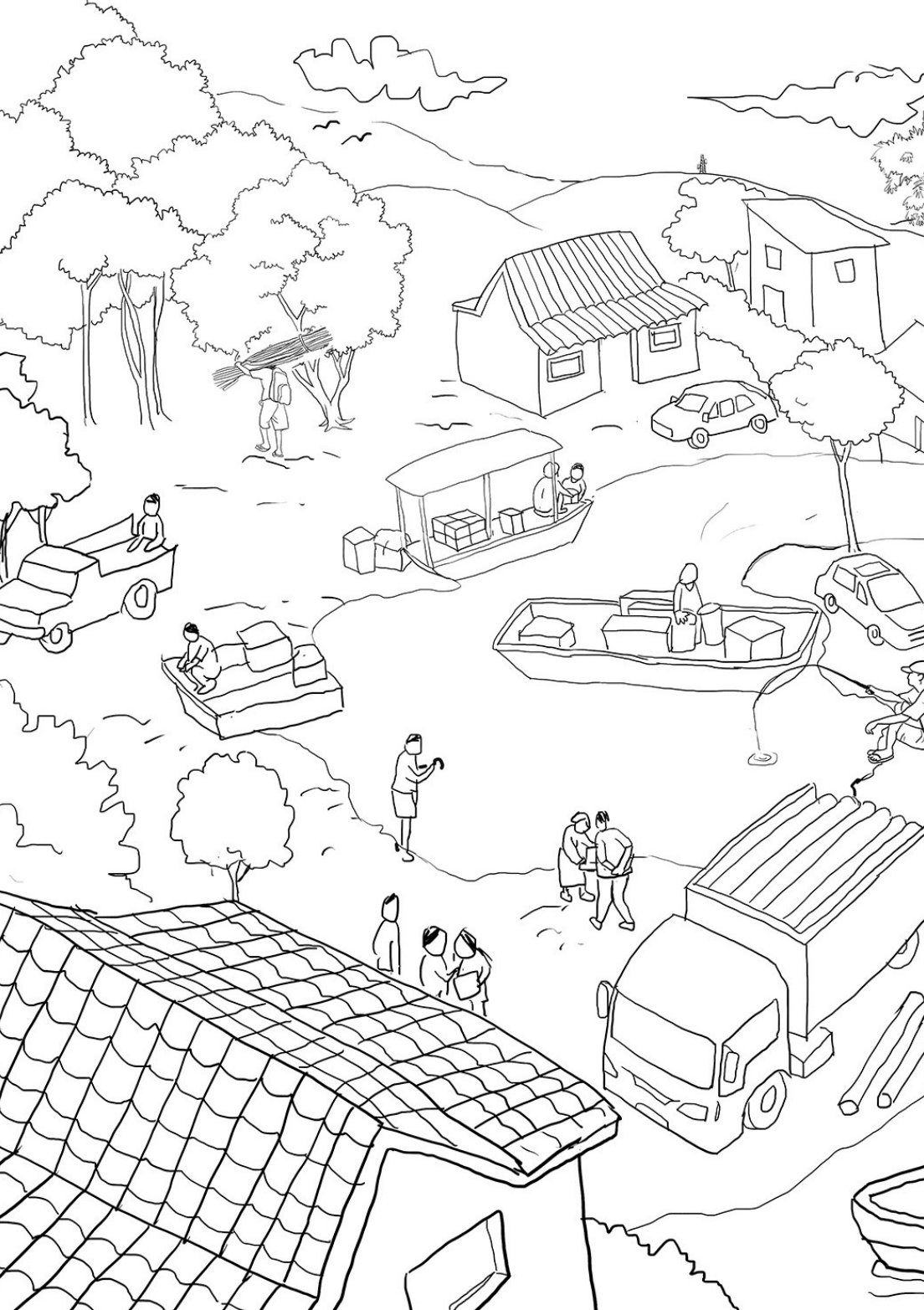
Saatnya Ekonomi Restoratif



CELIOS

Center of Economic and Law Studies





Saatnya Ekonomi Restoratif



Penerbit:
Celios

Tahun:
2024

Tebal:
vi, 229 hlm.

Ukuran:
14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-10-3698-8



Editor:
Purwanto Setiadi

Penulis:
Purwanto Setiadi
Stefanus Felix Lamuri
Kurie Suditomo
Poernomo Gontha Ridho
Prasidono Listiaji
Nur Alfiyah
Mardiyah Chamim
Aghina Fasza
Leoni Sihombing
Ulet Ifansasti

Foto:
Alam Siak Lestari
Bismo Agung
Bumi Langit
Development Dialogue Asia
Forest Digest
Greenpeace Indonesia
Iklimku.org
Java Kirana
Koalisi Ekonomi Membumi
Permaculture Institute
Pratisara Bumi Foundation
PT Gemilang Arcia Wellindo
Ulet Infasasti

Infografik:
Yosep Suprayogi

Periset Foto:
Bismo Agung

Desain/Tata Letak:
Gatot Pandego

Ilustrasi Sampul:
Imam Yunni

DAFTAR ISI

8

Pengantar

12

Prakata

20

Prolog



24

Memutar Balik
Jam Sumber Daya

34

Pertumbuhan
Ekonomi:
Hidup Bersama
Paradoks
dan Delusi

36

Indonesia
Sampai Mana?

38

Ekonomi
Donat

40

Tujuh Jalan
Menuju
Ekonomi
Donat

46

Masyita
Crystallin:
'Perlu
Insentif
untuk
Mendorong
Perilaku
Ramah
Lingkungan'



56

Kegilaan
Para Aktor
Perubahan

66

Wacana
Menuju
Ekonomi
Restorasi

74

Resep Melawan
3 Krisis Besar
Sekaligus

76

Menang
Banyak
Ekonomi
Restoratif





78

Bhima
Yudhistira
Adhinegara:
'Ekonomi
Restoratif
Jawaban
Pertumbuhan
Berkualitas'

86

Dandy
Rafitrandi
dan M. Habib
Abiyan
Dzakwan:
'Baiknya Bisa
Berubah'

90

Beragam
Nama,
Hakikat
Sama



102

Sinyal-
sinyal
Ekonomi
Restoratif

116

Biru Ekonomi
di Laut

120

Di Katingan,
Membuhul
Imajinasi

144

Dari Koperasi
Hingga
Kobumi

154

Bersama-
sama
Mengayuh
Seribu Sungai

166

Tak Kunjung
Melipat Harga
Tengkawang

172

Javara,
Sang Jawara
Petani Lokal

182

Java Kirana,
Bermula dari
Satu Petani
Saja

188

Alam Siak
Lestari,
Mengolah
Ikan Gabus
demi
Gambut

194

Conservana
dan Pertanian
Cerdas
Iklimnya

200

Yang Terpadu
di Bumi Langit

203

Yang Tumbuh
Bersama
Mama Bambu

206

Pala, Koktel,
Palapa



214

Pijar
Restoratif
Kaum Milenial

226

Dari Cap Orang
Tua ke Cap
Orang Muda

228

Epilog

BUKU ini bermula dari dokumen yang disusun dengan harapan dapat memicu perdebatan sehat di tengah masyarakat. Kami, sekumpulan penulis independen yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan, kala itu menyebutnya buku kecil. Momen pengerjaannya adalah berlangsungnya pertemuan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta pada pengujung Agustus 2023.

Latar belakang yang mendasari keputusan untuk membuatnya jelas: kita perlu semakin banyak aktor, termasuk politikus, anggota lembaga legislatif, dan kepala daerah, yang dapat berperan dalam menentukan arah pembangunan serta terbuka untuk gagasan-gagasan yang bukan *business-as-usual*. Problem kita, sebagai bagian dari umat manusia, sudah pada derajat yang menyangkut eksistensi kita di planet ini.

Gagasan tentang buku mini tersebut merunjung melalui sejumlah diskusi antara para penulis dan berbagai kalangan yang sepemikiran dan menaruh perhatian pada isu yang sama. Dalam forum-forum ini dibahas perihal bagaimana merespons aneka persoalan serius dalam perekonomian kita yang kian ekstraktif, yang hanya mengurus sumber daya alam dan gagal mewujudkan janji-janji memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menciptakan lapangan kerja, membiayai negara, dan memperbaiki kesejahteraan.

Setelah dokumen itu rampung serta dapat digunakan dengan baik, dan sedang dipikirkan langkah-langkah lanjutan untuk mendiseminasikan visi, cerita, dan pesan di dalamnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengulurkan dukungan. Lembaga peneliti independen di bidang ekonomi dan kebijakan publik ini bersedia memegang hak pengelolaannya dan menerbitkannya sebagai buku.

Kata “buku”, sebagai format, penting digarisbawahi. Sebab dokumen yang kami hasilkan kala itu, secara fisik, berukuran layaknya majalah. Untuk menjadikannya berukuran buku yang umum, setengah dari ukuran majalah, ada pekerjaan baru menyangkut desain dan tata letak. Kami memutuskan tidak semata-mata melakukan penyesuaian; kami mau penampakan yang terasa baru.

Hal itu bukan satu-satunya yang kami lakukan, tentu saja. Kami menambahkan beberapa topik, untuk memperluas perspektif dan menguatkan pesannya, termasuk empat cerita tentang praktik baik.

Kami masih percaya, seperti halnya saat pertama kali mengerjakan naskah awalnya, bahwa cerita-cerita dalam buku ini sangat boleh jadi bisa dijumpai di penerbitan-penerbitan lain. Tapi penyertaannya di sini dilakukan dalam konteks yang sama sekali berbeda: bahwa apa yang terkandung di dalamnya, juga dalam cerita-cerita lain yang ditambahkan, sesungguhnya adalah panggilan darurat untuk mengerem upaya terus-menerus mencetak pertumbuhan dalam menjalankan perekonomian, melalui dominasi kegiatan ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam.

Dampak dari dominasi itu selama bertahun-tahun ikut menyumbangkan emisi yang besarnya tidak sepele (pada 2021 kita termasuk dalam sepuluh *emitter* terbesar). Kita juga telah mendegradasi sumber daya alam dan menipiskan keanekaragaman hayati kita yang tak ada duanya serta menimbulkan polusi yang di sejumlah kawasan menjadi yang terburuk, bukan saja di dalam negeri, melainkan juga di seantero jagat. Pendeknya, kita menjadi salah satu aktor penting di balik *triple planetary crisis*, fenomena yang dikemukakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berdasarkan laporan asesmen Intergovern-



Mesak Malak menunjukkan cara minum dari 'tali air' (cabang pohon 'hiu', berisi air tawar) di hutan adat Gelek Malak Kalawilis Pasa di Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. ULET IFANSAST

mental Panel on Climate Change.

Hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan tersebut tanpa henti, padahal ada alternatif yang ramah terhadap bumi, yang adil, inklusif, dan menyejahterakan sekaligus memelihara dan menjaga sumber daya alam, juga menautkan lagi relasi manusia dengan alam, bakal membuat pandangan jadi seperti rabun dekat. Kita sibuk dengan tujuan jangka panjang tanpa menghiraukan bahwa kerusakan yang kita perbuat dalam jangka pendek adalah faktor yang niscaya menjadikan pencapaian tujuan itu percuma. Kita mungkin berhasil merealisasikan target-target masa kini tapi semuanya hanya akan sia-sia karena kondisi planet ini sudah tak layak huni.

Ekstremnya: buat apa pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator pencapaian, kalau semakin banyak manusia menderita.

Melalui pemaparan tentang konsepnya, juga urgensi penerapan dan praktik di mancanegara, buku ini memperlihatkan bahwa ekonomi alternatif yang tidak mustahil itu telah diadopsi di Indonesia. Jumlah pelakunya terus bertambah. Mereka ada di berbagai lokasi di negeri ini. Banyak

dari mereka yang merupakan kaum muda, mengikuti arus yang timbul di negara-negara lain, yang terjadi bahkan di level formal—pemerintah kota.

Selain mereka, sejumlah inisiatif untuk memberdayakan kelompok marginal dan masyarakat adat juga berlangsung, dimotori berbagai organisasi nonpemerintah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai dampaknya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sengaja mengadakan studi lapangan di enam wilayah masyarakat adat. Dalam studi ini dilakukan valuasi ekonomi terhadap wilayah-wilayah itu. Hasil valuasi menunjukkan nilai ekonomi di sana terentang dari Rp 28,92 miliar hingga Rp 41,23 miliar per tahun. Ini bukan angka yang remeh.

Dalam lingkup yang lebih luas, Celios saat ini sedang melaksanakan studi mendalam tentang dampak dari praktik ekonomi semacam itu terhadap output total perekonomian, juga terhadap indikator makro seperti serapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, serta signifikansi penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Celios meyakini ikhtiar membangun narasi ekonomi yang bersifat restoratif itu memerlukan lebih banyak riset berbasis data yang kredibel. Hal inilah yang dapat meneguhkan tesis bahwa ekonomi restoratif memberikan dampak berganda yang lebih jauh dibanding ekonomi ekstraktif.

Begitulah pula kenapa diperlukan semakin banyak cerita seperti yang disajikan di sini: contoh-contoh itu dapat menempati peran sebagai elemen yang menguatkan narasi tersebut. Muaranya adalah tren yang ada bisa menjadi arus utama model ekonomi yang dibutuhkan agar negara ini dapat berkembang dan maju dengan merestorasi lingkungan, meregenerasi sumber daya alam, dan mendistribusikan aset secara adil. ●

‘Ekonomi Kobo’, tidak Lagi

LEBIH dari setengah abad yang lalu Kenneth E. Boulding memberi sebutan “ekonomi kobo” untuk sistem ekonomi yang berlaku kala itu. Sebagai antitesisnya, dia membayangkan ada sistem lain yang lebih patut diterapkan: “ekonomi antariksawan”. Pendapatnya ini masih relevan, terutama berkaitan dengan urgensi untuk memastikan bumi tetap layak huni dan kehidupan manusia bisa berlanjut.

Melalui esai berjudul “The Economics of the Coming Spaceship Earth” (1966), ekonom dan ilmuwan multidisipliner dari Inggris itu menjelaskan “ekonomi kobo” didasari keyakinan bahwa sumber daya tersedia tak terbatas. Dalam pandangan ini konsumsi dan produksi adalah dua hal yang selalu berguna; semakin besar akan lebih baik. Dan sukses diukur dari seberapa besar keluarannya. Sistem ekonomi ini mendominasi negara-negara industri ketika itu, yang sebenarnya juga masih berlaku saat ini.

Boulding melihat pandangan tersebut bertentangan dengan kenyataan: bahwa sumber daya di bumi tersedia tidak tanpa batas. Realitasnya, manusia harus berbagi bukan saja dengan sesama manusia, melainkan juga de-

ngan makhluk hidup yang lain. Dan untuk itu, apa pun yang kita lakukan, bergantung pada daya dukung bumi.

Daya dukung itu yang kian melemah. Laporan studi mutakhir tentang kondisi limitasi planet atau *planetary boundaries* yang diterbitkan dalam jurnal *Science Advances* (2023) menunjukkan enam dari sembilan variabelnya sudah terlampaui. Jika dihitung dari sejak Johan Rockström dkk. memperkenalkan variabel-variabel itu pada 2009, ketika tiga variabel sudah diterabas, hanya perlu kurang dari dua dasawarsa untuk sampai ke situasi sekarang.

Kegiatan manusialah, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan, juga, keinginan-keinginan lain yang sebetulnya eksesif, yang menjadi penyebab. Karenanya, sebagai bagian dari aksi nyata untuk mengelakkan bencana, transformasi praktik ekonomi merupakan keharusan. Ekonomi yang melulu bersifat ekstraktif dan linier atau “ambil-bikin-buang”, yang menyebabkan bumi harus menghadapi *triple planetary crisis*, tidak bisa lagi dipertahankan.

Berkenaan dengan hal itulah apa yang dikemukakan Boulding tentang “ekonomi antariksawan” berguna. Bisa dibilang, pada pendapatnya tentang hal ini semua “teori” mengenai ekonomi yang lestari, yang menyadari keterbatasan daya dukung bumi, bertumpu.

Boulding berargumentasi dengan mengumpamakan bumi sebagai satu pesawat ruang angkasa, yang ekstraksi dan polusinya dibatasi. Dalam “ekonomi antariksawan”, keluaran harus diminimalkan; ada perhatian menyangkut pemeliharaan stok; dan bahwa kita harus mempertahankan keadaan positif dengan konsumsi yang lebih se-





**Perkebunan
kelapa sawit
di Sorong,
Papua.
Mulanya
adalah hutan
yang menjadi
penyumbang
karbon.**

ULET IFANSASTI

dikit. Ukuran keberhasilan, karenanya, berupa “hakikat, cakupan, mutu, dan kompleksitas total stok modal, termasuk di dalamnya keadaan tubuh dan pikiran manusia”.

Paul Hawken, wirausahawan sekaligus aktivis lingkungan, menyebut ekonomi semacam yang dibayangkan Boulding bersifat restoratif. Menurut dia, memulihkan kerusakan dan situasi memburuknya kehidupan serta sistem sosial adalah “transformasi yang mungkin” dan “lebih masuk akal” ketimbang hitung-hitungan menyangkut parameter keberlanjutan.

Beberapa tahun terakhir, gagasan Hawken dan para pemikir lain, termasuk di antaranya John Fullerton, Per Espen Stoknes, serta Kate Raworth, menemukan pengikut: kalangan yang secara sadar mau memulai atau mentransformasikan bisnis atau kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip restoratif.

Di Indonesia, mereka yang berinisiatif ke arah itu juga mulai tumbuh. Tidak dengan gaduh, memang. Keberadaan mereka tersebar di berbagai wilayah. Mereka, yang merintis usaha di bermacam-macam sektor, sungguh-sungguh berupaya mewujudkan keyakinan bahwa keseimbangan antara tujuan menciptakan kesejahteraan dan tujuan melindungi lingkungan bisa dicapai, tidak hanya sebatas janji di atas kertas atau hiasan pidato.

Sulit dipastikan berapa besar jumlah mereka. Koalisi Ekonomi Membumi, yang dibentuk pada 2022 untuk mewadahi berbagai rintisan bisnis yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi restoratif, merangkul sebagian dari mereka—yang diklaim jumlahnya mencapai 30-an. Sebagian yang lain bergerak sendiri-sendiri atau melalui wa-

dah yang berbeda.

Bagaimana mereka mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi restoratif, untuk setiap entitas bisnis bisa berlanjutan. Tapi, jika mengikuti uraian Fullerton, Stoknes, dan Raworth, tiga aspek yang jadi cakupan adalah memulihkan sumber daya yang rusak, meregenerasi atau memperbarui sumber daya yang dipakai dalam produksi, serta mendistribusikan kesejahteraan.

Kegiatan bisnis berprinsip ekonomi restoratif itu perlu diperluas, tentu saja. Tapi, dalam realitas yang resminya masih didominasi praktik ekonomi “ambil-bikin-buang”, upaya ini bisa diibaratkan mendaki bukit terjal. Yang mula-mula harus dipenuhi adalah mengubah pola pikir yang dianut, tidak lagi sama dengan yang selama ini berlaku. Raworth menyarankan tujuh segi menyangkut hal ini, termasuk di antaranya tidak menjadikan pertumbuhan sebagai tujuan; melihat gambaran besar bahwa siapa atau apa saja punya potensi untuk membuat perubahan; mempromosikan keberagaman, partisipasi, kolaborasi, dan pertukaran; dan mengutamakan perkembangan serta kemajuan ketimbang pertumbuhan.

Urgensi untuk mendorong pengadopsian pola pikir tersebut, juga realisasinya sebagai aksi nyata yang kian masif, di level pembuat kebijakan memang menuntut adanya gerakan yang bertambah kuat dari bawah. Tapi tak kurang pentingnya adalah peran aktor-aktor lain, para pemangku kepentingan, serta tak ketinggalan para akademisi, termasuk ekonom.

Sudah saatnya untuk mengatakan cukup itu ya cukup terhadap praktik “ekonomi kobo”. •



#1

SEBAGAI VISI BARU DAN AGENDA DEMI KEADILAN EKONOMI SEKALIGUS SOLUSI ATAS KRISIS IKLIM, EKONOMI RESTORATIF SEMAKIN MENDAPAT DUKUNGAN, JUGA DIKAMPANYEKAN, BUKAN OLEH PARA ELITE KORPORASI. SAATNYA KITA MENDENGARKAN MEREKA.





Aliran sungai gambut di Indragiri Hilir, Riau. Lahan di kawasan itu berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

GREENPEACE

Bisnis untuk Solusi Alam

LAHAN gambut bisa dibilang tampak sejauh mata memandang di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Musrahmad Igun, bersama-sama teman-teman mainnya, dulu, sering memancing di area itu, atau sekadar berkumpul, mengobrol.

Dari wilayah Siak seluas 8.500 km², lahan gambut mencakup 57 persennya—ini mengandung nilai kekayaan gambut terbesar di Sumatera. “Jadi, masyarakat di Siak tidak bisa dipisahkan dari lahan gambut karena hal itu sudah merupakan bagian dari kehidupannya,” kata Musrahmad, yang dikenal sebagai pendiri ExploreSiak, suatu inisiatif anak muda Siak untuk mengangkat sejarah, budaya, alam, dan keseharian masyarakat Siak.

Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan melanda Siak—bagian dari kebakaran besar yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia kala itu. Musrahmad, yang lahir dan besar di Siak, mengenang peristiwa ini sebagai “kebakaran yang hebat”.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, akibat kebakaran itu lebih dari 1,2 juta hek-

tare lahan ditelan api. Lahan gambut rusak. Dampaknya langsung terasa dalam kehidupan masyarakat. “Sendi-sendi kehidupan jadi lumpuh...pendidikan tidak jalan, perekonomian tidak jalan, banyak yang sakit,” kata Musrahmad.

Lebih dari itu, kehilangan lahan gambut adalah juga kehilangan pelindung dalam menghadapi perubahan iklim akibat terus naiknya suhu bumi. Lahan gambut merupakan penyerap dan penyimpan karbon alami.

Kebakaran tersebut mendesakkan pentingnya mencari solusi demi menghindari bencana serupa terjadi lagi. Dalam upaya untuk itu satu hal diakui: bahwa penting menjaga tinggi permukaan air di lahan gambut.

Masalahnya, menurut Musrahmad, penjagaan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau oleh satu institusi saja. Masyarakat harus dilibatkan. Tapi, katanya, mengajak juga sulit kalau masyarakat tidak diberi insentif atau tidak dapat memperoleh manfaat dari kesediaan untuk terlibat dalam upaya itu.

Solusi yang paling memungkinkan, dalam kondisi begitu, adalah “ada air, ada ikan”. Dengan kata lain: memelihara ikan di kanal-kanal lahan gambut. Lalu, dicarilah jenis ikan apa yang bisa dipelihara di lahan gambut.

Ikan gabus mengemuka dalam pencarian karena keberadaannya yang sangat umum di Siak. Ikan predator di ekosistem air tawar ini termasuk ikan endemik. Kajian yang dilakukan memutuskan untuk bereksperimen membudidayakannya. Tapi, saat masih dalam kajian, timbul pula pertanyaan siapa nanti yang mau membelinya, bagaimana menjualnya. “Nah, dari situlah kami lihat ada

Penangkapan udang yang memelihara kelestarian alam oleh warga Gelek Malak Kalawilis Pasa di hutan desa di Distrik Sayosa, Sorong, Papua.

ULET IFANSASTI



kepentingan untuk membangun satu entitas bisnis. Kenapa bisnis, karena kami ingin menjamin keberlanjutannya,” kata Musrahmad. “Tidak mungkin dijalankan melalui organisasi nonprofit, ‘kan?”

Budidaya saja dipandang tidak cukup. Riset yang dilakukan mendapati ikan gabus mengandung albumin yang tinggi. Albumin adalah protein pada darah yang membentuk sebagian besar plasma darah. Albumin berperan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ia berguna bagi orang yang sedang sakit, orang dalam proses penyembuhan sehabis operasi atau setelah melahirkan, orang yang menderita luka bakar, orang yang menjalani kemoterapi.



Dalam turunan-turunan produk yang bisa dihasilkan dari ikan gabus, albumin memiliki nilai tambah paling tinggi. Secara ekonomi, potensinya sangat menguntungkan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut lalu dibuat model bisnisnya dan kemudian didirikan perusahaannya. “Memang bukan ujung-ujung mau bikin bisnis, gitu,” kata Musrahmad, yang kemudian memimpin perusahaan itu.

Belakangan perusahaan itu ikut menjadi bagian dari ekosistem penggerak model ekonomi baru di Kabupaten Siak yang digawangi orang muda untuk memulai gelombang bisnis lokal dan kegiatan ekonomi yang restoratif, regeneratif, dan distributif. ●

Memutar Balik Jam Sumber Daya

DI Kabupaten Siak, Riau, di sepotong kawasan gambutnya, sebuah bisnis yang dimulai sejak 2020 berupaya membuktikan bahwa masyarakat bisa mencapai kemakmuran dengan melindungi ekosistem. Bisnis atau kegiatan ekonomi yang berkategori usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan antitesis dari kegiatan ekonomi “ambil-bikin-buang” yang selama ini berlaku.

Sekalipun kecil skalanya, usaha PT Alam Siak Lestari itu adalah realisasi dari substansi kritik terhadap kegiatan ekonomi yang menjadikan pertumbuhan selaku mantra. Ia diposisikan atau diharapkan bisa menjadi versi yang lebih kontekstual dari ekonomi “hijau” yang telah diadopsi dengan gegap gempita, yang didasari konsep keberlanjutan. “Sebab, dengan laju deforestasi yang tinggi, keberlanjutan saja tidak cukup,” kata Rezal Kusumaatmadja, *co-founder* dan Chief Operating Officer PT Rimba Makmur Utama, perusahaan yang sejak didirikan pada 2007 merintis solusi berbasis alam.

Di level global, kritik itu sebetulnya bergema mulai 1970-an. Antara lain melalui laporan Club of Rome ber-

judul *The Limits to Growth* (1972), kala itu disadari bahwa pertumbuhan bukan saja mustahil terjadi tanpa batas, melainkan juga telah gagal mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan bahkan merusak lingkungan karena eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam yang lewah.

Kritik tersebut mengingatkan pada “ramalan” John Maynard Keynes bahwa, manakala masyarakat telah begitu kaya karena pertumbuhan, ketika gairah untuk mengejar kelimpah-ruahan meredup, “kecintaan kepada uang sebagai milik...bakal diterima sebagai apa adanya”. Ekonom yang berpengaruh besar bagi pembuat kebijakan hingga pertengahan 1970-an ini menyebut kondisi itu sebagai “penyakit yang agak memualkan”.

Keynes tidak menyinggung hal ihwal lingkungan--karena kala itu, pada 1930, memang belum menjadi isu. Mengenai ancaman terhadap lingkungan, baru pada 1962 tampil pionir yang membawa pesan peringatan tentang masa depan yang kelam: Rachel Carson.

Dalam *Silent Spring*, ahli biologi kelautan dan aktivis lingkungan itu menarasikan dengan terperinci bagaimana DDT, pestisida yang digunakan antara lain untuk meningkatkan produksi tanaman pangan demi Revolusi Hijau, merembes ke rantai makanan dan terakumulasi di jaringan lemak hewan, juga manusia, dan menyebabkan kanker serta kerusakan genetis. Pemakaiannya yang hanya sekali, dia menulis, mampu membunuh serangga hingga berbulan-bulan, tidak hanya serangga yang memang jadi sasaran tapi juga tak terhitung jenis yang lain; bahan beracunnya pun tetap tinggal di lingkungan bahkan setelah diguyur air hujan.

Poin terpenting dari Carson adalah ini: bahwa alam rentan terhadap intervensi manusia. “Laku manusia terhadap alam kini teramat penting melulu karena kita telah memiliki kekuasaan yang menentukan untuk mengubah dan menghancurkan alam,” katanya dalam satu wawancara sebelum tutup usia karena kanker pada 1964. “Kita ditantang...untuk membuktikan kedewasaan kita dan kecakapan kita, bukan menyangkut alam, tapi menyangkut diri kita sendiri.”



KRITIK hanya satu hal, memang. Baru ketika lonceng peringatan menyangkut perubahan iklim dan ancaman lain terhadap lingkungan kian kencang berbunyi, pada 1990-an, kesadaran mengenai perlunya mengubah arah mulai menguat. Arah baru itu adalah meninggalkan apa yang oleh Kenneth E. Boulding, ekonom yang mementingkan pemanfaatan disiplin ilmu yang luas untuk mengatasi problem ekonomi riil, disebut “ekonomi koboi”, yang menganggap alam tersedia tanpa batas.

Sebelum itu pengalaman puluhan tahun dengan pertumbuhan mengukuhkan keyakinan bahwa tak ada cara lain untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini masih ditambah fakta betapa jutaan orang telah memperoleh kenaikan pendapatan yang berlipat-lipat kali; jutaan bisnis juga dibuat dan dijalankan, dan karenanya jutaan orang memperoleh pekerjaan. Di Indonesia pun demikian halnya.

Pencapaian Orde Baru selama hampir tiga dasawarsa adalah “model” yang tiada henti diadopsi pemerintahan-pemerintahan sesudahnya. Sama persis—walau diklaim



Kawasan hutan di Merauke yang diubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

ULET IFANSASTI/GREENPEACE INDONESIA

berbeda. Hal ini berlaku sekalipun, dalam kenyataannya, sebagian sebab dari ambruknya rezim Presiden Soeharto, dulu, justru adalah kelewat berfokus pada upaya mengejar pertumbuhan.

Pada 1993, Paul Hawken menerbitkan *The Ecology of Commerce*. Wirausahawan sekaligus aktivis lingkungan ini menjadi orang pertama dari dunia bisnis yang blak-blakan mengingatkan bahwa “bisnis sedang menghancurkan dunia” dengan cara yang tak satu pihak pun bisa menandinginya.

Hawken meyakini konsep keberlanjutan sejatinya tidak ada; dia menyebutnya sebagai “rahasia environmentalisme yang tidak diungkapkan”. Dia mengakuri habitat bisa bertahan ribuan tahun. Tapi, secara praktis, katanya, adalah mustahil mengalkulasi keberlanjutan usaha peri-

kanan tertentu, hamparan tanah, dan tutupan hutan.

Dia menulis: “Kita telah melampaui titik di mana sumber daya planet bisa diandalkan untuk mendukung populasi hingga lima puluh tahun ke depan. Transformasi yang mungkin haruslah memutar balik jam sumber daya dan mengerahkannya untuk memulihkan kerusakan dan kehidupan serta sistem sosial yang memburuk. Merestorasi lebih masuk akal ketimbang aljabar keberlanjutan.”

Sebelum Hawken mengintroduksi gagasan menyangkut ekonomi yang restoratif itu ekonomi sirkuler, yang idenya mulai diwacanakan pada akhir 1980-an, juga semakin memikat kalangan yang meluas. Pada 1990, David W. Pearce dan R. Kerry Turner memaparkan dengan gamblang pergeseran dari sistem ekonomi yang linier dan terbuka ke sistem ekonomi sirkuler. Dalam *Economics of Natural Resources and the Environment*, mereka menggambarkan ekonomi sirkuler sebagai sistem yang mengubah limbah dari kegiatan ekstraksi, produksi, dan konsumsi menjadi input dalam kegiatan produksi.

Sepanjang perkembangannya, ada bermacam-macam pengertian mengenai ekonomi sirkuler. Meski demikian, ia pada prinsipnya menyangkut upaya memperedarkan sumber daya (organik maupun nonorganik) dalam suatu perekonomian tanpa menghasilkan limbah. Bagi model ini, limbah adalah tanda kesalahan sistem.

Dari tahun ke tahun, sejak ekonomi sirkuler menjadi subyek diskursus, para akademisi telah banyak mengkajinya. Publikasi hasil riset juga berlimpah. Wajar bila, pada akhirnya, ada yang mengadopsinya. Misalnya pemerintah Cina, yang sejak awal 2000 mengintegrasikan ide eko-

nomi sirkuler dalam kebijakan industri dan lingkungannya. Yang mau dicapai adalah kepastian bahwa kebijakan itu berorientasi sumber daya, produksi, limbah, kegunaan, dan siklus pakai.

Keberadaan Ellen MacArthur Foundation juga layak disebut. Lembaga nonprofit yang bemarkas di Cowes, Isle of Wight, Inggris, ini memainkan rol penting dalam upaya mempercepat peralihan dari model ekonomi konvensional ke ekonomi sirkuler di Eropa dan Amerika.

Pengadopsian model ekonomi sirkuler terus berlangsung, termasuk di Indonesia, umumnya dalam skala kecil. Tapi fakta ini tidak menghalangi berkembangnya pemikiran mengenai ekonomi alternatif yang memang menyejahterakan sekaligus melindungi lingkungan. Pada 2017, Kate Raworth menawarkan gagasan tentang ekonomi donat (*doughnut economics*). Ekonom dari Environmental Change Institute di Oxford University ini sengaja menjadikannya sebagai pelengkap ekonomi sirkuler.

Melalui bukunya, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like 21st-Century Economist*, Raworth mempresentasikan “teori”-nya yang menempatkan kesejahteraan manusia, alih-alih uang, sebagai titik awal. Dia menunjukkan dua hal mendasar di situ: bahwa manusia saling bergantung satu dan yang lain, agar bisa memperoleh sumber daya untuk memenuhi hak dasarnya, juga melayani kebutuhan akan pangan, air, kesehatan, pendidikan, papan, serta energi; dan bahwa manusia tergantung pada planet yang jadi rumahnya.

Dia mengimajinasikan dua hal yang merupakan sistem pendukung kehidupan manusia di bumi itu sebagai

lingkaran-lingkaran sejajar yang mengelilingi pusat yang sama. Lingkaran di dalam dia sebut landasan sosial, yang identik dengan tujuan global dalam Sustainable Development Goals; lingkaran di luar dia namai limitasi ekologi, yang mengadopsi *planetary boundaries* yang disusun J. Rocktröm dan kawan-kawan, yang memungkinkan kehidupan di bumi bisa lestari. Gambar yang dia coretkan dengan pensil itu, “Terlihat seperti donat,” katanya.

Ada area di antara kedua batas tersebut. Raworth menandainya sebagai ruang yang secara lingkungan aman dan secara sosial adil bagi manusia untuk berkembang dan mencapai kemajuan. Ruang ini, menurut dia, merupakan “bentuk yang sudah dipahami banyak kultur masyarakat adat selama ribuan tahun”.

Pada intinya, dua hal ini yang menjadi sentra ekonomi donat: ia bersifat regeneratif serta distributif, serta melihat kesejahteraan sebagai keseimbangan antara kesehatan sosial-ekonomi dan ekologi. Poin tentang regenerasi dan distribusi merupakan pelengkap bagi model ekonomi sirkuler, yang berfokus pada tujuan meningkatkan efisiensi sumber daya.

Untuk membuktikan apa yang dia kemukakan bukanlah gagasan radikal yang mengawang-awang, melainkan bisa diimplementasikan, Raworth—bersama Carlotta Sanz, praktisi korporasi yang punya minat kuat terhadap ekonomi regeneratif—mendirikan Doughnut Economics Action Lab. Melalui lembaga ini, dia berkolaborasi dan membantu para pembuat perubahan di berbagai tempat di seluruh dunia untuk mengadopsi ekonomi donat dan mewujudkan aksi yang transformatif.



Masyarakat Suku Moi menunjukkan kepiting dan ikan hasil tangkapan yang diperoleh di sungai yang terdapat dalam hutan di Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

ULET IFANSASTI



SEPERTI apa aksi transformatif itu? Rangga Dwiyan-dra Putra, Chief Operating Officer *Swadaya.id*, lembaga yang memfasilitasi gotong royong investasi untuk bisnis lestari, meyakini wujudnya bisa berupa bisnis yang profit-nya bagus tapi dampak sosial dan lingkungannya terukur.

Dia juga percaya bisnis yang lestari itu bisa menjadi cara mengakomodasi minat anak muda di Indonesia, Generasi Milenial dan Generasi Z, untuk ikut memitigasi perubahan iklim. “Kita perlu mendorong untuk bikin contoh,” katanya.

Dalam situasi bumi sedang menghadapi *triple planet-*



Warga memetik jeruk dari kebunnya yang berada di kawasan hutan desa di Desa Sausu Gandasari, Parigi Selatan, Sulawesi Tengah.

FOREST DIGEST

ary crisis berupa perubahan iklim, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres, aksi nyata merupakan opsi mendesak untuk dilakukan. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda.

Yang mungkin menimbulkan skeptisisme adalah model-model untuk aksi itu tidak serta-merta memudahkan membuat pilihan, malah bisa membingungkan. Meski demikian, jika tantangannya adalah bagaimana merealisasikan kemakmuran dengan melindungi ekosistem, satu hal jelas: bahwa model untuk aksinya haruslah mengandung tujuan-tujuan mencegah orang seorang kehilangan hak-hak dasarnya dan memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Dalam praktiknya, ada yang merasa perlu mengakrabbkan sebutan dari model semacam itu. Alasannya: untuk

menangkal kesan jargon, agar masyarakat umum mudah memahaminya. Pratisara Bumi Foundation pada 2021 mengusulkan istilah ekonomi membumi supaya, “Masyarakat terhubung dengan gagasan utamanya,” kata Saniy Amalia Priscila, Chairperson-nya. Tapi, sebenarnya, apa pun nama yang disematkan, unsur-unsur restorasi, regenerasi, dan distribusi berlaku.

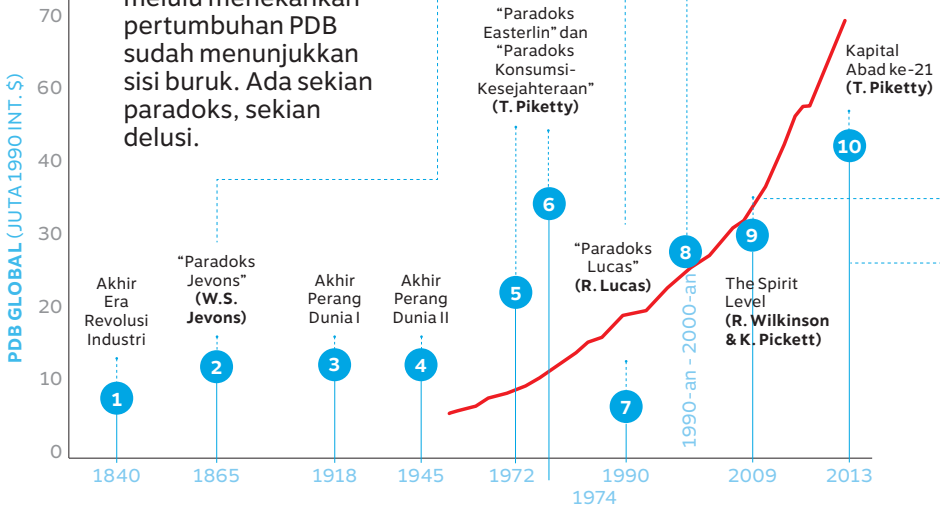
Hal lain yang tak kurang pentingnya adalah, sementara ini, tidak cukup menyandarkan aksi tersebut hanya pada komitmen pemerintah. Untuk tujuan mengurangi emisi seperti diikrarkan melalui Perjanjian Paris, pemerintah antara lain memang telah membuka peluang bagi pengadopsian model ekonomi sirkuler, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Masalahnya, dorongan yang dibutuhkan untuk menciptakan dampak yang signifikan belumlah memadai. Masih berlaku kelembaman dalam politik pembuatan kebijakan.

Dorongan yang bisa mengubah problem kelembaman itu hanya mungkin timbul kalau, meminjam perumpamaan tentang kapal yang tengah berlayar, ada gelombang mengayun sangat kuat di bawah yang mengalihkan arah perjalanan. Gelombang ini memerlukan gerakan perubahan yang masif. Sejarah sosial memperlihatkan gerakan yang efektif mewujudkan hal baru adalah yang datang dari bawah.

Bisnis yang dijalankan PT Alam Siak Lestari, juga utamanya berbagai kegiatan ekonomi serupa serta keberadaan perhimpunan sebagai ekosistem dari aneka macam inisiatif yang meninggalkan prinsip “ambil-bikin-buang”, termasuk dalam gerakan itu. ●

Pertumbuhan Ekonomi: Hidup Bersama Paradoks dan Delusi

PRODUK Domestik Bruto (PDB) global tumbuh pesat dalam tujuh dekade terakhir. Berada di bawah US\$ 10 triliun pada akhir Perang Dunia II, pada saat ini PDB global telah bertumbuh tujuh kali lipat nya. Namun, sedari awal, bahkan sejak Era Revolusi Industri, pandangan ekonomi arus utama yang melulu menekankan pertumbuhan PDB sudah menunjukkan sisi buruk. Ada sekian paradoks, sekian delusi.



	Pandangan Ekonomi Arus Utama	Paradoks dan Delusi
2	Peningkatan efisiensi menyebabkan berkurangnya penggunaan sumber daya.	Peningkatan efisiensi dapat menyebabkan penggunaan sumber daya secara luas.
5	Pembangunan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Batasan Pertumbuhan: Pertumbuhan ekonomi tanpa batas tidak mungkin terjadi di planet yang terbatas.
5 6	Kemajuan pembangunan ekonomi sama dengan kesejahteraan.	Di atas ambang batas tertentu, kemajuan ekonomi tidak berhubungan dengan kesejahteraan.
7 8	<ul style="list-style-type: none"> » Modal mengalir dari negara kaya modal ke negara miskin modal. » Pekerja terampil berpindah dari negara yang memiliki banyak keterampilan ke negara yang kekurangan keterampilan. » Degradasi lingkungan pertamanya meningkat dan kemudian menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, mengikuti pola berbentuk U terbalik 	<ul style="list-style-type: none"> » Modal finansial mengalir di negara-negara kaya modal finansial. » Modal alam mengalir dari negara-negara berpendapatan rendah ke negara-negara berpendapatan tinggi tanpa memandang ketersediaannya. » Pekerja terampil berpindah dari negara yang kekurangan keterampilan ke negara yang kaya akan keterampilan. » Kualitas lingkungan tidak bergantung pada tingkat pendapatan
9	Individu dipimpin oleh tangan tak kasat mata untuk memajukan kepentingan seluruh masyarakat.	Ketimpangan dan pemusatan kekayaan merugikan seluruh masyarakat.
10	Dalam jangka panjang, ketimpangan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.	Meningkatnya kesenjangan adalah karakteristik alami dari pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Coscieme L., Sutton P., Mortensen L.F., Kubiszewski I., Costanza R., Trebeck K., Pulselli F.M., Giannetti B.F., Fioramonti L., "Overcoming the Myths of Mainstream Economics to Enable a New Wellbeing Economy", *Sustainability* 2019. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/16/4374>

Indonesia Sampai Mana?

REZIM ekstraktif di Indonesia sudah berlangsung lama. Berikut catatannya sejak awal Orde Baru. Apa yang kemudian dicapai?

PDB per kapita (US\$)

Indeks Gini

Kekayaan yang Dikuasai 20% Pendapatan Terendah

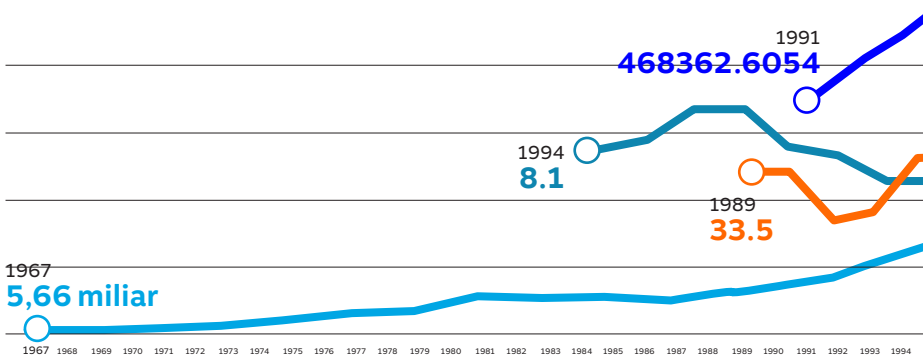
Total produksi batu bara (juta ton)

Nilai ekspor nikel (US\$)

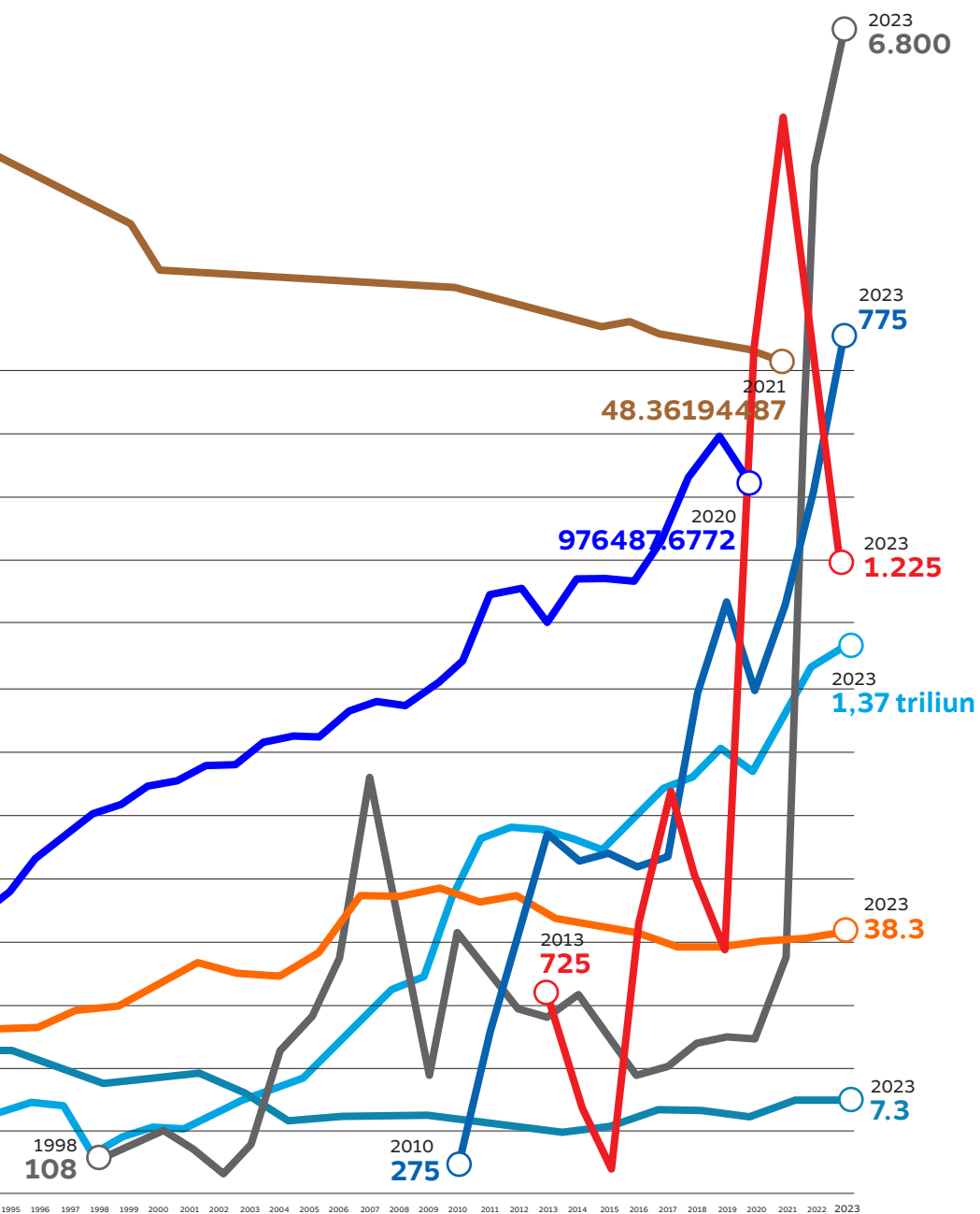
Area Hutan (%)

Jumlah Kejadian Banjir

Total Emisi Gas Rumah Kaca (kt ekuivalen CO₂)



Sumber: World Bank, Badan Pusat Statistik, Sustainable Development Report



Ekonomi Donat

BAYANGKAN sebuah donat. Ya, donat! Lalu, seperti Anda memakan donat, atau boleh pula kue cincin, inti dari pemikiran "ekonomi donat" adalah kita tidak boleh bercita-cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa batas, melainkan hidup dengan baik dalam lingkungan yang aman secara ekologis dan berkeadilan sosial, yaitu di antara cincin terdalam dan terluar yang bentuknya menyerupai donat.

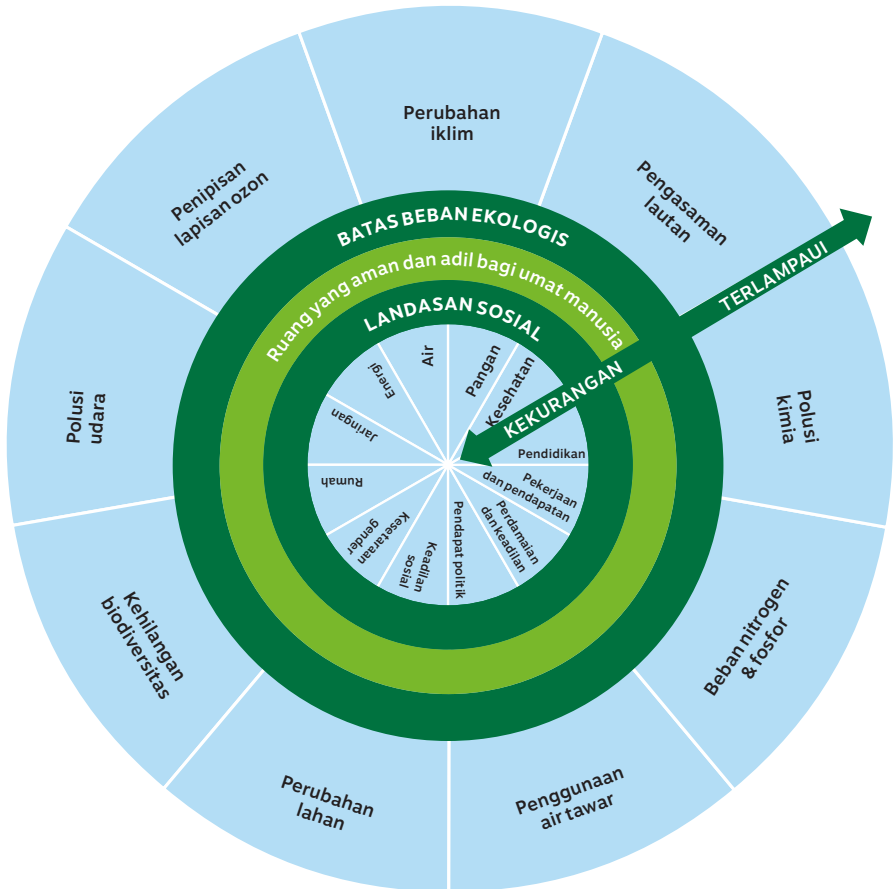
Cincin bagian dalam adalah seperangkat landasan bagi kesejahteraan manusia yang harus kita sediakan. Lingkaran terluar adalah serangkaian batasan ekologis bagi planet kita yang tidak boleh kita lewati.

Setujukah Anda?

Ekonomi donat pertama kali diperkenalkan pada 2012 oleh ekonom Oxford **Kate Raworth**. Pada 2017, Kate meluncurkan buku tentang pemikirannya ini, ***Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist***.



SERANGKAIAN BATASAN EKOLOGIS BAGI PLANET KITA YANG TIDAK BOLEH DILEWATI



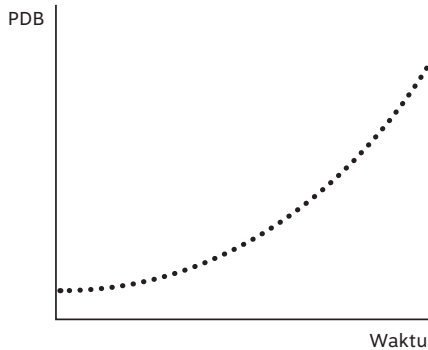
7

Jalan Menuju Ekonomi Donat

MENERAPKAN ekonomi donat membutuhkan perubahan pemikiran yang mendasar. Ada tujuh hal yang bisa dilakukan untuk menerapkan pemikiran ini ke dalam praktik.

1. UBAH TUJUAN

Produk Domestik Bruto (PDB)



Memaksimalkan nilai moneter seluruh barang dan jasa yang dijual melalui pasar atau negara

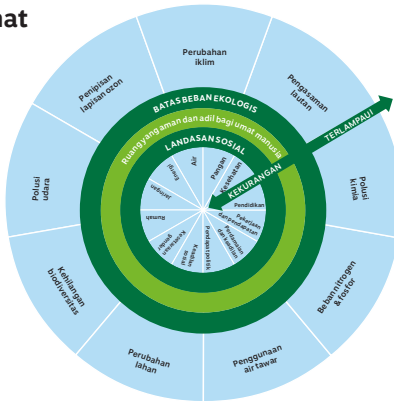
2.A. LIHAT GAMBARAN BESAR PEREKONOMIAN (1)

Aliran sirkular



Perekonomian sebagai lingkaran tertutup aliran uang dan sumber daya antara rumah tangga dan bisnis

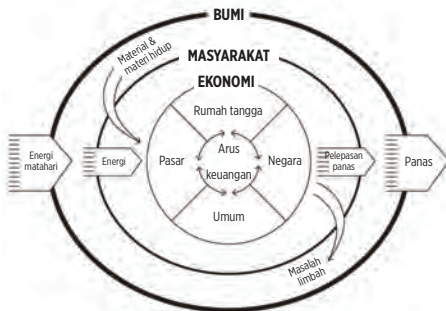
Donat



Donat menawarkan tujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang di planet bumi.

Memenuhi kebutuhan semua orang sesuai dengan kemampuan planet bumi yang hidup

Ekonomi tertanam



Perekonomian bersifat beragam dan melekat (dalam masyarakat dan dunia kehidupan, yang menjadi sandarannya)

Bagaimana perekonomian bergantung dan berdampak pada dunia kehidupan? Bagaimana perekonomian dibentuk oleh masyarakat—oleh hukum, politik, media, organisasi masyarakat, dan banyak lagi? Bagaimana keempat cara penyediaan (pasar, negara, rumah tangga, dan kepentingan bersama) dapat memberikan manfaat yang baik bagi umat manusia?

2.B. LIHAT GAMBARAN BESAR PEREKONOMIAN (2)

1. Rumah tangga

Aktivitas tak berbayar dalam rumah tangga yang menopang kebutuhan penting keluarga dan kehidupan sosial dengan sumber daya manusia universal berupa waktu, pengetahuan, keterampilan, kepedulian, empati, pembelajaran, dan hubungan timbal balik. Di mana Anda bisa menjadi orang tua, anak, pasangan, saudara, pengasuh...atau tanpa saudara.

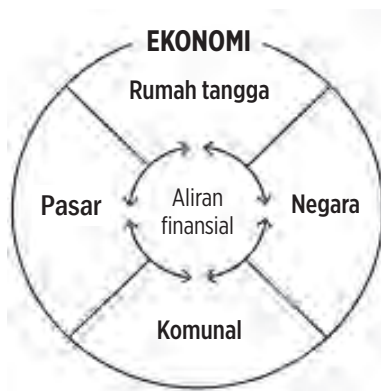
2. Pasar

Mekanisme di mana barang dan jasa dibeli dan dijual sesuai dengan nilai dan ketentuan pertukaran yang disepakati, dan orang-orang, kelompok dan organisasi terlibat dalam pertukaran tersebut. Di mana Anda bisa menjadi konsumen, produsen, buruh, pemilik...atau miskin.

3. Negara

Pemerintah lokal, regional, dan nasional yang menyediakan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menciptakan kerangka legislatif untuk semua bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Di mana Anda bisa menjadi penduduk, pengguna layanan, pegawai negeri, regulator, pemilih, pengunjuk rasa ...atau tanpa kewarganegaraan.

Dalam perekonomian ada empat bidang penyediaan kebutuhan kita, dan banyak peran ekonomi



4. Komunal

Proses dan bentuk pengelolaan sumber daya bersama oleh komunitas yang mengatur dirinya sendiri, di luar pemerintahan langsung pasar atau negara, untuk kepentingan bersama komunitas dan tempat tinggalnya. Di mana Anda dapat menjadi anggota, rekan pencipta, sukarelawan, pengurus...atau dikecualikan.

3. MENDIDIK SIFAT MANUSIA

Manusia ekonomi rasional



Manusia yang mampu beradaptasi secara sosial



Sendirian, mementingkan diri sendiri, penuh perhitungan dan kompetitif, dan alam ada di bawah kakinya



Komunitas yang peduli, saling membantu, penuh kasih sayang yang merupakan bagian dari jaringan kehidupan

Menurut Anda, apa yang harus menjadi karakteristik inti dan kualitas kemanusiaan dalam model ekonomi abad ke-21? Apa yang bisa terjadi jika perekonomian secara aktif memupuk sifat terbaik manusia, memupuk kapasitas bawaan kita untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan saling membantu?

4. PAHAMI SISTEM

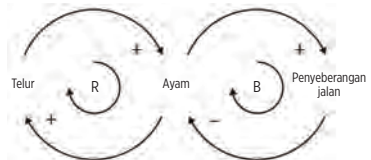
Keseimbangan mekanis



Kompleksitas dinamis



Menyederhanakan sistem dengan tujuan memprediksi dan mengendalikan hasil



Merangkul ketidakpastian sistem yang kompleks dan keterhubungannya

Jika perekonomian adalah sebuah 'sistem kompleks' yang tidak dapat dikendalikan tetapi hanya dikelola, apa peran ekonom? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menjadi ekonom yang baik?

5. BERSIKAP DISTRIBUTIF MELALUI DESAIN

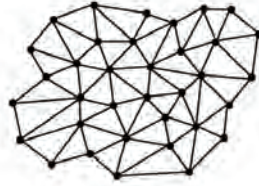
Memecah belah



Distributif



Menangkap peluang dan nilai di tangan segelintir orang



Berbagi peluang dan nilai dengan semua pihak yang ikut menciptakannya

Siapa yang menciptakan dan mengendalikan bisnis, dan siapa yang mendapat manfaat dari nilai yang diciptakannya? Hukum, peraturan, infrastruktur, teknologi, hak istimewa dan warisan apa yang membentuk hal-hal ini?

6. BERSIKAP REGENERATIF MELALUI DESAIN

Degeneratif



Regeneratif



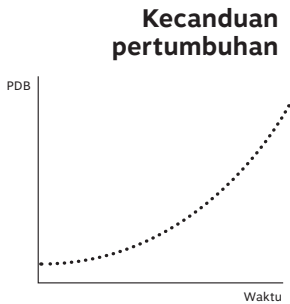
Menghancurkan sistem pendukung kehidupan di bumi, dan mendorong kita melampaui batasan planet



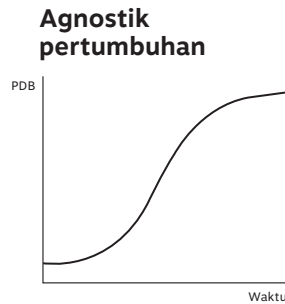
Memulihkan dan bekerja dalam siklus dunia kehidupan, dan membawa kita kembali ke dalam batasan planet

Alam tidak memiliki limbah. Jadi, bagaimana kita bisa belajar dari alam untuk menjadi lebih regeneratif: memperbaiki, memperbaharui, memulihkan, menggunakan kembali, dan membuat ulang bahan-bahan teknis yang kita gunakan?

7. PIKIRKAN LAGI TENTANG PERTUMBUHAN



Kita mempunyai perekonomian yang perlu tumbuh, terlepas dari apakah hal tersebut membuat kita berkembang atau tidak



Kita membutuhkan perekonomian yang memungkinkan kita untuk berkembang, terlepas dari pertumbuhannya atau tidak

Ada banyak 'pengait' terhadap pertumbuhan, termasuk penciptaan uang berbasis utang, konsumerisme, bisnis yang didorong oleh pemegang saham, risiko lapangan kerja, politik yang dikuasai oleh kekayaan, kekuatan geopolitik, pendapatan pajak, dan ketakutan terhadap utang publik.

Bagaimana perekonomian dapat mengakhiri ketergantungan struktural terhadap pertumbuhan yang tiada henti?

Masyita Crystallin, tentang ekonomi donat dan ekonomi restoratif di Indonesia:

‘Perlu Insentif untuk Mendorong Perilaku Ramah Lingkungan’

DALAM beberapa dekade terakhir, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam upaya global menghadapi tantangan isu lingkungan dan sosial yang semakin mendesak. Ekonomi donat, yang diperkenalkan ekonom Inggris, Kate Raworth, adalah salah satu pendekatan inovatif yang muncul.

Masyita Crystallin, ekonom Universitas Indonesia yang mendalami isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, memberikan pandangannya tentang bagaimana konsep ekonomi donat dapat diterapkan di Indonesia. Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi ini menyoroti pentingnya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas alam.

Masyita menggarisbawahi perlunya pendekatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan mengurangi dampak negatif, tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi lingkungan. Salah satu contoh yang diang-



kat adalah agroforestri, praktik yang menggabungkan pertanian dengan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ekosistem.

Implementasi konsep-konsep ini di Indonesia memang tidak mudah. “Penyelarasan antara tujuan ekonomi dan target ekologi memerlukan regulasi yang tepat, insentif yang sesuai, dan kepemimpinan yang kuat, dari pemerintah maupun swasta,” katanya.

Masyita memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi restoratif dapat dikembangkan di Indonesia. Dari pengembangan agroforestri hingga penerapan konsep *net positive*, ia menawarkan berbagai strategi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Petikan wawancara tim penulis dengannya:

Bagaimana relevansi ekonomi donat untuk Indonesia?

Untuk Indonesia, konsep ini sangat relevan karena tujuan pembangunan bukan hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan lingkungan.

Ketika pandemi Covid-19 kita menyadari bahwa penggunaan sumber daya alam melebihi kapasitas bumi untuk *replenish*-nya, yang menunjukkan bahwa kita hidup dalam kapasitas ekologis negatif. Jika terus berlanjut, sumber daya alam akan habis. Buku *Net Positive* karya Paul Polman juga membahas hal seperti ekonomi donat dan pentingnya mencapai dampak positif *net* dari kegiatan ekonomi.

Bagaimana konsep agroforestri terkait dengan ekonomi restoratif?

Agroforestri adalah salah satu contoh proyek yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dalam agroforestri hutan digunakan untuk menanam tanaman komersial seperti kopi atau singkong. Hal ini tidak hanya mendistribusikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi.

Agroforestri paling dekat dengan konsep ekonomi regeneratif atau restoratif karena tanaman yang dikembangkan biasanya memiliki nilai tambah tinggi dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Apa saja tantangan mengimplementasikan ekonomi donat menuju net positive di Indonesia?

Tantangan utamanya adalah keterbatasan ruang, waktu, dan KPI (*key performance indicators*) dari setiap aktor ekonomi. Perusahaan, misalnya, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham untuk meningkatkan laba, dan dampak positif dari kegiatan ekonomi sering tidak terlihat dalam jangka pendek. Selain itu, dalam industri ekstraktif, sering ekstraksi sumber daya alam lebih besar daripada pengembalian kepada alam.

Penyelarasan antara tujuan ekonomi dan target ekologi memerlukan regulasi yang tepat, insentif yang sesuai, dan kepemimpinan yang kuat, dari pemerintah maupun swasta.

Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam konsep *net positive*?

Dalam konsep *net positive* yang diusung Paul Polman, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif tetapi juga untuk menciptakan dampak positif. Misalnya, dalam hal emisi karbon, perusahaan tidak hanya harus mengurangi emisi tetapi juga berusaha mencapai dampak positif bersih dengan mengkompensasi emisi melalui inisiatif yang mendukung lingkungan. Konsep ini melampaui ekonomi donat karena berfokus pada pencapaian dampak positif *net* dari kegiatan ekonomi.

Mengapa orang Indonesia sering gagal memahami isu lingkungan dan ekonomi secara bersamaan?

Bukan hanya orang Indonesia yang menghadapi kesulitan ini. Masalah utamanya adalah insentif yang tidak terkoneksi dengan baik. Misalnya, membuang sampah sembarangan tidak menimbulkan dampak langsung kepada pelakunya, sehingga tidak ada insentif untuk mengubah perilaku.

Dalam kasus nikel, biaya untuk memproduksi *green* nikel lebih mahal, dan 70 persen nikel diekspor ke Cina yang tidak memerlukan *green* nikel, sehingga tidak ada insentif untuk memproduksi *green* nikel. Solusinya adalah menciptakan insentif yang tepat untuk mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Mengapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lambat dan apa solusinya?

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia lambat karena kurangnya mesin pertumbuhan yang kuat. Sekitar 55 persen dari pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki gaji di atas Rp 5 atau Rp 10 juta. Produktivitas tenaga kerja kita juga rendah dibandingkan dengan negara lain.

Solusinya adalah menciptakan mesin pertumbuhan yang kuat, misalnya melalui investasi dalam *human capital* seperti program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan pelatihan vokasi yang terarah dan jelas sarannya. Selain itu, penting untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti nikel dan agroforestri.

Apakah sektor industri atau manufaktur akan tetap mendominasi?

Saat ini, industri dan manufaktur dikombinasikan dengan sektor jasa. Contohnya, dalam manufaktur kendaraan, nilai tambah yang tinggi justru ada pada layanan purna jualnya, seperti perawatan berkala atau servis. Ekonomi kreatif dan restoratif belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif, tetapi dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan masalah lingkungan.

Karena itu, perubahan di tingkat korporasi, terutama dalam sektor manufaktur, yang membuat kita senang. Kita perlu mencari cara agar manufaktur bisa mencapai minimal level ekonomi donat atau bahkan *net positive*. Jangan sampai industri kita diperkecil sehingga pertumbuhan ekonomi kita menurun. Jika *economic pie* menurun, akan ada risiko seperti pergolakan sosial dan insen-

**Warga Dusun Roban,
Mentebah, Kalimantan Barat,
mengolah kopi hasil kebunnya.**

FOREST DIGEST





Masyarakat di Desa Tanjung, Mentebah, Kalimantan Barat, merawat dan memetik kopi di kebunnya yang berada di hutan desa kawasan itu.

FOREST DIGEST

tif untuk berkreasi juga menurun. Hal ini akan berdampak negatif pada sektor industri dan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, jika banyak pemutusan hubungan kerja, pendapatan menurun, maka akan terjadi *spiral* penurunan ekonomi.

Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap didorong ketika daerah-daerah tertentu bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa pertumbuhan yang signifikan?

Daerah yang tidak mengalami pertumbuhan tinggi akan tertinggal. Contohnya adalah Sumatera Barat. Dahulu kota-kota besar seperti Padang, Palembang, dan Medan adalah pusat ekonomi. Namun, kini banyak orang yang

produktif dari Padang memilih tinggal di luar daerah.

Pendekatan ekonomi regeneratif dan proteksi ekonomi berbasis lokal harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti struktur ekonomi yang ada. Di daerah seperti Papua, produksi manufaktur atau pertambangan tetap ada, tetapi bisa dilengkapi dengan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Misalnya, mengelola hutan dengan tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi ada risikonya.

Jika kita hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, risiko yang muncul adalah ketidakstabilan sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan bisa menyebabkan *spiraling down*, menurunnya tingkat pendapatan dan produktivitas.

Karena itu, penting untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan *scalable* dengan memastikan insentif yang tepat bagi semua aktor ekonomi. Misalnya, dalam hal substitusi makanan, kita bisa mengembangkan produk lokal seperti singkong yang memiliki potensi untuk menggantikan beras.

Mungkinkah mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan pertumbuhan?

Ya, mungkin. Kita bisa mengembangkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan memadukan sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya, kita bisa mengembangkan agro-

forestri yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, kita bisa mendorong ekonomi kreatif seperti ekowisata yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Namun, penting untuk tidak mengabaikan sektor industri dan manufaktur yang tetap menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Seberapa jauh pertumbuhan bisa dikejar kalau daya dukung planet ini semakin terbatas karena secara ekologis kemampuannya berkurang?

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal angka tetapi juga struktur insentif. Kita perlu memastikan bahwa insentif yang ada mendorong perilaku yang ramah lingkungan dan sosial. Jika tidak, aktivitas ekonomi akan menyebabkan dampak eksternal yang tidak terinternalisasi.

Indonesia tidak perlu mengejar pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi jika itu tidak berkontribusi pada kualitas hidup yang baik. Kita bisa memperbaiki struktur insentif sehingga kekayaan dapat dibagikan lebih merata.

Dalam ekonomi restoratif, ada banyak komoditas yang mungkin tidak bisa dimasifkan tetapi memiliki nilai tinggi. Dengan riset dan pengembangan yang baik, kita bisa menghasilkan nilai tambah yang tinggi dari komoditas ini. Namun, ini harus dilihat sebagai tambahan dari mesin pertumbuhan yang ada sekarang.

Bagaimana potensi *care economy* di Indonesia?

Potensinya sangat besar, terutama di sektor kesehatan seperti perawat. Filipina telah berhasil mengembangkan ekonomi ini dengan melatih perawat yang bekerja di Amerika. Indonesia bisa mengikuti jejak Filipina dengan mendorong penggunaan bahasa Inggris dan mengembangkan pelatihan vokasi yang tepat sasaran.

Dalam 10 tahun, dengan pendidikan yang tepat, kita bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif di sektor *care economy*. Selain itu, *care economy* bisa menjadi komplementer dari sektor-sektor lain seperti agroforestri dan ekowisata yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Bagaimana Indonesia bisa mengembangkan ekonomi restoratif dan kreatif?

Ekonomi restoratif dan kreatif bisa dikembangkan sebagai komplementer dari struktur dasar ekonomi kita. Misalnya, dalam kasus agroforestri, kita bisa menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, ekonomi kreatif seperti ekowisata bisa membantu mengurangi ketimpangan sosial dan dampak lingkungan.

Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif, kita tetap perlu berfokus pada sektor industri dan manufaktur yang dikombinasikan dengan jasa, seperti *after-sales service*. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan bahasa Inggris agar kita bisa bersaing dalam sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan bahasa. •

Kegilaan Para Aktor Perubahan

HINGGA memasuki usia 60 tahun, Ray Anderson tidak dikenal sebagai pejabat lingkungan hidup, atau bahkan seorang yang sekadar menaruh perhatian pada isu itu. Karenanya, ketika pada 1994 pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) Interface, penghasil produk penutup lantai, ini memaparkan visinya tentang bisnis yang *sustainable*, yang merestorasi lingkungan, tak seorang pun stafnya yang menyambut dengan antusiasme.

Sebagian besar stafnya mengira Anderson “stres berat karena tekanan dari tugas menjalankan perusahaan”. Ada pula yang mengemukakan dengan pas apa yang sebenarnya berkecamuk dalam benak para staf. “Kami tak tahu apa maksud Ray. Kami mengira keberlanjutan adalah sesuatu bagi para pencinta lingkungan. Bagaimana bisa hal ini diterapkan di perusahaan industri seperti kami?” kata Buddy Hay, yang kala itu adalah seorang akuntan.¹

¹ Mikhail Davis, “20 Years Later, Interface Looks Back on Ray Anderson’s Legacy”, *GreenBiz*, 3 September 2014.





Masyarakat dari Suku Moi yang tinggal di Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Menjadikan hutan sebagai tempat memperoleh makanan yang harus dijaga mata rantainya.

ULET IFANSASTI

Respons lain muncul ketika Anderson menyampaikan pesan tentang keberlanjutan itu kepada sekelompok investor di Wall Street, bursa saham di Kota New York. Sehari sesudahnya satu kabar “kejutan” masuk: investor terbesar Interface melepas sahamnya karena mengira Anderson telah berubah akal.

Mengingat masanya, respons semacam itu memang tak terhindarkan. Ide tentang keberlanjutan dalam pembangunan, dalam kegiatan ekonomi, baru diadopsi sebagai kesepakatan global dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan

atau Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1992. Panggilan aksi yang lebih luas cakupannya dan berlaku juga bagi swasta, demi masa depan bumi yang lebih baik, yakni Sustainable Development Goals, pun baru diformulasikan 23 tahun kemudian. Jadi, ide itu masih asing.

Anderson, yang mengaku tercerahkan setelah membaca *The Ecology of Commerce*, buku karya Paul Hawken, tak peduli. Dalam suatu kesempatan dia menjelaskan bahwa menjadi gila adalah bagian dari tugasnya sebagai CEO. Menurut dia, hal ini memungkinkannya melihat apa yang berikutnya bakal terjadi.

Dan dia memang benar, meski tidak mudah juga melalui periode menuju masa depan itu. Dengan berlalunya waktu, apa yang kemudian dilakukan, mula-mula menautkan bonus pegawai dengan pengurangan limbah, perlahan-lahan mewujudkan gagasannya. Dalam dua dasawarsa sejak itu Interface berhasil merealisasikan 49 persen pasokan bahan mentah untuk produksinya dari sumber-sumber daur ulang atau terbaru. Kini Interface berani mengaku sebagai perusahaan yang “menjalin keberlanjutan dalam setiap kreasi kami”.



KESAN mustahil, atau anggapan sebagai inisiatif singkat, memang merupakan halangan terbesar dalam upaya mengimplementasikan gagasan tentang bisnis lestari—bisnis yang merestorasi kerusakan akibat praktik “ambil-bikin-buang” dan yang terus-menerus ikut memperbaiki pasokan sumber daya. Banyak yang mengalami situasi serupa dengan yang dihadapi Anderson. Tapi mereka,

seperti halnya Anderson, membuktikan bahwa visi yang jelas, tekad yang kuat, dan kepemimpinan yang transformasional bukan saja mampu menghadapi pesimisme, melainkan juga membawanya ke pembuktian.

Hawken, wirausahawan dan aktivis lingkungan yang memelopori penyebutan ekonomi restoratif, berpendapat bahwa kegilaan yang diperlihatkan Anderson perlu diperlihatkan. Untuk mendorong bermunculannya pemimpin seperti Anderson dan mereka yang telah menempuh jalan yang sama, Hawken mendirikan Drawdown Lab—ini dilakukan seiring dengan inisiatifnya untuk menggalang riset dan pembuatan pangkalan data (*database*) solusi pengurangan emisi lewat Project Drawdown pada 2014.

Kegilaan dan *passion* yang kuat juga terdapat dalam diri Kate Raworth. Pencetus konsep ekonomi donat ini tak menepis fakta bahwa banyak yang menyangsikan, atau bahkan mengkritik secara keras, gagasannya tentang cara memenuhi kebutuhan setiap orang untuk menjalani hidup yang baik seraya membatasi dampak buruknya terhadap lingkungan. Tapi dia maju terus.

Untuk membuktikan “teori”-nya bisa diimplementasi-



Kate Raworth.

GRAEME ROBERTSON

kan sebagai solusi bagi problem riil, dia mendirikan Doughnut Economics Action Lab (DEAL) pada 2019. Bersama Carlota Sanz, yang berpengalaman di dunia korporasi dan punya minat kuat terhadap ekonomi regeneratif, dia menjadikan lembaga ini sebagai laboratorium praktik dari aksi nyata untuk membuat perubahan. Dia membantu para aktor perubahan di berbagai penjuru dunia untuk mendiskusikan dan menerapkan gagasannya dalam pendidikan, komunitas, bisnis, dan pemerintahan; juga di perkotaan, kecil maupun besar.

Banyak yang telah meminta bantuan DEAL. Pada level kota, contohnya adalah Amsterdam. Ibu kota Belanda ini menjadi kota pertama di dunia yang memutuskan untuk mengaplikasikan konsep ekonomi donat. Pada 2020, manakala keputusan dibuat, pandemi Covid-19 masih berlangsung—penutupan (*lockdown*) kota untuk menghadang gelombang pertama serangan virus malah baru berjalan. Tapi ini merupakan langkah yang melihat ke depan: tentang bagaimana kota akan memulihkan diri setelah pandemi berlalu.

Raworth membantu mengecilkan skala konsepnya, yang dalam versi aslinya bersifat global, sehingga pas untuk ukuran kota. Dinamai City Portrait, model yang ditetapkan sebagai strategi pembangunan kota hingga 2025 ini, menurut pernyataan dalam dokumennya, “merupakan potret spontan keadaan kota secara menyeluruh yang akan menjadi titik awal pemikiran dalam gambaran besar, inovasi kolaboratif, dan transformasi sistemik”.

Yang juga hendak dituju adalah menjadikannya sebagai stimulus bagi kolaborasi lintas departemen di dalam

kota. Kolaborasi ini melibatkan aktor-aktor dari berbagai kalangan yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang membentuk kondisi ini: memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi semua tanpa menambah tekanan terhadap planet.

Ada tiga sektor yang menjadi fokus: pangan, barang konsumsi, dan konstruksi. Dengan sistem untuk memonitor, Amsterdam menargetkan pada 2030 akan mengurangi konsumsi hingga 20 persen, menekan sampah makanan sebesar 50 persen, dan memastikan semua pembangunan di kota menggunakan sebanyak mungkin material ramah lingkungan.

Beberapa kota lain yang menyusul Amsterdam, di antaranya, adalah Kopenhagen (Denmark), Brussels (Belgia), Dunedin (Selandia Baru), dan Nanaimo (Kanada). Kota-kota ini menetapkan skala dan lingkup implementasi yang berbeda-beda. Kota-kota lain di Amerika Serikat, yaitu Portland dan Austin, juga berminat menerapkan versi sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan peluang yang ada.

Kota dan kawasan urban bukan satu-satunya area yang memungkinkan implementasi kegiatan ekonomi yang restoratif. Malah, kalau di suatu kawasan terdapat hutan yang luas, di situlah sebenarnya prioritasnya. Eksploitasi hutan merupakan salah satu sumber emisi terbesar. Jika hutan terjaga atau dipulihkan, ia bisa membantu menurunkan laju perubahan iklim dengan kemampuannya menangkap karbon dioksida (CO₂) di atmosfer.

“Hutan ’kan *concern* dunia. Di sisi nasional, hutan juga jadi bahan bahasan. Dan secara makro, kontribusi Indonesia terhadap problem perubahan iklim yang terbesar

dari kerusakan alam—kebakaran hutan dan deforestasi,” kata Rama Manusama, *co-founder* dan Managing Partner Katalys Partners, sebuah usaha yang berfokus membangun dan mengembangkan bisnis baru yang bisa berdampak positif secara sosial dan lingkungan.

Apa yang dilakukan di Afrika Selatan, umpamanya, bisa jadi contoh. Melalui Working for Wetlands, yang diadakan pada 2003, negara ini melancarkan proyek untuk merehabilitasi kawasan gambutnya. Berbarengan dengan itu dilancarkan pula kegiatan ekonomi yang secara langsung, melalui perencanaan serta penerapannya, juga bertujuan menyukseskan pemulihan gambut itu. Di antara yang dilakukan adalah pembangunan pedesaan demi menguatkan jaringan sosial, mengembangkan keterampilan, dan menghubungkan manusia dengan lingkungan alamnya.

Sebuah kegiatan di sektor peternakan sapi perah bisa memberikan gambaran. Di area restorasi di dekat Kokstad, Provinsi KwaZulu-Natal, diterapkan inisiatif mencampurkan biomassa dari tanaman invasif yang disebut akasia *black wattle* ke dalam makanan ternak. Sebagai bagian dari restorasi, tanaman ini sengaja ditebangi. Hasilnya: bukan saja penyingkiran tanaman asing membantu pemulihan vegetasi alamiah, pencampuran biomassa-nya dengan makanan ternak itu pun memberikan perseediaan diet seimbang bagi ternak.

Masih ada yang lain. Produk susu yang dihasilkan menjadi pasokan bagi sebuah perusahaan multinasional, yang mengucurkan dana untuk membantu upaya restorasi ekosistem. Investasi ini jadi ikut berperan dalam penca-



Dua perempuan pegiat Yayasan Bambu Lestari berpose sambil membawa bambu muda dalam keranjangnya di Flores, Nusa Tenggara Timur.

ULET IFANSASTI

paian tujuan-tujuan perusahaan menyangkut keberlanjutan lingkungan. Ada nilai yang dinikmati bersama.

Inisiatif di Afrika Selatan serta di sejumlah negara lain di benua itu memperlihatkan bahwa ekonomi restoratif bisa berkontribusi bagi upaya rehabilitasi ekosistem, meski jumlahnya belum banyak. Yang menjadi catatan serius adalah dana publik yang terbatas menjadikan dampak dari upaya yang bisa dilaksanakan di sektor pekerjaan umum pun ada limitasinya. Sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, dan sektor kunci lain dinilai perlu dilibatkan dalam proyek-proyek restorasi.



SEJAUH ini telah banyak proyek, inisiatif, atau usa-



Dua warga di Sausu Gandasari, Parigi Selatan, Sulawesi Tengah, mengolah kopi hasil panen dari kebun mereka di sebuah koperasi yang dijadikan tempat mengolah kopi sebelum dijual.

FOREST DIGEST

ha rintisan dari berbagai lokasi di seluruh dunia yang bisa dijadikan rujukan. Pangkalan data Project Drawdown, yang dibuat melalui riset, bahkan memiliki daftar ekstensif perihal bidang-bidang usaha yang bisa dijalankan, meliputi sembilan sektor, yakni listrik; pangan, pertanian, dan penggunaan lahan; industri; transportasi; bangunan; penyimpanan karbon dalam tanah (*land sinks*); penyimpanan karbon di pantai dan laut (*coastal and ocean sinks*); penyimpanan karbon buatan (*engineered sinks*); dan kesehatan dan pendidikan.

Di Indonesia, riset tentang kegiatan ekonomi yang restoratif, yang berskop mikro, walaupun ada, umumnya merupakan bagian dari pembuatan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis) atau dilakukan berdasarkan permintaan suatu lembaga. “Jadi, tidak tersedia untuk publik, dan yang merupakan pesanan tidak bersifat independen,” kata Harry Seldadyo Gunardi, konsultan keberlan-

Hutan 'kan *concern* dunia. Di sisi nasional, (hutan) juga jadi bahan bahasan. Dan secara makro, kontribusi Indonesia terhadap problem perubahan iklim yang terbesar dari kerusakan alam—kebakaran hutan dan deforestasi.

jutan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah serta pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Meski demikian, berbagai rintisan usaha telah dijalankan dari tahun ke tahun, sekalipun sebagian besar berskala kecil atau mikro dan jalan sendiri-sendiri.

Dari yang telah berjalan itu memang belum terlihat dampak yang signifikan. Tapi, menurut Harry, bukan berarti ada kesia-siaan di situ. Justru karenanyalah perlu ada ikhtiar untuk mendorong pengadopsiannya agar lebih masif dan mengamplifikasi pesan yang terkandung dalam keberadaannya.

Dalam praktiknya, di berbagai negara, hal itulah yang menimbulkan bukan saja kesadaran tapi juga tindakan: bahwa kebijakan tegas yang menyediakan mekanisme kelembagaan dan regulasi yang kuat memang diperlukan. Ini merupakan keniscayaan untuk membuka peluang sebesar-besarnya agar muncul pengusaha-pengusaha seperti Anderson, selain anak-anak muda yang sejak awal memang berniat menjadi wirausahawan sosial (*social entrepreneur*).

Dengan itulah dampak penyelamatan bumi yang berjangka panjang bisa dicapai. •

Wacana Menuju Ekonomi Restorasi

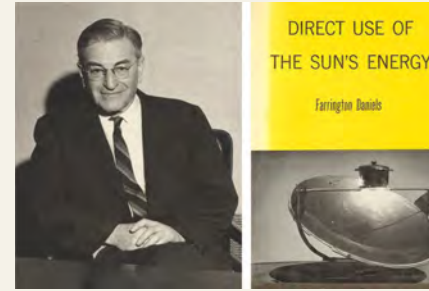
1960. *Goodbye to a River*, oleh John Graves, terbit. Buku ini menceritakan perjalanan kano John Graves menyusuri Sungai Brazos di Texas dan sejarah sungai tersebut yang akan hilang jika 13 bendungan di sana jadi dibangun.

1962. Rachel Carson menerbitkan *Silent Spring*, yang memperingatkan ancaman masa depan yang kelam karena Revolusi Hijau dan industrialisasi.



1963. Naturalis Kanada Farley Mowat menerbitkan *Never Cry Wolf*, salah satu buku paling berpengaruh dalam advokasi hewan.

1961
Di PBB, Presiden AS John F. Kennedy menyatakan, "Setiap penghuni planet ini harus memikirkan hari manakala planet ini tidak dapat dihuni lagi."



1964. Farrington Daniels menerbitkan buku *Direct Use of the Sun's Energy*. "Rencana harus dibuat sekarang untuk mengembangkan pengganti bahan bakar yang mengandalkan pembakaran – batu bara, minyak dan gas... Penelitian untuk sumber panas dan listrik baru sudah lama tertunda," ujarnya.

1965. 8 Februari, Presiden AS Lyndon Johnson memperingatkan penumpukan karbon dioksida di atmosfer.



1968
18 Maret, Robert F. Kennedy berpidato tentang isu lingkungan dalam kampanye presidennya. Dia mengatakan:
"Sudah terlalu lama kita menyerahkan keunggulan komunitas dan nilai-nilai komunitas hanya pada akumulasi materi. Produk nasional bruto kita... Namun produk nasional bruto tidak menjamin kesehatan anak-anak kita, kualitas pendidikan mereka, atau kesenangan bermain mereka. Itu tidak mencakup keindahan puisi kita atau kekuatan pernikahan kita; kecerdasan debat publik kita, atau integritas pejabat publik kita. Hal ini tidak mengukur kecerdasan maupun keberanian kita; baik kebijaksanaan maupun pembelajaran kita; baik belas kasih maupun pengabdian kami terhadap negara kami; singkatnya, ia mengukur segalanya, kecuali apa yang membuat hidup berharga. Dan hal ini memberi tahu kita segalanya tentang Amerika kecuali mengapa kita bangga menjadi orang Amerika."

1969. 26 November, Lima ratus orang menghadiri konferensi UNESCO "Man and his Environment: A View Towards Survival" di San Francisco, sebagai persiapan KTT Stockholm 1972. Di sana:
» Paul Ehrlich mengatakan mustahil meningkatkan pasokan makanan bagi enam hingga tujuh miliar orang yang diperkirakan terjadi pada abad ke-21. Gagasan bahwa pasokan pangan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan lautan, "adalah tipuan besar," kata Erlich.
» Stirling Bunnell memperingatkan bahwa baik bentuk tenaga nuklir – fisi atau fusi – tidak akan menjadi pengganti energi fosil yang aman.
» Carl Gerstacker, ketua Dow Chemical Co., mengatakan bahwa yang mengkhawatirkannya adalah keengganan para politisi untuk menetapkan langkah-langkah polusi yang efektif.



1972
» W. Eugene Smith menerbitkan esai foto Tragedi Minamata di Jepang, tentang dampak buruk merkuri terhadap anak-anak. Gambar-gambaranya kemudian menjadi ikon gerakan lingkungan.

» 1 September, ahli iklim Inggris John Stanley Sawyer menulis di *Nature* bahwa peningkatan CO2 akibat kegiatan manusia akan meningkatkan suhu bumi di akhir abad ke-20.

» 31 Desember, Club of Rome menerbitkan *The Limits to Growth*, yang memicu perdebatan mengenai konsep baru pembangunan berkelanjutan. Buku berikutnya, *Beyond the Limits*, diterbitkan pada 1992.

1973. E.F. Schumacher menerbitkan *Small is Beautiful: Economics as if People Mattered*. Dia menyatakan, "salah satu kesalahan paling fatal di zaman kita adalah keyakinan bahwa 'masalah produksi' telah terpecahkan... Seorang pengusaha tidak akan menganggap sebuah perusahaan telah memecahkan masalah produksi dan untuk mencapai kelangsungan hidup jika dia melihat bahwa perusahaan tersebut menghabiskan modalnya dengan cepat."



1978
Eric Ashby, menerbitkan *Reconciling Man with the Environment*, dan mengusulkan tiga "rekonsiliasi besar": Manusia dengan alam, nafsu makan dengan sumber daya, dan kaya dengan miskin. "Tidak ada yang bisa memprediksi dampak penuh dari tindakan mengutak-atik bagian mana pun dari suatu ekosistem. Bahkan lingkungan tak hidup pun mempunyai sifat-sifat yang tanpanya kehidupan seperti yang kita tahu tidak akan dapat dibayangkan," tulis Ashby, yang menyimpulkan hak-hak alam harus dilindungi oleh hukum.

1979. 20 Juni, Presiden AS Jimmy Carter membangun sel surya di atap Gedung Putih. Dia mengatakan, "satu generasi dari sekarang, pemanas tenaga surya ini dapat menjadi sebuah keingintahuan, sebuah museum, sebuah contoh jalan yang belum pernah dilalui, atau dapat menjadi bagian kecil dari salah satu petualangan terbesar dan paling menarik yang pernah dilakukan oleh dunia". Pada masa Presiden Ronald Reagan sel surya itu diturunkan dan kredit pajak untuk pemanas air tenaga surya, energi angin, dan inisiatif energi terbarukan dihapuskan.

» James Lovelock menerbitkan *Gaia: A New Look at Life on Earth*. Lovelock berteori bahwa bumi adalah entitas yang mengatur dirinya sendiri yang secara tidak sadar menjaga kondisi optimal bagi kehidupan.



1985
Ilmuwan Inggris Joe Farman mempublikasikan temuan lubang ozon di atas Antartika.

1987. Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Komisi Brundtland) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Komisi ini memperingatkan: “Upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan ekologi melalui pendekatan lama terhadap pembangunan dan perlindungan lingkungan akan meningkatkan ketidakstabilan... Keamanan harus dicari melalui perubahan... Kami sepakat dalam keyakinan kami bahwa keamanan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup planet ini bergantung pada perubahan tersebut saat ini.”

1988. NASA melaporkan lapisan ozon terkikis jauh lebih cepat dari perkiraan.

1982. 28 Oktober, Piagam PBB untuk Alam disahkan dengan suara 111 mendukung dan 1 menentang (Amerika Serikat). Piagam tersebut mengatakan:

“Alam harus dihormati dan proses-proses penting di dalamnya tidak boleh diganggu. Kelangsungan hidup genetik di bumi tidak boleh dikompromikan; tingkat populasi semua bentuk kehidupan, liar dan peliharaan, setidaknya harus cukup untuk kelangsungan hidup mereka, dan untuk tujuan ini habitat yang diperlukan harus dijaga. Seluruh wilayah bumi, baik daratan maupun lautan, harus tunduk pada prinsip-prinsip konservasi ini; perlindungan khusus harus diberikan pada kawasan yang unik, pada sampel yang mewakili semua tipe ekosistem yang berbeda, dan pada habitat spesies langka atau terancam punah. Ekosistem dan organisme, serta sumber daya darat, laut dan atmosfer yang dimanfaatkan oleh manusia, harus dikelola untuk mencapai dan mempertahankan produktivitas optimal yang berkelanjutan, namun tidak sedemikian rupa sehingga membahayakan integritas ekosistem atau spesies lain yang menjadi sumber dayanya. Mereka hidup berdampingan.”



1999

- » Worldwatch melaporkan 7 dari 10 ilmuwan percaya kita sedang mengalami kepunahan spesies massal terbesar dalam sejarah.
- » Populasi manusia mencapai 6 miliar, separuhnya tinggal di kota, dan hampir separuhnya (2,8 miliar) hidup dengan kurang dari \$2 sehari. PBB menyatakan bahwa meskipun globalisasi perdagangan telah membantu di beberapa negara, masyarakat miskin menjadi semakin miskin, baik secara absolut maupun relatif.

1993

Paul Hawken menyebut ekonomi restoratif lewat bukunya, *The Ecology of Commerce* (1993). Dia menyatakan ketidakpercayaannya terhadap konsep keberlanjutan. “Merestorasi lebih masuk akal ketimbang aljabar keberlanjutan,” ujarnya.



1990. David W. Pearce dan R. Kerry Turner dalam *Economics of Natural Resources and the Environment* menggambarkan ekonomi sirkuler sebagai sistem yang mengubah limbah dari kegiatan ekstraksi, produksi, dan konsumsi menjadi input dalam kegiatan produksi. Bagi model ini, limbah adalah tanda kesalahan sistem.

2002. KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (juga dikenal sebagai Rio+10) di Johannesburg, Afrika Selatan. Banyak yang tidak senang dengan hasilnya. Presiden Venezuela Hugo Chavez mengatakan KTT itu ternyata menjadi “dialog orang tuli” selama 10 hari.

“Kita seharusnya tidak mengadakan pertemuan puncak yang memalukan seperti ini lagi. Kami merasa marah dan putus asa karena para pemimpin dunia telah menjual kepada Organisasi Perdagangan Dunia dan bisnis besar. Mereka tidak melakukan apa pun untuk orang miskin,” kata Ricardo Navarro, ketua Friends of the Earth International.

2005. 19 Oktober, Deklarasi Universal PBB tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia diadopsi. Martabat manusia, hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dihormati sepenuhnya; kepentingan dan kesejahteraan individu harus diprioritaskan di atas kepentingan ilmu pengetahuan atau masyarakat.

2012. 22 Februari, PBB memulai program “Energi Berkelanjutan untuk Semua”, terutama ditujukan untuk negara berkembang, di mana satu dari lima orang tidak memiliki akses ke listrik modern, dan hampir tiga miliar orang bergantung pada kayu, batu bara, arang, atau kotoran hewan untuk memasak dan pemanas.

2009

27 Januari, peneliti iklim NOAA melaporkan bahwa tingkat CO2 yang diperkirakan pada 2050 akan menyebabkan kenaikan permukaan laut dan kekeringan yang akan berlangsung selama ribuan tahun.

24 November, Paus Fransiskus mengeluarkan Evangelii Gaudium.

“Meskipun pendapatan kelompok minoritas meningkat secara eksponensial, kesenjangan yang memisahkan kelompok mayoritas dengan kemakmuran yang dinikmati segelintir orang juga meningkat secara eksponensial. Ketimpangan ini merupakan akibat dari ideologi yang mempertahankan otonomi absolut pasar dan spekulasi keuangan. Konsekuensinya, mereka menolak hak negara, yang bertugas menjaga kepentingan umum, untuk melakukan segala bentuk kontrol. Maka lahirlah sebuah tirani baru, yang tidak terlihat dan sering bersifat virtual, yang secara sepihak dan tanpa henti memaksakan hukum dan aturannya sendiri.... Rasa haus akan kekuasaan dan harta benda tidak mengenal batas. Dalam sistem ini, yang cenderung melahap segala sesuatu yang menghalangi peningkatan keuntungan, apa pun yang rapuh, seperti lingkungan hidup, tidak berdaya di hadapan kepentingan pasar yang didewakan, yang menjadi satu-satunya aturan.”

2013

2016

27 Oktober, ekonom Inggris Nicholas Stern menyatakan “masa depan rendah karbon adalah satu-satunya masa depan”.

2019. 23 September, KTT Aksi Iklim PBB. Aktivis muda Greta Thunberg mengatakan dalam pidatonya:

“Ini semua salah. Aku seharusnya tidak berada di atas sini. Aku harus kembali ke sekolah di seberang lautan. Namun kalian semua datang kepada kami, kaum muda, untuk mencari harapan? Beraninya kamu! Kalian telah mencuri impianku dan masa kecilku dengan kata-kata kosong kalian. Namun aku salah satu yang beruntung. Orang-orang menderita. Orang-orang sekarat. Seluruh ekosistem sedang runtuh. Kita berada di awal kepunahan massal. Dan yang bisa kalian bicarakan hanyalah uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi yang abadi. Beraninya kamu!”

2017

Kate Raworth, Ekonom dari Environmental Change Institute di Oxford University, memunculkan ide ekonomi donat, yang merupakan komplemen untuk model ekonomi sirkuler. Raworth mempresentasikan “teori”-nya yang menempatkan kesejahteraan manusia, alih-alih uang, sebagai titik awal.

2020. DEAL membantu Amsterdam dengan City Portrait, model yang ditetapkan sebagai strategi pembangunan kota hingga 2025. Amsterdam menargetkan pada 2030 akan mengurangi konsumsi hingga 20 persen, menekan sampah makanan sebesar 50 persen, dan memastikan semua pembangunan di kota menggunakan sebanyak mungkin material ramah lingkungan.

» 13 Januari, tahun 2019 mencatat rekor baru dalam pemanasan lautan, tulis pakar iklim AS dan Cina dalam *Advances in Atmospheric Sciences*.

» 21 Januari, PM Jerman Angela Merkel membela Greta Thunberg setelah Thunberg bertukar tweet dengan Donald Trump dan para pengikutnya di Davos, Swiss. “Waktu sangat mendesak, jadi kita – kelompok lanjut usia ... harus memastikan bahwa kita menyikapi ketidaksabaran generasi muda secara positif dan konstruktif,” kata Merkel.



Resep Melawan 3 Krisis Besar Sekaligus

PADA 2 Juni 2022, baru setahun lewat sedikit, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bumi tidak sedang baik-baiknya karena ancaman yang ia sebut sebagai *triple planetary crisis*. Ia menyampaikannya dalam pertemuan Stockholm+50.

Mengatasi salah satu krisis besar itu saja kita kesulitan. Ambil contoh krisis keanekaragaman hayati. Hingga 20 Maret 2018, hanya tersisa tiga badak putih di dunia. Lalu, hari itu, otoritas Kenya melaporkan satu individu badak putih jantan mati, sehingga hanya tersisa dua badak putih, dan keduanya betina. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi tiga krisis sekaligus?

Ada banyak gagasan untuk menghadapinya, bahkan sejak sebelum Guterres memperkenalkan istilah tersebut. Eric Ashby mengusulkan dalam buku *Reconciling Man with the Environment* (1978) agar manusia (baca: kita) melakukan tiga “rekonsiliasi besar”: Manusia dengan alam, nafsu makan dengan sumber daya, dan kaya dengan miskin.

Guterres sendiri mengajukan resep “5 Pathways for a Healthy Planet” (5R), sebuah kerangka kerja yang menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mengatasi tiga krisis besar yang sedang terjadi di planet kita. Kami yakin Anda juga punya resep jitu lainnya.

1. KRISIS IKLIM

Perubahan iklim yang cepat dan dampaknya yang merusak, termasuk kenaikan suhu global, naiknya permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Krisis iklim mengancam ekosistem bumi, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan manusia.

1 Reimagining the Future (Mengimajinasikan Ulang Masa Depan)

Mengubah paradigma dan cara memandang pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan manusia. Menggagas konsep bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kualitas lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan planet.



2. KRISIS KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang luas mengancam stabilitas ekosistem, termasuk keberlanjutan sistem pangan, penyediaan air bersih, dan layanan ekosistem lainnya. Kehilangan spesies tanaman dan hewan juga berdampak pada potensi ilmiah, medis, dan ekonomi yang belum tergalai.

2 Regeneration of Ecosystems and Community and Social Resilience (Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan Komunitas dan Sosial)

Mendorong upaya untuk meregenerasi ekosistem yang rusak dan membangun ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan, termasuk pelestarian dan restorasi lahan, hutan, dan ekosistem lainnya.

3. KRISIS PENCEMARAN

Pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan berbagai aktivitas manusia, seperti industri, pertanian intensif, dan limbah plastik, memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran juga dapat mempengaruhi sistem iklim dan keanekaragaman hayati.

3 Recovery - Green Recovery and Inclusive Covid Recovery (Pemulihan Hijau dan Pemulihan Covid yang Inklusif)

Perlunya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk investasi dalam sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan infrastruktur hijau.

4 Rebalance Resource Use and Development for Greater Equity (Mengatur Ulang Penggunaan Sumber Daya dan Pembangunan untuk Keadilan yang Lebih Besar)

Mengakui bahwa ketidaksetaraan dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan adalah masalah serius. Pathway ini mengusulkan untuk mengubah cara kita menggunakan sumber daya alam dengan lebih adil dan berkelanjutan.

5 Reinvigorated and Renewed Multilateralism (Multilateralisme yang Diaktifkan Kembali dan Diperbarui)

Mendorong kerja sama internasional yang lebih kuat dan efektif dalam mengatasi tantangan global, termasuk isu lingkungan dan perubahan iklim, mencakup dukungan terhadap perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

Menang Banyak Ekonomi Restoratif

EKONOMI restoratif membawa konsep-konsep dalam ekonomi sirkular, yang lahir sebagai reaksi atas buruknya praktik ekonomi konvensional yang linier, selangkah lebih maju. Kuncinya adalah upaya aktif dalam memulihkan dan meregenerasi ekosistem dan memprioritaskan kesejahteraan sosial di samping pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi konvensional

Bertumpu pada pertumbuhan

Ambil-Bikin-Buang:
Sumber daya diekstraksi »
barang diproduksi »
digunakan » dibuang menjadi limbah

Ekonomi sirkular

Bertumpu pada pemakaian ulang

Sistem Loop Tertutup:
Penggunaan sumber daya dipertahankan selama mungkin, berfokus pada pengurangan limbah dan penggunaan kembali material

Ekonomi restoratif

Menjadikan kesejahteraan manusia, alih-alih uang, sebagai titik awal

Regenerasi dan Restorasi:
Ekonomi sirkular + Pemulihan ekosistem secara aktif + Peningkatan kesejahteraan sosial

“Merestorasi lebih masuk akal ketimbang aljabar keberlanjutan.”

— Paul Hawken, *The Ecology of Commerce* (1993)



Ekstraksi:

Habis dengan cepat karena bahan mentah diekstraksi dengan cepat atau diambil lebih cepat daripada kemampuan untuk memulihkannya

Penghasil limbah:

Menghasilkan limbah dan polusi dalam jumlah besar » degradasi lingkungan

Retensi nilai terbatas:

Kurangnya penekanan pada penggunaan kembali atau daur ulang produk mengakibatkan hilangnya potensi nilai bahan dan produk.

Efisiensi:

Sumber daya digunakan secara efisien, masa pakai produk diperpanjang, dan konsumsi sumber daya dikurangi

Dirancang untuk daya tahan dan penggunaan kembali:

Produk dirancang agar mudah dibongkar, diperbaiki, dan ditingkatkan, sehingga mendorong penggunaan kembali dan memperpanjang masa pakainya.

Daur ulang dan regenerasi:

Bahan didaur ulang untuk menghasilkan produk baru dan bahan organik dibuat kompos untuk meregenerasi sistem alami.

Holistik:

Sumber daya digunakan dengan mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan sistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan

Adanya limbah adalah tanda kesalahan sistem

Kesehatan ekosistem:

Memprioritaskan pemulihan ekosistem alami dan keanekaragaman hayati dengan maksud untuk menyembuhkan dan memperbaiki lingkungan yang rusak.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif
Center of Economic and Law Studies:

‘Ekonomi Restoratif Jawaban Pertumbuhan Berkualitas’

MODEL ekonomi yang menekankan pertumbuhan dengan modal raksasa dari korporasi-korporasi besar telah dinilai gagal menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. Model itu bahkan telah membawa dampak buruk bagi bumi dan masyarakat, khususnya mereka yang terus mengandalkan kearifan budaya lokal.

Seiring dengan kemajuan menuju abad ke-21, semakin banyak ekonom yang dengan kritis mengevaluasi kembali model ekonomi “tradisional” yang secara historis telah mendorong pembangunan global. Realisasinya jelas: paradigma ekonomi yang merusak di masa lalu tidak dapat diandalkan untuk generasi mendatang. Kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan model ekonomi sebelumnya dan memastikan keberlanjutan global telah memunculkan



pendekatan baru yang, di antaranya, dikenal sebagai ekonomi restoratif.

Terlepas dari potensinya, implementasi ekonomi restoratif menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi agar dapat sepenuhnya mewujudkan manfaatnya. Untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan itu, juga apa yang mesti dipenuhi agar implementasi tersebut dapat direalisasikan, tim penulis mewawancarai Bhima Yudhistira Adhinegara, pendiri dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios). Lembaga riset yang berfokus antara lain pada isu-isu kebijakan publik dan ekonomi berkelanjutan ini rajin mempromosikan ekonomi restoratif. Berikut petikannya:

Anda bersemangat sekali mendorong model ekonomi restoratif.

Saya percaya pendekatan ini dapat mengatasi berbagai tantangan kualitas pertumbuhan ekonomi saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai dengan model ekonomi saat ini, misalnya 5 persen per tahun, mungkin baru membuat kita menjadi negara maju pada 2092. Sementara itu, mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti 8 persen hingga 2045, dapat mengorbankan potensi jangka panjang karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Model ekonomi restoratif menawarkan solusi dengan mengintegrasikan pemulihan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan yang koheren, seperti paket kebijakan atau bahkan undang-undang tentang ekonomi restoratif, peme-

rintah bisa mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa ekonomi restoratif menjadi fokus utama dalam perencanaan ekonomi masa depan.

Bagaimana nasib perusahaan besar yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi?

Perusahaan-perusahaan ekstraktif yang selama ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi seharusnya beralih ke model bisnis yang lebih berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan ini, yang mendapat insentif pajak besar—sekitar Rp 378 triliun per tahun—harus beradaptasi dengan ekonomi restoratif. Meskipun saat ini ekonomi restoratif masih kecil dan terfragmentasi, potensi lokal yang ada bisa digabungkan menjadi kekuatan nasional yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif tetapi juga memperkuat basis ekonomi yang berkelanjutan.

Apa yang perlu dilakukan terhadap subsidi energi fosil?

Saat ini subsidi energi fosil mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun, dan jika termasuk kompensasi, angkanya bisa mencapai Rp 250 triliun. Belanja pajak, yang totalnya Rp 378 triliun, harus diperhatikan karena itu sesungguhnya termasuk subsidi yang diberikan kepada sektor ekstraktif, seperti hilirisasi mineral dan batu bara yang memiliki dampak negatif besar. Mengalihkan subsidi ini ke sektor ekonomi restoratif, seperti UMKM yang berfokus pada produk-produk berkelanjutan, bisa mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.

Adakah dampak jangka pendek dari implementasi ekonomi restoratif?

Dalam jangka pendek, sektor ekstraktif yang berge-ser ke ekonomi restoratif mungkin mengalami gangguan, terutama terkait *reskilling* tenaga kerja. Namun, sektor ekstraktif telah memperoleh keuntungan besar, bahkan tanpa subsidi dan insentif. Perubahan kebijakan ini berpotensi menghasilkan dampak positif, terutama jika disertai dengan *roadmap* transisi yang baik. Keseimbangan pasar tenaga kerja akan terjadi karena sektor ekstraktif memiliki serapan tenaga kerja yang relatif kecil dibandingkan sektor ekonomi restoratif yang lebih padat karya.

Soal tenaga kerja, penelitian Universitas Indonesia menyebut terjadi penyusutan kelas menengah.

Penyusutan kelas menengah di Indonesia, dari 60 juta pada 2018 menjadi 53 juta pada 2023, dapat diatasi dengan sektor-sektor padat karya seperti usaha pemulihan lingkungan dan perkebunan berkelanjutan. Ekonomi restoratif yang berfokus pada pembukaan lapangan kerja di daerah-daerah bisa menekan urbanisasi dan mempromosikan kembali migrasi ke desa. Ini juga mengurangi ketergantungan pada kota-kota besar yang menjadi magnet bagi pencari kerja.

Atau diserap sektor *caring economic* dan *tourism*?

Sektor pariwisata, khususnya yang berfokus pada *experience economy*, menunjukkan potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Contohnya Gua Pindul di Yogyakarta, yang menunjukkan pariwisata yang berbasis peng-





alaman dapat menarik banyak pengunjung dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Bicara data, Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pariwisata, seperti penyedia akomodasi dan makanan, serta transportasi saja menyerap 17,1 juta orang di Indonesia, hampir 10 kali lipat dari tenaga kerja di sektor pertambangan. Dengan manajemen yang baik, pariwisata berkelanjutan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang penting.

Adakah tekanan global untuk mengubah menjadi ekonomi restoratif?

Tekanan global untuk mengubah pola pikir ekonomi Indonesia me-

Kaum wanita yang bergabung dengan Mama Bambu di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berjalan kaki keliling kebun dan hutan hingga radius tiga kilometer dari rumahnya untuk mencari bambu.

ULET IFANSASTI

nuju ekonomi restoratif semakin besar. Pemerintah harus memenuhi komitmen lingkungan di forum internasional seperti COP dan G20. Kegagalan dalam mengelola hutan, mencegah deforestasi, dan mengembangkan kawasan pesisir yang berkelanjutan akan berdampak pada hubungan internasional dan investasi di sektor yang lebih hijau. Selain itu, Indonesia perlu berhati-hati dengan produk komoditas yang diekspor, karena standar lingkungan yang buruk dapat menurunkan daya saing di pasar internasional.

Ke mana arah angin internasional untuk Indonesia dalam lima tahun ke depan?

Dalam lima tahun ke depan, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa ketergantungan pada migas semakin menurun. Sebagai *net importer* minyak dan gas, Indonesia harus mengalihkan fokusnya ke energi terbarukan. Skema seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat mendukung transisi energi hijau dengan dampak ekonomi yang signifikan, kami hitung bisa mencapai Rp 4.376 triliun dalam 10 tahun ke depan. Energi terbarukan skala komunitas dapat mendukung ekonomi restoratif dengan meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Adakah contoh kasus internasional yang bisa ditiru?

Brasil menunjukkan bagaimana ekonomi restoratif bisa sukses melalui pemulihan hutan dan pengelolaan lingkungan oleh masyarakat lokal. Dengan lebih dari

150 organisasi yang terlibat, Brasil menerapkan model yang memperkuat sistem ekonomi restoratif melalui kebijakan pemerintah dan tindakan langsung oleh komunitas. Pengalaman ini bisa menjadi inspirasi untuk Indonesia dalam mengembangkan model serupa yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Bagaimana dengan teknologi dan inovasi untuk ekonomi restoratif?

Inovasi dalam teknologi, seperti yang terlihat di Wae Sano, Flores, dapat meningkatkan kualitas hasil perkebunan dan mempromosikan ekonomi restoratif. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dapat membantu meningkatkan teknologi pembibitan dan tata kelola pasca-panen. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan paradigmatik melalui penelitian dan advokasi kebijakan yang mendukung ekonomi restoratif.

Sudah adakah indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi restoratif?

Indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi restoratif harus mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan petani, penurunan emisi karbon, dan pengurangan limbah. Indikator ini juga harus mencakup lapangan kerja yang tercipta dan keterlibatan komunitas. Meskipun mungkin perlu penyesuaian untuk konteks Indonesia, prinsip dasar dari indikator yang ada di Brasil dapat diadopsi untuk mengukur keberhasilan ekonomi restoratif di sini. •

Dandy Rafitrandi dan M. Habib Abiyan Dzakwan,
peneliti Center for Strategic and International Studies:

‘Baiknya Bisa Berubah’

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) adalah *think tank* atau wadah pemikir yang tergolong tua di Indonesia. Didirikan pada 1971, jejak dari perannya dalam pemikiran dan studi kebijakan di bidang-bidang ekonomi, politik, dan keamanan telah panjang. Merupakan konsekuensi logis bila, dalam konteks semakin pentingnya isu krisis iklim, lembaga ini juga mengarahkan perhatiannya ke sana.

Masih terhitung baru, melalui Climate Policy Unit, yang berada di bawah Departemen Ekonomi, CSIS mulai menyelenggarakan riset-riset menyangkut relasi antara ekonomi dan lingkungan, juga perubahan iklim, terutama terkait perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. “Itu salah satu visi untuk mengubah diskursus hubungan antara ekonomi dan lingkungan. Selama ini, kita melihat ekonomi dan lingkungan sebagai *trade-off*. Kini bagaimana caranya agar makin lama bukan lagi *trade-off*, melainkan bisa jalan dan tumbuh bareng-bareng,” kata Dandy Rafitrandi, peneliti di Climate Policy Unit.

Bersama M. Habib Abiyan Dzakwan, peneliti di De-

partemen Hubungan Internasional CSIS yang sempat menekuni isu krisis iklim, Dandy menjawab beberapa pertanyaan tim penulis. Petikannya:

Melihat tren pembangunan ekonomi kita, apakah kita akan begini terus, membiarkan hutan dan sumber daya alam habis atau mulai dari saat ini dengan langkah yang mempertimbangkan alternatif yang berkelanjutan?

Baiknya kita berubah. Kita sama-sama mengubah cara pandang untuk memasukkan program-program yang terkait dengan iklim.

Tapi, dalam konteks Indonesia, pemerintah punya ambisi untuk menjadi negara maju. Lini masanya, 2060 ada (komitmen) Paris Agreement, 2045 kita ingin jadi negara maju. Jadi, penting, jangan sampai kita melihat ekonomi dan lingkungan dengan cara lama, sebagai *trade-off*, kalau mau yang satu, tidak bisa mendapatkan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa memastikan keduanya jalan bareng.

Tentu saja, kita tidak bisa berubah seketika, 180 derajat; kita bisa bertransisi.

Kita harus bareng-bareng, dari organisasi masyarakat sipil, *think tank*, universitas, *venture capital* juga; yang benar-benar mengubah dari bawah. Kalau dari atas, 'kan pemerintah memberi kebijakan. Kalau dari bawah, kita bisa mendorong bareng. Saat ini momentumnya juga pas. Belum lama ada konferensi G20 (di Bali), misalnya. Sudah kelihatan bahwa Indonesia punya komitmen. Tinggal kita yang di bawah menagih, kebijakannya dan implementasinya.

Bagaimana sebenarnya tren kebijakan Indonesia terkait krisis iklim?

Ketergantungan kita terhadap industri atau sektor ekstraktif memang besar. Dan pemerintah memang melihat sektor ini sebagai salah satu cara untuk menjadikan kita sebagai negara maju.

Di satu sisi, sebetulnya ada beberapa isu iklim yang diperhatikan pemerintah karena dipandang bisa menghasilkan keuntungan. Termasuk dalam hal ini, misalnya, dari segi perdagangan karbon, yang baru saja diluncurkan, yang mempertimbangkan keluasan mangrove dan juga hutan.

Tapi, itu tadi, pemerintah belum bisa melepaskan diri dari sektor ekstraktif. Kalau kita lihat, misalnya, Proyek Strategis Nasional yang memang sedang ramai, seberapa besar *sih* sebenarnya isu lingkungan menjadi perhatian. Rasanya, hal itu juga tidak menjadi perhatian.

Paradigma yang masih berlaku di Indonesia adalah ramah lingkungan itu masih berarti tidak menimbulkan polusi, belum berarti berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

Soal kemudahan yang memungkinkan inisiatif ekonomi restoratif berjalan, apa kemungkinan yang tersedia?

Ini mungkin potensial buat inisiatif ekonomi restoratif. Ada mekanisme *debt-for-nature swap*. Jadi, misalnya, Indonesia dan Amerika Serikat pada 2090 sampai 2011, kalau tidak salah, melakukan konservasi hutan di Kalimantan dan sebagai imbalannya Amerika mengampuni utang

Paradigma yang masih berlaku di Indonesia adalah ramah lingkungan itu masih berarti tidak menimbulkan polusi, belum berarti berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

luar negeri Indonesia. Sebenarnya inisiatif ekonomi restoratif bisa masuk dari situ. Misalnya dengan melakukan sesuatu yang konkret di lapangan. Sebagai imbalannya, utang luar negeri Indonesia bisa diampuni. Mekanisme seperti ini mungkin bisa dieksplorasi.

Jadi, ketika kita melakukan lebih banyak langkah di lapangan, dan kita mengikuti standar internasional, terutama secara bilateral, mungkin itu bisa memberi keleluasaan kepada pemerintah. Misalnya, itu tadi, bisa mendapatkan ampunan utang.

Karenanya, kita tidak bisa lagi berpikir di tingkat lokal. Harus ada kesinambungan dari level internasional sampai ke lokal. Ini yang menjadikan inisiatif ekonomi restoratif lebih strategis nilai jualnya kepada pemerintah, lebih bisa didengar.

Ajakan untuk beralih ke praktik ekonomi yang restoratif ini naif atau masuk akal?

Sebutannya bisa berbeda-beda, visinya sebetulnya sama: mengubah paradigma ekonomi ke depan. Diskusinya sudah banyak. Yang kita butuhkan momentum. •

Beragam Nama, Hakikat Sama

BAHKAN sekalipun dimufakati bahwa penamaan sering dikaitkan dengan konteks dan makna tertentu, secara substansial perbedaan sebutan untuk satu hal yang sama tidak menggugurkan kutipan yang sering dirujuk ini: “Andaikan kita beri nama lain untuk mawar, ia akan tetap tercium wangi.” Kebenaran dari perkataan Juliet dalam drama *Romeo and Juliet* karya William Shakespeare ini telah teruji zaman. Begitulah pula ia berlaku untuk ekonomi restoratif, yang dalam praktik ada sejumlah nama yang disematkan padanya.

Nama yang berlainan itu tak terhindarkan karena berbeda-beda inisiatornya. Di Indonesia, sejauh ini, beberapa organisasi nonpemerintah telah sengaja memainkan peran sebagai pemrakarsa upaya mempromosikan, mengadopsi atau mengimplementasikan, dan menyebarkan ekonomi restoratif. Dan inisiatif-inisiatif itu dilakukan tidak dari angan-angan kosong.

Empat organisasi ini bisa dijadikan contoh: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

(AMAN), dan Greenpeace Indonesia. Semuanya, tanpa menyebutkan secara eksplisit, membawa semangat gerakan hijau, yang dalam ekonomi bertujuan merealisasikan pembangunan berkelanjutan tanpa mendegradasi lingkungan, menafikan hak asasi manusia, dan mengeksklusi masyarakat adat atau kelompok masyarakat yang rentan.

Walhi mendeklarasikan preferensinya terhadap ekonomi restoratif pada 2021. Kala itu organisasi nonpemerintah bidang lingkungan hidup terbesar di Indonesia ini meluncurkan Ekonomi Nusantara.

Dalam pandangan Walhi, secara konsep, Ekonomi Nusantara adalah jalan yang dapat menyelaraskan dan mengintegrasikan tujuan lingkungan dan ekonomi. Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi, konsep yang merupakan model ekonomi restoratif ini didasari keragaman praktik ekonomi masyarakat lokal yang berkaitan erat dengan bentang alam dan tradisi serta integrasi nilai ekologi, sosial, serta ekonomi.

Walhi memilih nama tersebut dengan mengingat asalnya: ekonomi yang dipraktikkan masyarakat, yang pembentukannya dilakukan dengan menyesuaikan kultur dan ekosistemnya. “Jadi,” kata Zenzi, dalam diskusi bertajuk “Bulan Peringatan Hari Bumi: Ekonomi Nusantara Solusi Pulihkan Alam Indonesia” di Jakarta pada 29 April 2024, Ekonomi Nusantara adalah “proses meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, dari proses produksi mereka, sesuai dengan lingkungan masing-masing.”

Dalam buku *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia*, yang didasari hasil penelitian sosial yang obyeknya adalah realitas ekonomi global ver-



Petani kopi binaan Java Kirana memetik kopi yang telah masak untuk diolah di kawasan Cipanas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

JAVA KIRANA

sus praktik ekonomi lokal, Walhi menggariskan keyakinan bahwa tujuan Ekonomi Nusantara bukan menumpuk uang, melainkan memastikan dipenuhinya kebutuhan pokok. Kesejahteraan, dalam konsep ini, jadi tidak dapat dimaknai dengan ukuran uang, sebagaimana lazimnya dilakukan pemerintah dari masa ke masa. Malah, sebetulnya, ukuran kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, bahkan dunia, terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu.

Sebagai identitas model operasionalnya, Walhi merumuskan empat indikator utama Ekonomi Nusantara, yang menjadi unsur definisinya. Indikator-indikator itu adalah (1) hubungan kejayaan masa lalu dengan kondisi saat ini; (2) hubungan praktik ekonomi lokal dengan lanskap ekologis di sekitarnya; (3) integrasi praktik ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan; dan (4) memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis.

Penerapan Ekonomi Nusantara memerlukan pengakuan dan perlindungan bagi apa yang disebut Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Ini adalah mekanisme pengelolaan wilayah tertentu yang integratif dan partisipatif, dalam aspek kepemilikan, konsumsi, tata kelola, maupun produksi. Dengan WKR, kedaulatan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal atas pengelolaan sumber daya alam dapat dikuatkan.

Sejak digulirkan, Ekonomi Nusantara telah diterapkan di lanskap ekologis gambut, hutan dataran tinggi, perbukitan, hutan dataran rendah, dan pesisir di Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Walhi, masih menurut Zenzi, telah mendampingi 1,3 juta lahan yang dikelola komunitas. Dari pendampingan ini, Walhi berhasil mengidentifikasi 77 jenis sumber pangan dan komoditas potensial sebagai sumber kesejahteraan komunitas, basis pembangunan ekonomi nasional, dan pangan global.

Kegiatan ekonomi di level masyarakat juga menjadi tumpuan visi ekonomi dari KPA. Yang berbeda, KPA berfokus pada satu aspek mendasar terkait dengan sumber daya alam, yakni hak atas tanah. KPA menyokong inisi-

atif dari bawah yang dinamai Desa Maju Reforma Agraria (Damara). Bagi KPA, hak atas tanah merupakan bagian dari bangunan kemandirian pangan, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta kedaulatan masyarakat atas tanah dan desanya.

Dalam pandangan organisasi yang sejak didirikan pada 1994 berjuang mewujudkan sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan alokasi sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat itu, pelaksanaan reforma agraria selama ini jauh dari harapan. Penerjemahan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan perintah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018, ini dinilai sekadar bagi-bagi sertifikat. Padahal, reforma agraria mestinya bertujuan “mendistribusikan tanah serta kekayaan agraria lainnya kepada petani penggarap dan masyarakat perdesaan yang ingin merealisasikan pembangunan wilayah mereka secara berkeadilan dan berkelanjutan”.

KPA sebenarnya telah secara bertahap, sejak 2014, mengimplementasikan gerakan Damara di setiap basis anggotanya. Dan sejauh ini praktik itu tersebar di sejumlah lokasi, seperti di Desa Secanggih, Langkat, Sumatera Utara; Desa Mekar Jaya, Indramayu, Jawa Barat; Desa Kulon Bambang, Blitar, Jawa Timur; dan Desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Melalui gerakan ini, petani ditempatkan di posisi sebagai aktor utama transformasi desa.

Melihat realisasi reforma agraria yang tak sepenuhnya menyelesaikan masalah lahan, KPA merasa perlu untuk mendorong lebih jauh penerapan Damara. Hal ini di-

tegaskan dalam Musyawarah Nasional VIII Konsorsium Pembaruan Agraria pada 2021. Berdasarkan pengalaman, Damara terbukti berhasil mentransformasikan kondisi sosial pedesaan melalui empat pilar utama: perubahan tata kuasa, tata guna, tata produksi dan pemasaran, serta tata distribusi konsumsi.

Organisasi yang lain, AMAN, menumpukan pandangannya pada hal yang berbeda: pentingnya mengakui keunggulan nyata dan unik pada sumber daya alam dan lingkungan yang umumnya menjadi tempat hidup masyarakat adat. Hal ini senantiasa luput dari pembuatan kebijakan, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dari aspek ekonomi.

Melalui sebuah studi lapangan di enam wilayah masyarakat adat pada 2018¹, AMAN mengupayakan penghitungan valuasi ekonomi, sebagai cara untuk “memvisualisasi secara kuantitatif pendekatan atau *proxy* nilai ekonomi” wilayah masyarakat adat. Penghitungan ini dilakukan setelah gambaran ekonomi di wilayah masyarakat adat diperoleh melalui diskusi informal dan formal, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Gambaran ekonomi itu terdiri atas manfaat sumber daya alam dan jasa lingkungan yang langsung dirasakan masyarakat adat sehari-hari, termasuk yang menggerakkan ekonominya. Pada yang terakhir inilah valuasi ekonomi dilakukan.

¹ Tim Pakar Ekonomi AMAN, “Menakar Keragaan Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Masyarakat Adat: Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat”, Mei 2018.

Di antara yang dapat dihimpun dari forum-forum tersebut adalah di setiap wilayah yang jadi obyek studi ada lebih dari seratus macam produk sumber daya alam dan jasa lingkungan. Untuk keperluan valuasi dilakukanlah penyortiran, mana yang dinilai paling penting dari aspek ekonomi, serta penentuan dasar perhitungan.

Melalui tahapan yang sebenarnya tergolong minimalis-konservatif semacam itu diperoleh *proxy* nilai ekonomi yang beragam di antara wilayah-wilayah masyarakat adat. Tapi, secara keseluruhan, berdasarkan komparasi, angka yang didapat sama sekali tidak remeh. Hasil valuasi menunjukkan nilai ekonomi wilayah masyarakat itu terentang dari Rp 28,92 miliar per tahun hingga Rp 41,23 miliar per tahun.

Riset mendapati, jika disandingkan dengan ukuran lain yang menjadi indikator ekonomi *mainstream*, nilai itu tergolong signifikan. Misalnya dengan produk domestik regional bruto dan upah minimum regional. Kalau kedua indikator ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyejahterakan, nilai ekonomi di hampir semua wilayah masyarakat adat tersebut telah melampaui apa yang dapat disiapkan pemerintah. Mengingat hal ini, pemerintah sebetulnya hanya perlu berfokus pada penyiapan prakondisi agar masyarakat adat dapat tumbuh dan berkembang: penyiapan infrastruktur dasar—jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Para peneliti yakin, dengan memasukkan nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal dalam pertimbangan, posisi tawar masyarakat adat masih tinggi bila dihadapkan dengan korporasi. Dan hal ini jadi lebih penting kalau pe-



Dua warga Desa Olobaru menunjukkan kemasan dodol durian hasil olah buah durian dari kebun mereka yang terdapat di hutan Desa Olobaru, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

FOREST DIGEST

merintah memang berfokus pada upaya menyejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Implikasi praktisnya: temuan dalam penelitian itu “perlu menjadi rujukan baru, bahkan pilihan ekonomi baru”.

Pentingnya mengekspos besaran nilai dari model ekonomi alternatif itu juga menjadi perhatian Greenpeace. Tapi organisasi ini memilih konsisten menggunakan istilah ekonomi hijau. Penekanannya, sebagaimana dikemukakan Tata Mutasya, Senior Campaign Strategist Greenpeace International, dalam *talkshow* Economics Care Environment (ECAN) pada 11 Mei 2024, adalah kemampuan ekonomi yang rendah karbon itu “mampu mengalokasikan sumber daya yang efisien, yang mampu menjaga kekayaan sumber daya alam dan lingkungan”; juga “inklusif secara sosial karena mengedepankan pemenuhan kebutuhan air, udara bersih, hingga akses kesehatan dan pendidikan untuk manusianya”.

Secara gamblang Tata merujuk konsep ekonomi donat yang diajukan Kate Raworth dalam bukunya, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist* (2017). Konsep ini menerapkan praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan mengedepankan kesejahteraan manusia.

Bekerja sama dengan Center for Economic and Law Studies (Celios), Greenpeace melakukan riset untuk menelaah dampak positif yang bisa didapat dari penerapan ekonomi hijau tersebut. Temuan pentingnya²: transisi ke ekonomi hijau mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antarprovinsi dalam 10 tahun implementasinya berkat pembangunan yang menyebar di daerah. Indeks

Williamson, yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan, diperkirakan dapat turun ke angka 0,65 dari semula 0,74.

Hal itu belum termasuk nilai tambahan kepada produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 2,94 triliun, atau setara 14,3 persen PDB pada 2024. Tentu saja, implikasinya adalah terbukanya lapangan kerja baru dari berbagai sektor, hingga 19,4 juta. Sektor-sektor yang berperan adalah yang terkait dengan pengembangan energi terbarukan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta jenis-jenis industri ramah lingkungan lainnya.

Yang juga diperlihatkan adalah dampak lain yang merupakan gabungan antara dampak ekonomi dan nonekonomi. Termasuk di aspek ini: berkurangnya tingkat stres generasi muda, kualitas udara yang lebih baik, beban pengeluaran kesehatan yang menurun, hingga tingkat korupsi dan ketimpangan yang berkurang.

Greenpeace (dan Celios) berharap kajiannya dapat “menjadi *raison d’etre* atas pentingnya melakukan transisi berbagai kebijakan fiskal dan moneter” untuk mendukung percepatan melepaskan diri dari ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Ini, sebenarnya, juga harapan Walhi, KPA, AMAN, dan organisasi-organisasi yang lain yang memperjuangkan transformasi ekonomi, yang berbeda ketimbang yang sekarang berlaku, meski berlainan nama. ●

² “Dampak Transisi Ekonomi Hijau terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia: Policy Brief Hasil Kerja Sama Greenpeace Indonesia dengan Center for Economics and Law Studies (Celios)”, 2023.



#2

PRAKTIK BAIK EKONOMI RESTORATIF TERSEBAR DI BERBAGAI PELOSOK INDONESIA. BERAGAM PULA WUJUD DAN VARIASI BIDANGNYA, ATAU KLUSTERNYA—KOMUNITAS, PENDEKATAN TATA RUANG, ENTITAS BISNIS, DAN LAIN-LAIN.



**Kopi robusta hasil petik
petani Mentaboh.**

BISMO AGUNG

Sinyal-sinyal Ekonomi Restoratif

KETIKA Noverian Aditya memutuskan untuk menggeluti bisnis kopi di sisi hulunya, bersama Nabila Azraini, dia memulai dengan belajar langsung dari petani. Dia mendalami tentang budidayanya, juga penanganan pascapenennya. Di perkebunan kopi di kawasan Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor, bukan saja dia untuk pertama kalinya terpaksa memegang pacul; dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa usianya kala itu, menjelang pertengahan 20-an, membuat orang meremehkannya.

“Kesan kami,” kata Noverian, alumni Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Indonesia yang memang menggemari kopi dan sempat serius mempelajari hal ihwal kopi serta menjadi barista, “kayak, ‘Oh, ternyata kami berdua sebagai anak kecil ingusan ini susah ya didengerin sama petani.”

Dia, juga Nabila, yang belajar teknologi pangan di Institut Pertanian Bogor, tak menyerah. Satu-satunya petani yang akhirnya bisa diyakinkan hendak dibantu, kala itu, dianggap cukup sebagai awal. Mereka pun jalan dengan yang sudah ada. Perlahan-lahan. Tekun.

Yang mereka mau wujudkan sejak permulaan, pada 2016 itu, adalah kemitraan yang bisa menghasilkan kopi berkualitas baik, berkelanjutan, dan menghormati asas *fair trade* melalui pembayaran yang adil, bantuan teknis, program yang transparan dan didasari rasa saling percaya, dukungan untuk aspek sosial, serta penjagaan lingkungan. Pendeknya: mereka berintensi menjalankan usaha untuk kebaikan yang lebih besar layaknya wirausahawan sosial (*social entrepreneur*), yakni menghasilkan produk yang ramah lingkungan, memberdayakan komunitas, dan menjalankan filantropi.

Model usaha seperti yang mereka terapkan melalui Java Kirana, perusahaan yang kemudian mereka dirikan, itu bukan yang pertama. Di industri kopi, terutama di sisi hilir, juga di industri-industri lain, telah bermunculan usaha serupa di berbagai daerah di Indonesia. Mereka memang belum menjadi kekuatan yang masif. Tapi jumlah mereka terus bertambah; sebagian besar di antaranya sudah sangat spesifik menggariskan tujuan kegiatan ekonomi atau bisnis yang tak semata-mata mencari profit, melainkan juga mendistribusikan kesejahteraan dan memulihkan, meregenerasi, serta menjaga lingkungan. Ekonomi yang restoratif.

Belum lama berlalu, menyongsong Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022, sebagian dari mereka secara sukarela berhimpun dalam wadah Koalisi Ekonomi Membumi (KEM). Koalisi ini dibentuk sebagai gerakan bersama, kolaborasi multipihak, untuk memajukan perkembangan produk usaha lestari dengan “mentransformasikan model bisnis ekonomi Indonesia dari

bisnis konvensional menjadi bisnis berkelanjutan”.

Ada irisan-irisan antara inisiatif asosiasi pengusaha, pemerintah, asosiasi pemerintah daerah, pelaku usaha, *ecosystem enabler*, dan berbagai jaringan lain, termasuk organisasi nonpemerintah, dalam KEM. Dengan misi mendukung target Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) serta pengurangan emisi hingga 31,89 persen (dengan usaha sendiri) dan 43,20 persen (dengan dukungan internasional) pada 2030, koalisi ini memberi titik berat pada kearifan lokal Indonesia melalui gotong royong antarsektor, antarbangsa, dan antarpemangku kepentingan terkait.

Untuk itu, kata Rifki Darmawan dari Sekretariat KEM, akan diupayakan untuk “meloloskan dana US\$ 200 juta, sebagai investasi maupun pendanaan lain, yang bisa disalurkan kepada 100 pelaku usaha lestari, yang *investable* tentu, dan terkoneksi dengan 100 yurisdiksi atau daerah yang berkomitmen lestari”. LTKL adalah asosiasi sembilan kabupaten yang bervisi pembangunan lestari; ia sejak awal aktif menginisiasi pembentukan KEM untuk memperluas adopsi nasional atas resep dan cetak biru pembangunan lestari yang diprototipekan di sembilan kabupaten LTKL.



TIDAK ada titik yang pasti pada lini masa kapan kegiatan ekonomi semacam itu mulai dilakukan di Indonesia. Tapi bisa dikatakan implementasinya berbarengan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mengenai prob-

lem kelestarian lingkungan, gerakan *zero waste*, dan meluasnya penyebaran pengetahuan tentang ekonomi sirkuler pada awal 2000-an. “Wajar, karena hal itu berhubungan dengan *survival* kita sebagai spesies, *‘kan,*” kata Rama Manusama, *co-founder* Katalys Partners, sebuah entitas bisnis yang berfokus membantu membangun dan mengembangkan bisnis baru yang bisa berdampak positif secara sosial dan lingkungan.

Pengadopsi model bisnis tersebut, umumnya, adalah perorangan; skala bisnisnya juga tidak besar, tergolong kecil atau bahkan mikro. Lokasinya tersebar. Kalaupun merupakan inisiatif perusahaan besar, aspeknya terbatas.

Perhatian di level kebijakan muncul melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Rencana ini dibuat dengan mempertimbangkan Peta Jalan SDGs di Indonesia. Peta jalan ini menetapkan target pembangunan rendah karbon pada 2030. Salah satu strategi yang ditetapkan untuk mengurangi emisi karbon adalah intervensi untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi sirkuler.

Pada 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan laporan berjudul “The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia”. Dokumen berdasarkan riset tahun sebelumnya—berkerja sama dengan United Nations Development Program dan didukung pemerintah Kerajaan Denmark—ini menghimpun data yang menggambarkan manfaat praktik bisnis yang ramah lingkungan. Manfaat-manfaat ini meliputi penghematan biaya operasional (lebih dari Rp 431,9 miliar), penciptaan lapangan kerja (14.270 orang), pengu-

rangan emisi (lebih dari 1,4 juta ton CO₂e) dan penghematan energi (lebih dari 4,8 juta MWh), penurunan konsumsi air (lebih dari 252 ribu m³), dan pengurangan sampah (lebih dari 827 ribu ton).

Pesan penting dari laporan itu dikemukakan Norimasa Shimomura, Resident Representative UNDP di Indonesia, dalam kata pengantarnya, yakni bahwa “semua pihak...memiliki tujuan yang sama: komitmen dalam menggunakan sumber daya secara efisien, dan strategi bisnis yang minim limbah dan emisi gas rumah kaca”.

Pelaku bisnis merupakan pihak yang memainkan peran signifikan dalam hal itu. Merekalah, pada awal dari, katakanlah, satu tahapan proses pengadopsian model bisnis yang “hijau”, yang membuat keputusan untuk merealisasikan rencana usaha.

Tetapi ekonomi sirkuler, yang mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, hanya satu aspek dari pandangan yang lebih maju dari praktik ekonomi yang bersifat restoratif. Aspek lain, distribusi kesejahteraan, juga mulai menjadi pertimbangan.

Alasan-alasan yang mendasari realisasi rencana untuk mengadopsi semua prinsip tersebut bisa bermacam-macam. Pendirian Javara Indigenous Indonesia, misalnya. Keberadaan perusahaan ini didasari kebutuhan untuk memberi jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi petani.

Sebagai pengacara, pada awal 2000-an, Helianti Hilman kerap menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan petani: mereka digugat, dikriminalisasi, dan lain-la-



Seorang warga membawa ikan gabus untuk dikeringkan di Desa Nanga Lauk, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

FOREST DIGEST

in. Ada satu hal yang menghubungkan berbagai kasus itu, yakni bahwa petani senantiasa disudutkan. Karena terus-menerus dalam posisi demikian, petani jadi terhambat dalam memuliakan tanah, merawat ekosistem, juga menjaga hutan di sekitar mereka.

Setelah memutuskan membantu petani bukan di “hilir”—dalam kasus hukumnya—Helianti, pada 2008, merintis upaya menyambungkan rantai pasok, dari petani ke pasar nasional dan internasional. Semula dia menggunakan payung yayasan. Rupanya, tidak ada perusahaan re-

lasi yang menganggapnya serius. “Bukankah yayasan biasanya *project-based*, kurang bisa diandalkan konsistensinya, dan tergantung pada donor? Lalu, bagaimana prospek keberlanjutan bisnisnya?” dia menirukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dihadapinya.

Maka, dia membentuk badan usaha, PT Kampung Kearifan Indonesia. Dengan perusahaan inilah penawaran Helianti dan kawan-kawan mendapat tanggapan serius.

Melalui Javara Indigeneous Indonesia, merek andalannya, PT Kampung Kearifan Indonesia berfokus pada upaya melestarikan warisan keanekaragaman pangan Indonesia. Bekerja di level rantai pasok, Javara bermitra dengan petani, peramban, nelayan, dan seniman pangan untuk menawarkan produk-produk pangan alami, organik, dan artisanal dari berbagai pelosok Indonesia.

Contoh lain yang hampir serupa adalah latar belakang pembentukan PT Alam Siak Lestari. Perusahaan yang mulai beroperasi pada 2020 ini sebenarnya tidak bermula dari niat hendak menjalankan bisnis. Keberadaannya merupakan konsekuensi dari upaya menemukan solusi demi memulihkan dan mencegah kerusakan lahan gambut di Siak, Kabupaten Riau, akibat kebakaran hutan dan lahan.

Keputusan untuk membuat entitas bisnis dibuat setelah disadari bahwa solusi yang ada adalah membudidayakan ikan gabus di lahan gambut—supaya permukaan air bisa dijaga, sehingga kondisi lahan tetap basah, dan masyarakat ikut berperan. Menurut Musrahmad Igun, Chief Executive Officer Alam Siak Lestari, solusi ini bisa diimplementasikan asalkan ada pembeli ikan yang dihasilkan dan produk turunannya. “Jadi, ada insentif bagi masyara-

kat untuk terlibat,” katanya.

Dia menjelaskan keterlibatan yang didasari aspek ekonomi itu akan memastikan bahwa, demi menghasilkan ikan yang sehat sesuai permintaan pasar, masyarakat yang bertindak sebagai nelayan akan berusaha menjaga pasokan air. Ikan yang sehat menjamin harga yang baik. Air yang terjaga akan menghindarkan kebakaran lahan.

Alam Siak Lestari, seperti halnya Java Kirana, adalah satu dari 300-an anggota KEM. Tapi tidak semua yang bernaung di bawah KEM adalah perusahaan seperti Alam Siak Lestari, Java Kirana, dan banyak anggota KEM lainnya yang berbisnis komoditas, memproduksi sendiri maupun mengolah hasil dari pihak lain. Ada, misalnya, yang berfokus menjalankan fungsi seperti Katalys Partners.

Rama Manusama mendapat gagasan untuk mendirikan Katalys Partners bersama dua teman lamanya pada saat pandemi Covid-19 berlangsung. Kala itu dia mengaku telah melalui bermacam-macam pengalaman dan ujian di sejumlah bidang yang diterjuninya sejak lulus kuliah. Keputusan untuk membikin Katalys Partners diambil setelah melihat dan menimbang pergeseran yang terjadi di bidang bisnis. Ada perubahan mendasar secara sosial, bukan melulu soal bisnis, yang didorong sistem keuangan. Hal ini sesuai dengan apa yang dia pelajari teorinya waktu kuliah. “Secara momentum, sudah mulai diadopsi,” katanya.

Karena sedang berniat menjalankan usaha sendiri, dia dan kedua temannya setuju membuat bisnis baru, hendak memanfaatkan tersedianya dana di tingkat global untuk investasi yang bertujuan menciptakan dampak posi-

tif (*impact investment*) secara sosial dan lingkungan. Menurut perkiraan Global Impact Investing Network, pada 2022, di seluruh dunia jumlah dana ini bisa mencapai US\$ 1,16 triliun.

Bersepakatlah mereka dengan pilihan nama Katalys Partners. Mereka menetapkan bidang usaha membantu perusahaan-perusahaan baru, *startup*, menghubungkannya dengan investor. Setelah menemukan satu modelnya, “Ternyata berjalan, mereka mendapatkan investor dan *sustain* secara bisnis,” kata Rama.

Dengan misi memberi bantuan pula lahir, misalnya, Gemilang (Gerak dari Mimpi untuk Lestarkan Sintang) dan Inkuri (Inkubator Usaha Lestari). Gemilang di Sintang, Kalimantan Barat, sedangkan Inkuri berpusat di Denpasar, Bali. Keduanya adalah lembaga atau platform yang memusatkan kegiatan pada pengembangan kapasitas usaha kecil dan menengah.

Gemilang dirintis sejumlah anak muda Sintang yang kerap meriung dan berbagi gagasan perihal bisnis sejak 2022, yang melihat tingginya antusiasme anak muda di sana terhadap sektor kewirausahaan. Ia, kata Restiana Purwaningrum, salah seorang pendirinya, diniatkan menjadi, “Semacam inkubator bisnis berkelanjutan.”

Sementara Gemilang masih belajar, Inkuri, yang merupakan platform dari Pratisara Bumi Foundation, malah sudah membantu menghadirkan beberapa usaha kreatif yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan misinya untuk mengubah pola pikir umum tentang ekonomi “ambil-pakai-buang” dan prinsip mencari profit sebanyak-banyaknya. Bisnis-bisnis itu, menurut Saney Amalia Priscila, Ke-

tua Pratisara Bumi Foundation, “menyeimbangkan aspek lingkungan dan sosial sebagai alas keberlanjutan”.



DI Desa Serambut dan Desa Cemeti di zona penyangga bentangan hutan dan lahan gambut—suatu kawasan konservasi—seluas 157.875 hektare, sebuah riset dilaksanakan pada 2023. Didukung PT Rimba Makmur Utama, pengelola hutan dan lahan gambut di area antara Sungai Katingan dan Sungai Mentaya, Kalimantan Tengah, itu, riset ini secara spesifik mengkaji kelayakan menjalankan bisnis semacam yang digeluti anggota KEM di suatu area khusus, memulainya secara terencana dan dalam skala yang dampaknya bisa terasa.

Bisnis yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam—kelapa, ikan gabus, rotan, sengon, dan lanskap alam—itu dinilai perlu untuk membantu mendorong perubahan pola pikir fundamental dalam kegiatan ekonomi, dari yang mengutamakan industri ekstraktif ke usaha-usaha mencapai kemajuan yang bersifat regeneratif dan restoratif. Ini demi pencapaian target Indonesia yang dijanjikan dalam Perjanjian Paris. Area yang direncanakan untuk hal itu dinamai Kawasan Industri Ekonomi Restoratif Serambut-Setiroek.

Bagi RMU, substansi dari hal-hal yang dikaji dalam studi itu juga merupakan bagian dari upayanya menjalankan konservasi hutan dan lahan gambut yang ada dalam konsesinya. Prinsipnya, “Kita bikin orang sibuk di luar kawasan konservasi,” kata Rezal Kusumaatmadja, *co-founder* dan Chief Operating Officer Rimba Makmur Utama.



Biji kopi robusta hasil perkebunan yang dikelola warga Desa Mentabah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dipasarkan secara lokal oleh masyarakat ke pasar yang ada di kawasan itu.

FOREST DIGEST

“Kalau orang sibuk di luar, ‘kan tidak mungkin orang ke hutan untuk cari makan.”

Dalam riset ada tiga aspek yang dikaji, yaitu kelembagaan, kelayakan lahan, serta komoditas dan produk turunan. Yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan kegiatan ekonomi yang bersifat regeneratif dan restoratif adalah prinsip-prinsip yang dikembangkan John Fullerton (2015), parameter dari Per Espen Stoknes (2021), dan konsep ekonomi donat (*doughnut economics*) dari Kate Raworth (2017).

Pengukuran berdasarkan parameter dari Stoknes, menyangkut modal produktif, modal alam (tanah dan sumber daya), dan modal sosial, serta model dari Raworth dipandang penting. Di dalamnya ada konsep tentang ruang yang aman (*safe operating space*) bagi kegiatan manusia tanpa merusak lingkungan. Dari sinilah bisa ditentukan batas aman dari kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dua yang dijadikan ukuran: *carbon productivity* (CAPRO), yakni nisbah dari nilai tambah terhadap emisi CO₂; dan *social productivity* (SOPRO), perbandingan antara nilai tambah dan rasio Palma. Agar tujuan ekonomi restoratif tercapai, ikut membantu merealisasikan target Paris Agreement pada 2050, kedua parameter ini harus bernilai di atas 5 persen.

“CAPRO-nya itu, kalau mau makin gede nilai ekonominya, emisi karbonnya harus kecil, bahkan minus, bahkan menyerap karbon. Kalau sosialnya mau skornya bagus, Palma *ratio*-nya harus bagus, 1 banding 1,” kata Muhammad Syiraz, Chief Executive Swadaya.id, sebuah platform gotong royong pendanaan bagi bisnis yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan.

Rasio Palma merupakan alternatif dari rasio Gini untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Angka rasio Palma didapat dari nisbah antara bagian pendapatan yang bisa dibelanjakan yang diterima 10 persen kelompok berpenghasilan tertinggi dan bagian dari total pendapatan yang bisa dibelanjakan yang diterima 40 persen kelompok berpenghasilan terendah.

Kajian dalam riset itu sangat komprehensif. Semua kepentingan yang berkaitan dengan pembuatan kawasan



industri, termasuk keberadaan modal sosial Rimba Makmur Utama, diperhitungkan; sumber daya alam setempat yang bernilai ekonomi ditelaah; semua aspek digali, dinilai, dan dicarikan solusinya jika ada faktor yang dipandang bermasalah. Ada pula peta jalan untuk implementasinya.

Kesimpulan dari riset tersebut: kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi, layak, melalui perencanaan dan sejumlah intervensi, yang telah direkomendasikan dalam laporan riset. Dan, sebagai kelanjutannya, implementasi



Perkebunan sayur dan buah-buahan di Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang menjadi menyuplai bahan untuk restoran.

OKA HAMIED

dari rencana kawasan industri itu telah mulai dilaksanakan. Masih perlu waktu untuk mencapai tujuannya. Tapi, seperti kata Rezal, “Kalau ini tidak dilakukan, kita dosa.”

Inisiatif seperti yang sedang diawali realisasinya di area penyangga kawasan hutan dan lahan gambut di bawah Rimba Makmur Utama itu bukan saja bakal melengkapi apa yang dilakukan Noverian, Musrahmad, Helianti, dan lain-lain; ia berpeluang mengeskalasi laju pengadopsian ekonomi restoratif—melalui pembelajaran, edukasi, pemberdayaan, dan kebijakan. •

Biru Ekonomi di Laut

KALA itu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berlalu. Dalam suasana mengantisipasi kondisi “normal” pascapagebluk, sebuah buku yang diharapkan dapat memacu pendekatan yang segar dalam upaya mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang dianggap perlu demi pemulihan dan transformasi ekonomi, diluncurkan pada 25 November 2021. Berjudul *Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation*, buku yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) itu diasakan menjadi “acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif”.

Ada hal-hal penting ini dalam pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara Pekan Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia itu: ekonomi biru, mesin pertumbuhan ekonomi, dan berkelanjutan serta inklusif.

Ekonomi biru yang dimaksud terkait dengan “potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan” yang terdapat di laut dan fakta bahwa Indonesia “merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara berupa laut”. Ekonomi ini disebut meliputi bermacam-macam sektor, termasuk perikanan, industri pengolahan produk-produk laut, logistik kelautan, turisme laut, bioteknologi, energi terbarukan, dan lain-lain.

Dalam dokumen yang diterbitkan Bank Dunia¹ disebutkan bahwa ekonomi biru adalah konsep yang mengupayakan pertumbuhan ekonomi, pelibatan sosial, pelestarian dan perbaikan kehidupan seraya, pada saat yang sama, memastikan keberlanjutan lingkungan laut dan area pantai. Poin mendasarnya, dan yang terpenting, adalah berkelanjutan. Tapi International Union for Conservation of Nature mengajukan ide yang lebih saksama: ekonomi biru regeneratif, yang menekankan perlunya inklusivitas, keadilan, dan berdasarkan partisipasi, transpa-

¹ World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017, *The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*, World Bank, Washington, D.C.

Nelayan di Anambas membawa hasil tangkapan setelah melaut semalaman di Tarempa, Kepulauan Riau.

BISMO AGUNG



ransi, serta model pemerintahan inklusif di semua level.

Fakta bahwa laut menyimpan potensi ekonomi yang berlimpah ruah telah dielaborasi ilmuwan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam buku berjudul *Sains untuk Biodiversitas Indonesia*, yang terbit pada 2019. Tim penulis buku ini bahkan merekomendasikannya menjadi satu bagian dari kerangka pemanfaatan keanekaragaman hayati seraya menjalankan prinsip-prinsip regenerasi. Secara khusus mereka juga memberi porsi tekanan pada laut dalam karena 90 persen laut Indonesia masuk dalam kategori ini.

Dalam rancangan pemerintah, pertumbuhan masih dijadikan sasaran. Istilah yang digunakan bahkan menggunakan kata “mesin”. Hal ini mestilah mengundang semacam *caveat*, peringatan: kalau ia tetap disandarkan pada keyakinan bahwa ada efek *trickle down* atau menetes ke bawah yang bekerja, seperti yang menjadi fokus para pengkritiknya pada 1980-an, kita sudah harus sejak awal mengantisipasi dampak negatif serupa dengan yang telah kita alami sejauh ini.

Masih terbuka kesempatan untuk memastikan bukan hal itu yang bakal terjadi. •

Di Katingan, Membuhul Imajinasi

*“Imajinasi. Itu bekal utama kami,”
kata Rezal Kusumaatmadja.*

DI area seluas 157.875 ribu hektare di Katingan, Kalimantan Tengah, imajinasi Rezal mendarat dan tumbuh subur. Katingan Mentaya Project (KMP), kawasan konsesi konservasi yang dicitakan mewakili paradigma ekonomi restoratif; menjaga alam, memulihkan ekosistem, dan sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Mengapa ekonomi restoratif? “Karena *sustainability* atau keberlanjutan saja tak lagi cukup.”

Sustainability, jargon utama pembangunan di seluruh dunia, pertama kali muncul di tengah Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Stockholm 1972. Namun, pada kenyataannya, ia berhenti pada jargon kosong. Daya dukung ling-

kungan merosot, sumber daya alam terus mengalami kerusakan, atas nama *sustainability*. “Kita perlu pendekatan yang lebih berani, yakni ekonomi yang memulihkan, ekonomi restoratif,” kata Rezal, putra almarhum Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja.

Persoalannya, ekonomi restoratif kerap dianggap sporadis dan anekdotal. Para ekonom susah menerima ada alternatif ekonomi di luar pakem konvensional. “Di titik inilah kita perlu menyuburkan imajinasi dan inspirasi, bahwa ekonomi restoratif itu bisa dan harus dilakukan,” kata Rezal.

Land Dictates the Rules, Gambut Punya Aturan

Awal tahun 2000-an, topik REDD (*Reducing Emission from Forest Deforestation and Degradation*) mengemuka. Konsep inilah yang kemudian memunculkan skema perdagangan karbon. Secara sederhana, perdagangan karbon adalah mekanisme insentif dan disinsentif finansial demi menekan deforestasi --disinsentif bagi korporasi, industri, para pelaku produsen emisi raksasa dan insentif buat upaya menjaga mengurangi emisi dengan cara melindungi hutan.

Pro-kontra memenuhi udara. Kontroversi berlanjut, bahkan hingga kini, terutama karena dua hal. Pertama, bagaimana memastikan integritas pengukuran emisi karbon dan, ke dua, bagaimana memastikan IPLC (*indigenous peoples and local community*) mendapat manfaat signifikan.

Pada 2007, di tengah perhelatan UNFCCC di Denpasar, Bali, Rezal menulis sebuah kolom di *The Jakarta Post*.

Rezal mengkritik begitu banyak janji berkilau dalam skema karbon, tapi tak ada yang membahas *safeguarding* IPLC dan bagaimana masyarakat lokal mendapat manfaat riil. Padahal, dalam urusan yang terkait lahan, “*Land dictates the rules*”. Adalah tanah, lahan, dan hutan yang menentukan aturan main. Manusia tidak bisa semauanya menerapkan skema apa pun tanpa respek pada lahan dan hutan.

Respek pada lahan juga bermakna bahwa skema karbon harus melindungi dan memberi manfaat utama pada masyarakat. Karena, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itulah yang sejatinya menjadi penjaga hutan. “Manfaat dalam arti luas, kualitas air bersih meningkat, bahan pangan tersedia, orang-orang sehat, dan usaha kecil milik masyarakat bisa berjalan,” katanya. “Bahkan, pembicaraan tentang perdagangan karbon tidak relevan sebelum upaya restorasi alam dan manfaat bagi masyarakat diupayakan.”

Imajinasi ini ditawarkan Rezal kepada Dharsono Har-tono, teman kuliahnya di Cornell University, Amerika Serikat. Mereka berdua sepakat mendirikan PT Rimba Makmur Utama (RMU), yang berfokus pada pengelolaan kawasan konservasi secara komprehensif.

“Sebetulnya ini tawaran gila,” kata Rezal. Para pengusaha lazim memilih berbisnis yang relatif lebih mudah dan untung cepat: sawit. Tahapan bisnisnya: buka lahan, babat pohon, angkut dan jual kayunya, lalu tanam sawit, tak peduli ekseksnya hewan-hewan terusir. Sementara itu, mengelola kawasan konservasi berarti wajib memperbaiki hutan, merestorasi ekosistem supaya beraneka binatang

betah, mencegah kebakaran, dan menjamin tak ada kebo-
coran emisi karbon lantaran deforestasi atau karhutla.

“Saya bilang ke Dharsono, kalau mau jadi kucing di te-
ngah persaingan kebun sawit, ya silakan. Tapi, kalau mau
jadi singa pionir kawasan konservasi, ayo,” kata Rezal.
Dharsono menyambut tawaran Rezal.

Pada 2008, RMU mengajukan izin konservasi seluas
200 ribu hektare di hutan rawa gambut yang diapit dua
sungai: Katingan dan Mentaya. Tantangan menghadang.
Izin kawasan tak kunjung didapat. “Kami hitung, paling
tidak ada 300 meja perizinan yang harus kami datangi.
Paling lama, mandek di meja Pak Menteri,” kata Rezal.

September 2013, Harrison Ford berkunjung, dalam
proses pembuatan film dokumenter *Years of Living Da-
ngerously*. Dalam film tersebut, Ford bertanya kepada
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, kenapa izin konsesi
penyelamatan gambut RMU tak kunjung diteken. Tuan
Ford mendamprat Menteri Zulkifli Hasan yang terkesan
mencari permakluman atas deforestasi yang marak terja-
di di berbagai wilayah Indonesia. Adegan dialog Ford dan
Zulkifli Hasan ini merebut perhatian media nasional dan
global.

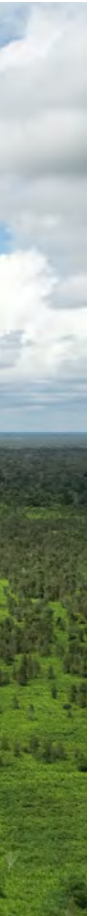
Tak lama sesudah film Ford beredar, Oktober 2013,
Menteri Zulkifli resmi menerbitkan izin konsesi kepada
RMU seluas 108.225 hektare.

Tiga tahun kemudian, 2016, Menteri Kehutanan dan
Lingkungan Hidup Siti Nurbaya memberikan izin tahap
ke dua, seluas 49.497 hektare. Total, saat ini konsesi RMU
seluas 157.875 hektare di hutan rawa gambut Kalimantan
Tengah, setara dua kali luas Singapura.



Kawasan hutan di Katingan, Kalimantan Tengah.

RMU



Pada 2023, KMP terpilih sebagai satu dari enam “Lighthouse”, cahaya bagi potensi investasi berbasis alam di seluruh dunia, yang diberikan oleh Nature Climate Solution Alliance (NCSA) dan World Economic Forum (WEF). “Saya akui, KMP adalah *benchmark* praktik konsesi konservasi, tidak hanya nasional tetapi juga secara global,” kata Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari, yang paham lika-liku konsesi konservasi.

Tak sedikit pemegang konsesi karbon berlagak seperti koboi ugall-ugallan, yang menjalankan konsesi konservasi tak ubahnya seperti industri ekstraktif, hanya menghisap potensi alam. “Mereka nggak peduli kredibilitas dan integritas pengukuran stok karbon, apalagi hak masyarakat adat,” kata Monica. “Yang penting buat mereka adalah untung besar atas nama perubahan iklim.”

Lantas, bagaimana pengelolaan kawasan konsesi konservasi ala KMP? Berikut laporan perjalanan Mardiyah Chamim ke Katingan.

Katingan, Sang Sungai Purba

Awal Juli 2024, bersama rombongan “Friends of RMU”, saya berkesempatan berkunjung ke Katingan Mentaya Project. Rombongan kami cukup beragam, ada antropolog, ekonom, bankir, akademisi, jurnalis, dan praktisi komunikasi. Lima hari kami menjelajah sebagian area Katingan Mentaya Project.

Katingan atau Mendawai, sungai purba yang membawa imajinasi terbang jauh. Ada rasa *surreal*, campuran antara nyata dan fantasi, saat menyusurnya. Sungai Katingan membentang lebar 200 meter dan panjang 616 ki-

lometer, di masa lampau adalah jalur utama antar-kerajaan besar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, juga dari Cina. Sungai yang gagah dan menyimpan miliaran cerita.

Dari Pangkalan Bun, kota terdekat, empat jam kami menumpang mobil menuju pelabuhan kecil. Tak ada jalan darat dari pelabuhan ini menuju lokasi KMP. Satu-satunya jalan adalah berperahu.

Butuh 1,5 jam perjalanan berperahu kelotok yang berkapasitas 20-30 orang. Kami berpindah ke “ces” atau perahu kecil berkapasitas 2-4 orang, mengarungi anak-anak sungai yang lebih sempit. Dinamai ces, mungkin, karena motor perahunya berbunyi *cessss* tiap kali dinyalakan.

Transportasi air belum dikelola efektif di sini. Biaya hidup pun jadi mahal. Sebungkus mi instan, misalnya, berharga Rp 20 ribu, tiga atau empat kali lipat harga di kota.

Hidup yang bertumpu pada perairan memiliki tantangan tersendiri. Ke sekolah, ke kantor, ke pasar, atau ke desa sebelah, semua harus ditempuh dengan berperahu. Riri Royanto, antropolog dari Universitas Indonesia yang juga anggota rombongan, mengisahkan pengalamannya menyusuri desa-desa di Katingan. “Pas perahu mau berangkat, selalu ada warga yang nitip sesuatu buat disampaikan ke kerabatnya di desa lain,” kata Riri. “Tolong, antarkan obat ini ke Pak Fulan, atau titip bingkisan ini buat Ibu Ani, di desa sebelah.”

Saat musim banjir, misalnya, air sungai meluap dan menghempas masuk rumah-rumah penduduk. Tak tanggung-tanggung, banjir bisa berlangsung berbilang minggu, bahkan sampai dua atau tiga bulan.

Menyusuri Sungai Katingan, kami menjadi saksi ke-

timbangan yang begitu nyata di negeri ini. Pada satu bagian sungai, entah berapa ratus ribu atau juta balok kayu dari perusahaan hutan tanaman industri yang terapung, menunggu diangkut kapal besar. Sungai perkasa ini juga menjadi lintasan tongkang berisi batu bara, atau tandan buah sawit. Penduduk di desa-desa di tepian rawa gambut, menyaksikan kekayaan bumi Kalimantan diangkut ke kota besar, sambil kaki mereka kedinginan direndam banjir di rumah panggung.

Di tengah hutan rawa gambut inilah Katingan Mentaya Project berada. Kembali pada prinsip *land dictates the rules*, fungsi dan aktivitas di KMP bersandar pada satu hal: hutan rawa gambut yang pegang aturan main.

Bukan Sekadar Penyangga

Ada tiga fungsi utama kawasan konservasi. *Pertama*, menjaga dan memulihkan ekosistem hutan, yang di dalamnya termasuk restorasi hutan, menjaga permukaan air gambut, dan mencegah karhutla. *Kedua*, menjaga keanekaragaman hayati atau *biodiversity*. *Ketiga*, fungsi sosial-ekonomi, bagaimana kawasan ini memberi *benefit* pada masyarakat sekitar.

Katingan Mentaya membangun fondasi awal dengan intensif melakukan pendampingan masyarakat. Sesuai visi Rezal sejak awal, desa-desa inilah yang menjadi fokus perhatian utama, “Warga desa di sekitar harus mendapat manfaat utama dari keberadaan Katingan Mentaya Project.”

Maka diterjunkanlah orang-orang muda dari Yayasan Puter, Bogor, sebagai pendamping lapangan. Mereka

tinggal bersama penduduk. “*Ngopi*, makan, ngobrol, diskusi, begadang, semuanya bareng masyarakat,” kata Ali Mosbeh, pendamping lapangan di Desa Satiruk. “Orang-orang yang menolak kehadiran RMU, kami ajak bicara dan mencari titik temu.”

Bersama masyarakat, para pendamping melakukan pemetaan partisipatif, menelusuri batas-batas desa, sekaligus bersama memahami problem dan potensi desa. “Tim RMU juga membantu kami memahami persoalan kesehatan masyarakat,” kata Milena Amalia, warga Desa Cempaga.

Sanitasi, persoalan higiene, akses air bersih, kampanye hidup sehat, adalah serial program RMU bersama Desa Cempaga. Sebetulnya, menurut Milena, banyak proyek pengadaan fasilitas kesehatan masyarakat di desa-desa di Katingan. Pengadaan pompa air bersih, misalnya, berkali-kali digelar baik oleh swasta atau pemerintah. “Tapi, setelah bikin proyek, ditinggal begitu saja. Tidak ada pendampingan, tidak ada kampanye untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat,” kata Milena. “Akibatnya, banyak proyek mangkrak, *deh*.”

Nah, bersama tim RMU, warga desa bergerak bersama-sama, mengubah budaya dan perilaku yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. “Tak bisa buru-buru, perubahan perilaku, tentu jangka panjang,” kata Milena.

Sebagai *buffer zone*, Desa Cempaga, dan 34 desa lainnya menjadi kunci kesuksesan konservasi KMP. Warga desa yang aktif menjaga hutan, tidak berburu, tidak membuka lahan dengan membakar, adalah syarat sukses bagi



Seekor benkantan (*Nasalis larvatus*) hidup di kawasan Hutan Katingan, Kalimantan Tengah.

RMU

seluruh upaya konservasi di Katingan Mentaya.

“Awalnya, penduduk rame-rame menuntut lahan milik mereka dibeli RMU,” kata Yusef Fabianus, pendamping lapangan. Alih-alih membeli, RMU menawarkan skema kerja sama. Masyarakat tetap memiliki lahan dan memastikan pohon-pohon di dalamnya hidup sentosa. “Setiap pohon yang hidup kami beri kompensasi Rp 5.000

per tahun; tiap KK biasanya punya dua hektare lahan dan per hektare bisa berisi 400 pohon,” kata Yusef.

Sampai kini, sudah ada 260 KK yang bergabung dalam kerja sama ini, dengan total luas lahan 554 hektare. “Masyarakat terlibat aktif, saling jaga, dan saling mengecek pohon-pohon mereka,” kata Yusef. Ladang yang tadinya *dicuekin*, sekarang menjadi terawat dan produktif.

Di Desa Teplag, RMU mengembangkan demplot percontohan pertanian tanpa bakar dan tanpa bahan kimia. Aneka sayur, tanaman herba, pohon mangga, durian, kayu putih, juga tanaman kayu keras ditanam berselang-seling dengan model agroforestri. Rimpang jahe adalah salah satu komoditas yang banyak diminati penduduk, karena RMU membantu memasarkan ke PT Jamu Sidomuncul. “Kemarin ada penduduk yang panen jahe senilai Rp 90 juta,” kata Lerry Robert, yang mengelola Demplot Percontohan Teplag.

Demplot percontohan ini penting sebagai pemantik imajinasi. Bahwa bukan hanya sawit yang bisa ditanam dan menghasilkan uang. Agroforestri bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan, panen silih berganti.

Pendampingan masyarakat di berbagai lapis persoalan, kesehatan, pencegahan karhutla, pertanian, juga pendidikan, menjadi resep utama RMU. Aspek pendampingan ini membutuhkan kerja keras dan, terutama, waktu. Seiring dengan menguatnya fondasi, manfaat bagi warga mulai tampak, kepercayaan masyarakat teraih, maka berbagai program di KMP pun berjalan lancar.

Gambut, Harta Karun Itu

Di Katingan, gambut adalah lakon utama dalam hal mitigasi perubahan iklim. Dialah harta karun sesungguhnya.

Taryono Darusman, General Field Manager RMU, menjelaskan mengapa gambut adalah harta karun dalam lensa mitigasi perubahan iklim. Dialah “superman” dengan kemampuan super menyerap karbon. Lahan gambut menyimpan karbon 20 kali lipat dibanding lahan non-gambut. Layak kita catat, hanya tiga persen lahan di seluruh dunia yang ditutupi gambut; dan Indonesia beruntung memiliki 13,43 juta hektare lahan gambut yang menyimpan 57 juta gigaton karbon—setara 30 persen karbon di seluruh dunia.

Secara spesifik, Taryono menjelaskan, konsesi Katingan Mentaya Project, memiliki cadangan karbon total 560 juta ton. Sebagian besar, yakni 546 juta ton (97,5 persen), tersimpan di lahan gambut (*below ground*). Sisanya, 14 juta ton, tersimpan di dalam pepohonan yang tumbuh di atas gambut (*above ground*). “Begitu dahsyat kekuatan gambut dalam menyimpan cadangan karbon,” kata Taryono.

Respek pada gambut sebagai lakon utama tampak nyata di KMP. Begitu mendarat dari perahu klotok, pengunjung tidak boleh seenaknya menginjak tanah gambut. Sifat tanah gambut yang *porous* atau berongga karena tersusun dari serasah daun dan ranting, bakal kempes jika terlalu sering diinjak. Jika sudah kempes, mampat, dan pori-pori lenyap, maka gambut tak bisa lagi menjalankan fungsi menyimpan air dan menjaga siklus hidrologi.

Sebagai solusi, KMP kemudian membuat jembatan atau titian kayu sebagai pijakan. Titian itu mengitari seluruh kompleks Pos Sentral KMP, bercabang dan berliku mengitari hutan di sekitar kompleks Pos Sentral. Total sepanjang tiga kilometer.

Aryo Witono, Manajer Hidrologi dan Gambut, mengajak kami mengenal lebih dekat apa itu gambut. Kami berjalan menuju titik pengukuran kedalaman gambut.

Bersama tim, Aryo mengukur kedalaman dengan memasukkan bilah pipa dan pisau baja ke dalam lahan gambut. Setiap bilah pipa mewakili satu meter. Jika mata pisau belum menumbuk batu mineral yang keras, maka bilah pipa ditambah lagi, dan ditambah lagi. Begitu seterusnya.

Sepuluh menit berlalu, mata pisau baja menyentuh batu. “Nah, mari kita ukur,” kata Aryo, “Mata pisau ini berhenti di titik 3.840 mm.” Riset menunjukkan setiap tahun gambut bertambah tebal satu milimeter. Artinya, gambut di titik ini berusia 3.480 tahun. Di Katingan, berdasarkan uji karbon, gambut tertua di sini berusia 17 ribu tahun. Belasan ribu tahun memori kehidupan hutan tersimpan di dalamnya.

Peran gambut amat krusial bagi keberlangsungan ekosistem hutan. Air gambut yang coklat kemerahan sungguh kaya bahan organik, akumulasi endapan serasah daun, ranting, dan jasad berbagai makhluk selama ribuan tahun. Ekosistem inilah yang menghidupi rantai makanan mulai dari mikroba, alga, lumut, ikan, reptil, hidup sentosa, begitu juga burung, mamalia, hingga manusia.

Gambut berperan menjaga keseimbangan siklus hidro-

logi. Jika gambut rusak, tak ada yang menyimpan cadangan air, sungai dan mata air pun kering. Akibat selanjutnya, makhluk hidup tak lagi betah, perlahan menyingkir atau mati.

Begitu signifikan peran gambut, sehingga penyelamatan lahan gambut adalah resep kunci dalam mitigasi perubahan iklim. KMP mengerahkan banyak sumber daya untuk merestorasi harta karun ini. Ratusan anak sungai gambut dipelajari, diukur, dan diperbaiki. Jalur yang tak banyak dilewati dibikin lebih sempit dan diperdalam, supaya debit air kian bertambah. Jalur yang digunakan buat kayu *illegal logging* ditutup. “Semua proses melibatkan warga, nggak bisa kita sendiri bergerak,” kata Aryo. Sampai kini, ada 93 anak sungai gambut yang sudah diperdalam.

Sumber daya, manusia, dan juga peralatan, dikerahkan untuk pencegahan kebakaran. “Taruhannya memang di pencegahan. Kalau sudah terbakar, apalagi api sudah membesar, bisa dibilang sudah terlambat,” kata Taryono. Praktis, enam bulan dalam setahun, seluruh Tim RMU dalam kondisi siaga mengantisipasi kebakaran.

Rombongan kami menyaksikan kesiagaan Tim RMU mencegah kebakaran. Perangkat pemadaman api dipasang di sepanjang puluhan kilometer di sekeliling area konsesi KMP. Total ada 383 sumur bor dan 178 embung (sumur gali) di perbatasan kawasan konsesi dengan lahan milik masyarakat. Ada ratusan unit embung portabel dari terpal yang siap dipasang dalam tempo satu jam.

Tiga menara pandang setinggi 15 meter berdiri di kawasan konsesi. “Saat musim rawan kebakaran, tim kami

Proses pengenalan lahan gambut dengan mengukur kedalamannya di kawasan hutan konservasi Katingan, Kalimantan Tengah.

RMU



bergantian memantau api,” kata Ali Mosbeh, staf RMU yang bertugas sebagai pendamping di Desa Satiruk, salah satu desa di sekeliling konsesi KMP. “Harus rajin naik menara, karena citra satelit biasanya ada *delay*, pas muncul di satelit api sudah besar.”

Staf RMU secara intensif bergerak bersama masyarakat peduli api. Mereka berlatih memadamkan api, mengecek semua sumur pompa bor, embung, selang air, semua berfungsi dan siap digunakan. Sepatu, helm, pakaian an-



tiapi, semua harus *stand by*. “Semua logistik harus siap,” kata Ali.

Macan Dahan, Pangolin, dan Gemor

Suatu pagi, Rezal Kusumaatmadja menjelajah hutan. Di atas titian kayu, matanya bersirobok dengan seekor macan dahan atau *borneo clouded leopard* (*Neofelis diardi borneensis*). Raja Hutan Kalimantan ini berdiri tenang, seolah berpose. Klik, usai difoto, sang macan berla-

ri masuk hutan. “Ini binatang yang dianggap hampir punah. Jadi, kemunculannya di sini sungguh kejutan menyenangkan,” kata Rezal.

Si macan dahan tak hanya dilihat Rezal. *Camera trap* juga menangkap gerak sang macan; juga ratusan jenis beraneka binatang yang berseliweran di hutan Katingan. “Ada 400 *camera trap* yang kami ipasang di seluruh kawasan,” kata Meyner Nusalawo alias Opo, yang bertugas memantau *biodiversity* di KMP.

Saban hari, tim *biodiversity* bergantian secara rutin berkeliling area KMP, memasang kamera, mengunduh foto-foto yang terekam, mengganti baterai, lalu menganalisis data dan foto yang terkumpul. Sebuah pekerjaan besar dan menuntut ketekunan ekstra. Hasil pendataan tim, tercatat ada 255 spesies burung, 70 spesies mamalia, 167 spesies ikan, 78 spesies reptil, dan 211 jenis tanaman di Katingan Mentaya Project. Keberadaan berbagai spesies ini mewakili lebih dari 5 persen populasi global, yang membuktikan bahwa kawasan ini memiliki nilai konservasi yang tinggi (*high value conservation assessment, HVC*).

Keanekaragaman hayati di hutan Kalimantan memang dahsyat. Di sini ada lutung berhidung merah, orang utan, bekantan, tarsius, makaka, pangolin, landak, puluhan jenis reptil, serangga, juga beraneka burung yang menjadi impian para *birdwatcher* sedunia. “Di sini ada berbagai jenis burung rangkong atau *hornbill*. Mereka ini kami sebut sebagai *farmer bird*, karena menyebarkan biji-bijian ke seluruh hutan,” kata Opo.

Kami lantas berbincang dengan Suryadi, mantan pem-

buru yang kini menjadi staf RMU. Ia mengisahkan pengalamannya berburu trenggiling atau pangolin (*Pholidota sp.*), hewan buruan favorit di hutan Katingan. “Kami berburu ditemani anjing. Gonggongan anjing itu beda kalau dia ketemu trenggiling,” kata Suryadi. Seekor trenggiling, biasanya 12 kilo, dijual ke penadah seharga Rp 300-400 kilo per kilogram. Sisiknya dijual Rp 500 ribu per kilogram.

Hari-hari berburu sudah menjadi masa lalu bagi Suryadi. Kini, dia menjadi bagian dari RMU, yang memantau dan mengkampanyekan kepada warga sekitar supaya jangan lagi berburu. “Sekarang hutan sudah bagus, banyak manfaat bagi kita,” katanya. Ikan di perairan lebih banyak, begitu pula udang dan kepiting yang dibawa ke dapur atau dijual ke pasar.

RMU juga membuat sentra pembibitan tanaman lokal, seperti pulai, jelutung (*Dyera lowii*), ramin (*Gonystylus bancalus*), dan berbagai jenis meranti (*Shorea sp.*). “Kami juga melakukan pembibitan pohon gemor. Penduduk banyak yang ke hutan mencari pohon ini,” kata Meyner Nusalawa. Pohon gemor ini salah satu potensi hasil hutan bukan kayu yang bisa dikembangkan di kawasan Katingan.

Kulit pohon gemor (*Nothaphoebe coriacea*) dikenal bermanfaat sebagai bahan obat-obatan herbal, untuk meningkatkan daya tahan, pereda radang, juga untuk detoksifikasi. Satu kilogram kulit pohon gemor bisa dijual Rp 10-15 ribu per kilo, dan bisa mencapai Rp 50 ribu per kilo dalam bentuk bubuk. Sayangnya, keberadaan pohon ini semakin sedikit. “Penduduk senang bisa ambil bibit pohon di sini dan menanam di ladang mereka,” kata Meyner Nu-

sawala.

Tim Pembibitan RMU rata-rata menghasilkan 80 ribu bibit pohon per tahun, yang dibagi ke penduduk dan ditanam di area hutan yang terdegradasi. Total, ada 1.000 hektare area hutan yang rusak berat telah ditanami; dan 62 ribu hektare hutan rusak ringan yang telah dipulihkan dengan suksesi alami. “Suksesi alami artinya kami cuma menambahkan pupuk kompos, yang kaya mikroba. Tanah akan kembali subur dan pohon-pohon tumbuh alami,” kata Meyner.

Data, Pelantang Suara

Hutan, perairan rawa gambut, keanekaragaman hayati, tak mungkin berbicara kepada dunia tanpa data. Katingan Mentaya Project memahami hal itu. Pengumpulan data, pengukuran berbagai parameter, sangat penting untuk membuktikan kesaktian ekosistem hutan dan gambut dalam pengendalian perubahan iklim. “Kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan asumsi dan data sekunder,” kata Taryono Darusman.

Integritas data ini pula yang membuat nilai KMP dalam bursa perdagangan karbon bisa tegak di atas standar yang ditetapkan pemerintah, yakni US\$ 5 per ton. Namun, memang, mengumpulkan data primer adalah sebuah pekerjaan gigantis yang menuntut stamina dan ketekunan.

Untuk memantau perkembangan biodiversitas, misalnya, RMU menerjunkan satu tim yang keluar-masuk hutan mengecek 400 *camera trap*. Pantauan biodiversitas ini penting untuk memotret kualitas ekosistem rawa gam-



Pengecekan kawasan gambut yang mudah terbakar di kawasan hutan Katingan, Kalimantan Tengah.

BISMO AGUNG



but yang dijaga. Curah hujan dan temperatur udara di beberapa lapisan zona hutan, juga direkam.

Sebagai lakon utama, pengumpulan data tentang gambut cukup lengkap. Mulai dari kedalaman gambut, permukaan perairan gambut, juga respirasi lahan gambut, semua diukur dengan tekun. Kedalaman gambut ini penting untuk menentukan berapa volume gambut yang ada di seluruh area konsesi, sehingga angka cadangan karbon di area KMP bukan sekadar klaim tanpa dasar.

Yang juga menarik adalah pengukuran respirasi tanah gambut dengan menggunakan alat *ultra portable gas analysis (UPGA)*. Alat canggih ini berfungsi merekam aktivitas emisi karbon mikroba yang ada di permukaan lahan gambut. Zidna Salsabila, peneliti RMU, menjelaskan bahwa lahan gambut juga mengeluarkan emisi karbon, sebagai bagian dari aktivitas mikroba aerob (yang bernapas dengan oksigen). “Teorinya, semakin bagus kualitas lahan gambut, kian sedikit emisi mikroba aerob dan kian kaya cadangan karbon yang disimpan,” kata Zidna.

Tim yang dipimpin Zidna rutin mengukur respirasi lahan ini di 96 titik, di area gambut yang terawat (*rewetted and drained*) dan yang tidak (*undrained*). Hasil pengamatan adalah, angka respirasi di lahan gambut yang terawat terbukti lebih sedikit, yakni 62,7 ton per hektare per tahun, sedangkan respirasi di area gambut yang *undrained* tercatat 142,3 ton per hektare per tahun. “Tak sampai lima konsesi yang melakukan pengukuran sampai sedetil ini, kami salah satunya,” kata Taryono. .

Lebih dari 200 orang muda, dari berbagai kampus, yang terlibat dalam berbagai aktivitas pengukuran ini.

Sebuah pekerjaan avonturir yang penuh tantangan, dan masuk dalam kategori *green jobs* yang sekarang jadi perbincangan di kalangan orang muda. “Senang banget kerja di sini, bisa jalan-jalan ke hutan, memotret, juga menikmati alam,” kata Zidna.

Di Tampelas, Mengalirkan Harapan

17 Agustus 2024. Suasana haru mengudara di Desa Tampelas, Katingan. “Hari ini kita merayakan kemerdekaan di depan gedung pabrik albumin dan pembangkit listrik tenaga surya yang megah. Kebanggaan luar biasa bagi kita,” kata Ugu, Sekretaris Desa Tampelas.

Banyak air mata menitik di banyak wajah penduduk yang hadir di upacara hari itu di Tampelas. Sinar matahari yang membias dari panel-panel tenaga surya adalah saksi tentang lembar sejarah baru. Selama ini warga hanya jadi penonton betapa kekayaan alam mereka dibawa ke luar, dinaikkan tongkang menuju kota-kota besar. Kehadiran gedung serba guna dan pabrik albumin ini menerbitkan harapan baru.

Pabrik albumin ini bukan pabrik biasa. Dia berangkat dari observasi mendalam tentang Tampelas. Tim RMU mempelajari karakter, potensi alam, dan keterkaitan perairan rawa gambut dengan penduduk 34 desa lain di sekitar KMP. RMU merangkul *Swadaya.id*, sebuah platform yang mengembangkan pendanaan bisnis yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Tim Swadaya inilah yang turun ke lapangan, mengkaji potensi ekonomi lokal di Katingan.

Kajian potensi ekonomi lokal ini kembali pada prinsip

utama: *Land dictates the rules*. Alam yang pegang aturan main. Bersama tim, Muhammad Syiraz, CEO *Swadaya.id*, mempelajari karakter desa-desa. Produksi kelapa melimpah di sini. Buah kelapa dibawa perahu, dijual ke Surabaya oleh para tengkulak. Tempurung kelapa ditumpuk di halaman. “Nah, kami hitung, potensi tempurung kelapa ini kalau dijadikan *biomass*, bisa menghasilkan tenaga listrik 15 ribu MW,” kata Syiraz. “Tapi, perjalanan riset untuk hal ini masih lumayan jauh, belum *feasible* saat ini.”

Desa Tampelas adalah tempat satu demi satu *puzzle* ekonomi restoratif bertemu. Inilah desa yang menjadi langganan banjir di Katingan. Saat musim banjir tiba, warga desa praktis tak beraktivitas bermakna. Sekolah tutup, kegiatan perekonomian lumpuh, dan warga seolah terjebak di rumah yang terendam. Sesuatu harus dilakukan.

Gagasan membangun gedung serbaguna mulai muncul, pada 2021. Gedung yang bisa menampung warga yang kebanjiran, sekaligus menjadi pusat aktivitas warga. Anak-anak bisa tetap bersekolah, ibu-ibu bisa memasak, di gedung serbaguna. Gedung yang diterangi dengan panel tenaga surya perlu dibangun di Tampelas.

Nah, gedung serba guna juga perlu dilengkapi dengan pusat pengembangan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi yang selaras dengan karakter perairan gambut? Tim Swadaya dan RMU sepakat bahwa ikan gabus (*Channa striata*) bisa menjadi jawaban. “Kami juga belajar pada pengembangan albumin ikan gabus di Siak,” kata Rezal.

Pabrik ikan gabus pun didirikan, dengan kerja keras yang berlipat-lipat dibanding proses membangun pab-

rik di kota besar. “Bayangkan, tingkat kesulitan membawa bahan bangunan dengan perahu dan kapal,” kata Rezal. “Belum lagi mengangkut panel surya, itu sebuah tantangan tersendiri.”

Setahun lebih, akhirnya Gedung Serba Guna Tampelas pun jadi. Pabrik albumin berkapasitas 500 kilo ikan gabus per hari berada di kompleks gedung ini. Dengan perbandingan 1:10, pabrik ini bisa menghasilkan 50 kilo tepung albumin per hari, yang akan dijual kepada beberapa perusahaan farmasi. Daging ikan yang tersisa masih bisa diolah untuk keripik atau camilan lain, yang juga bernilai ekonomi.

“Pasokan ikan didapat dari para penduduk yang akan bersama-sama mengembangkan budidaya ikan gabus di perairan gambut,” kata Suwandri, Kepala RMU Zona Tampelas. Budidaya ikan gabus ini akan mendatangkan berbagai manfaat: konservasi area gambut, menjaga kedalaman air gambut, dan sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi bagi warga lokal.

Kehadiran Gedung Serbaguna Tampelas juga berdampak memupuk imajinasi. Interaksi dengan tim RMU, arsitek, pendamping lapangan, tim yang membangun gedung dan membawa panel surya, sedikit banyak turut meluaskan cakrawala para bocah.

“Awal kami datang, 2010, cita-cita anak-anak di sini terbatas menjadi ustadz,” kata Rezal. “Kini, mereka ingin jadi arsitek, ahli tenaga surya, atau jadi pendamping lapangan.” Benih-benih imajinasi yang, semoga, terus tumbuh subur. ●

Dari Koperasi Hingga Kobumi

BAGI Lekius Kasilit, kehadiran Koperasi Keik Boson Kamwaris membawa angin segar. Ia dan keluarganya tidak lagi harus menjual udang hasil tangkapan ke tengkulak, yang semula menjadi satu-satunya pilihan di kampungnya. Dengan menjual udang ke koperasi ia bisa membawa pulang uang tunai, sesuatu yang sangat jarang ia dapatkan selama bertransaksi dengan pengepul. “Kalau dijual di tengkulak, kami cuma dapat kupon, nanti kuponnya ditukar dengan barang-barang yang ada di warungnya,” kata lelaki berusia 50 tahun itu.

Keik Boson Kamwaris merupakan koperasi berbasis masyarakat adat yang didirikan di Kampung Waimon pada Agustus 2022. Koperasi ini membeli udang banana hasil tangkapan masyarakat. Sebelum koperasi beraktivitas Lekius dan warga Kampung Waimon lainnya bergantung pada tengkulak karena lokasi kampung mereka yang jauh dari pasar.

Waimon berada di bagian selatan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Belum ada akses jalan darat ke kampung ini. Untuk menuju kota masyarakat harus berperahu sekitar 45 menit ke kampung terdekat. Dari kampung

tetangga itu mereka bisa menyewa mobil dengan tarif sekitar Rp 3 juta untuk sekali perjalanan ke Kota Sorong. Waktu tempuhnya kurang lebih tiga jam. Besarnya ongkos dan lamanya durasi perjalanan membuat masyarakat urung memasarkan sendiri hasil laut mereka dan memilih menjualnya ke tengkulak.

Selain membeli udang hasil tangkapan nelayan, pengepul tersebut juga memiliki warung kelontong. Sebelum melaut masyarakat biasanya berutang barang-barang untuk keperluan bekerja, seperti jaring, bensin, rokok, kopi, dan camilan. Mereka kemudian membayarnya dengan hasil tangkapan. Dalam sehari para nelayan biasanya menangkap 5-50 kilogram udang, tergantung kondisi cuaca. Harga jual tangkapan sekitar Rp 50 ribu per kilogram.

Minimnya literasi keuangan membuat para nelayan tidak pernah tahu pasti jumlah pendapatan harian mereka. Masyarakat hanya memahami bahwa hasil tangkapan udang yang mereka jual kepada tengkulak digunakan untuk melunasi utang. Sisanya, jika ada, biasanya dibagikan dalam bentuk kupon. Kupon ini dapat ditukar dengan kebutuhan rumah tangga, misalnya beras, minyak, gula, dan garam di toko milik tengkulak.

Praktik itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Nelayan jadi kesulitan membawa pulang uang tunai, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya sekolah anak dan berobat. Karena kurangnya pemahaman soal keuangan itu, mereka juga sering harus kembali meminjam uang kepada tengkulak. “Hampir semua orang-orang di sini punya utang,” ujar Lekius. Demi memutus lingkaran tersebut, Lekius kemudian memilih

menjadi anggota koperasi.

Keik Boson Kamwaris menawarkan skema berbeda dengan tengkulak. Koperasi ini memiliki Rumah Timbang yang difungsikan sebagai tempat menampung udang-udang segar sebelum dibawa ke kota. Rumah Timbang menjadi sarana supaya perdagangan antara koperasi dan masyarakat dapat berjalan adil dan jujur.

Saat masyarakat membawa udang ke koperasi, petugas akan menimbanginya langsung di depan mereka. Para nelayan dapat mengetahui berapa kilogram hasil laut yang mereka bawa. Koperasi kemudian akan membayar tunai sesuai jumlah udang yang masyarakat jual.

Rumah Timbang juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk melakukan banyak aktivitas. Mulai dari membicarakan masa depan dan kesehatan anak-anak di kampung hingga memperluas pengetahuan tentang bagaimana agar uang yang didapatkan dari hasil penjualan udang bisa disimpan untuk digunakan saat pesta Natal.

Dari obrolan-obrolan tersebut pelan-pelan staf koperasi mengajari cara mengelola keuangan supaya masyarakat bisa menabung demi mencukupi keperluan hidup. “Sekarang kami bisa memperbaiki perahu, bisa membeli kebutuhan lain seperti alat komunikasi. Kami juga sudah bisa belajar kelola uang sendiri,” kata Dino Aresi, salah satu anggota koperasi.

Kini, koperasi tersebut memiliki delapan orang anggota. Selain belajar manajemen keuangan, di Keik Boson Kamwaris, mereka di antaranya berlatih cara menda-ta udang yang masuk ke koperasi dan cara menjaga kualitas udang agar tetap segar. Jika semuanya berjalan lancar,

nantinya mereka ingin mengelola toko kelontong supaya tidak perlu lagi berbelanja kebutuhan harian ke kampung sebelah.

Di ibu kota Papua, Jayapura, sebuah koperasi juga didirikan dengan nama Yora Makhande pada 2022. Koperasi ini berfokus membeli biji kakao, terutama dari Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya. Sebagian masyarakat di Mamberamo Hulu menanam kakao. Namun, hasil panen mereka tidak terserap dengan baik karena masyarakat enggan ke kota.

Untuk menuju ke kota, masyarakat Mamberamo Hulu harus menyusuri sungai menggunakan *speed boat* menuju Kasonaweja di Mamberamo Tengah. Sungai itu memiliki beberapa jeram, jika pengemudi tidak lihai, taruhannya adalah nyawa. Perjalanan lewat sungai ini ditempuh 4-5 jam. Ongkos sewa *speed boat* sekitar Rp 10-15 juta. Jika beruntung menemukan teman seperjalanan, biaya ini bisa dibagi. Dari Kasonaweja, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ke Jayapura dengan biaya Rp 310-450 ribu.

Kondisi itulah yang membuat panen kakao masyarakat tidak terjual dengan baik. Jika tidak ada orang dari kota yang mengambil hasil panen mereka, masyarakat lebih memilih membiarkan biji kakaonya busuk. Keadaan ini amat disayangkan, terlebih harga biji kakao sekarang sedang melonjak.

Negara-negara di Afrika Barat yang menjadi produsen kakao terbesar di dunia melaporkan bahwa sebagian dari kebun mereka gagal panen, antara lain akibat krisis iklim. Pasokan kakao global menjadi defisit, yang membuat har-

ga kakao terus melangit. Efeknya adalah produksi cokelat terus mengalami penurunan dan lama-lama dunia menghadapi krisis cokelat.

Saat ini, para produsen cokelat mencari sumber kakao lain, termasuk dari Indonesia. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menyerap hasil panen kakao dari para petani, termasuk dari Mamberamo Hulu. Hingga medio 2024, Koperasi Yora Makhande telah membeli ratusan kilogram biji kakao dari Mamberamo Raya. Biji kakao itu akan disalurkan ke produsen cokelat dalam negeri melalui Kobumi.

Keik Boson Kamwaris dan Yora Makhande adalah koperasi yang didorong oleh Yayasan EcoNusa, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Selain dua koperasi itu, EcoNusa menggerakkan pendirian koperasi di Sorong Selatan dan Kaimana di Papua. Untuk wilayah Maluku, koperasi didirikan di Ambon, Seram Bagian Barat, Banda Neira, dan Seram Bagian Timur. Semua koperasi itu melakukan aktivitas sama, yakni membeli hasil komoditas masyarakat adat dan masyarakat lokal setempat. Selain udang dan biji kakao, ada pala, vanili, dan kopra.

Koperasi-koperasi tersebut didirikan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat adat. Koperasi dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lain. Koperasi, di antaranya, dapat memajukan kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan anggota, mengutamakan kepentingan anggota, serta pengelolaannya bersifat terbuka dan suka-rela.



Udang sungai tangkapan
warga. Dijual dengan harga
Rp 50 ribu/kg.

ECONUSA/ALBERT YOMO

Untuk wilayah Papua, koperasi dibentuk khususnya di daerah yang tumpang tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya EcoNusa membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi perizinan sawit tersebut. Belasan perusahaan dicabut izinnya karena terbukti melanggar peraturan. Yayasan ini kemudian membantu masyarakat adat mendapatkan legalisasi hak wilayah dari pemerintah. Sebagian marga sudah mendapatkan peng-

akuan hak ulayat dari pemerintah daerah.

Sambil mendorong legalisasi itu, EcoNusa juga menstimulasi peningkatan kemandirian ekonomi, salah satunya dilakukan lewat koperasi. Untuk menjual komoditas yang telah dibeli dari masyarakat, Yayasan EcoNusa bersama koperasi-koperasi tersebut membuat PT Ekosistim Bumi Lestari (Kobumi) pada Mei 2022.

Kobumi bertugas memasarkan hasil komoditas masyarakat yang dibeli koperasi, ke pasar nasional maupun internasional. Harapannya, ketika masyarakat bisa merasakan bahwa komoditas mereka bisa mensejahterakan, mereka akan lebih menjaga sumber daya alam di wilayahnya.

Keberadaan Kobumi diharapkan bisa memotong rantai perdagangan yang panjang sehingga koperasi yang bekerja sama dengan Kobumi bisa membeli komoditas dengan harga yang lebih menguntungkan bagi masyarakat. “Kami bercita-cita meningkatkan kemandirian masyarakat di timur Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan masyarakat dalam perekonomian,” ujar Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa.

Sejak awal diresmikan, Kobumi langsung mencari pasar yang bisa menyerap komoditas masyarakat, di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahap awal, mereka berfokus memasarkan pala dan udang karena dua komoditas ini cukup banyak dihasilkan masyarakat dan nilai jualnya juga tinggi.

Untuk pala, Kobumi melakukan penjajakan ke perusahaan besar, dari Cina dan Eropa. Dari penjajakan itu mereka bisa mengetahui kualitas dan kuantitas komoditas yang dibutuhkan di masing-masing negara. Tim Kobu-

mi terkadang menjumpai komoditas yang dihasilkan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan standar negara tersebut. Ada kalanya juga kualitasnya sudah sesuai standar namun kuantitasnya yang belum bisa memenuhi. Maka, jalan tengahnya adalah menjajaki perusahaan dalam negeri yang bisa membeli dalam jumlah lebih kecil.

Setelah berbulan-bulan melakukan penjajakan, akhirnya Kobumi berhasil menjual 12,3 ton pala dari Ambon pada April 2023. Pala ini sebelumnya sudah dipilah staf koperasi berdasarkan mutunya, mulai dari kualitas sangat baik hingga cukup baik. Pala ini dibeli perusahaan eksportir yang berbasis di Jakarta. Beberapa penjualan dalam negeri juga dilakukan sepanjang 2023.

Setelah pengiriman dalam negeri, Kobumi terus berupaya menjual hasil bumi yang ditanam masyarakat ke pasar internasional secara langsung. Berbagai promosi terus dilakukan, salah satunya dengan mengikuti pameran dagang terbesar, Indonesia Trade Expo Indonesia (TEI) 2023, yang dihadiri pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri pada Oktober 2023.

Setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya untuk pertama kali pala dari Kepulauan Banda dan Pulau Ambon diekspor langsung ke Belanda oleh Koperasi Kamboiti Rempah Maluku bekerja sama dengan Kobumi sebanyak 8 ton. Nilanya 110.349,37 euro. Jika ditotal sepanjang 2023, Kobumi telah mengirim pala 82,6 ton, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan juga telah mengumpulkan udang hasil tangkapan masyarakat sebanyak 1,6 ton yang dipasarkan di Sorong dan Jakarta. •

KOBUMI

Komoditas Terbaik dari Surga di Timur

**Asal dan
Tempat
Pemrosesan
Produk-
produk Kami**

**Ternate,
Maluku Utara**

**Koperasi Tiva
So Babunyi**

Komoditas:

1. Pala
2. Kopro
3. Kenari
4. Perikanan

**Kabupaten Sorong,
Papua Barat Daya**

**Koperasi Egek
Malaumkarta Raya**

Komoditas:

1. Tuna

**Ambon,
Maluku**

**Koperasi
Kamboti
Rempah
Maluku**

Komoditas:

1. Pala
2. Kopro

**Banda Neira,
Maluku Tengah**

**Koperasi
Anugerah
Alam Maluku**

Komoditas:

1. Pala



Kabupaten Sorong,
Papua Barat Daya

**Koperasi
Fgan Fen Sisi**

Komoditas:

1. Udang Banana

Kabupaten Sorong,
Papua Barat Daya

**Koperasi Keik
Boson Kawaris**

Komoditas:

1. Udang Banana

Jayapura,
Papua

**Koperasi
Yora
Mekhande
Jaya**

Komoditas:

1. Kopi
2. Kakao

**Seram Bagian
Timur, Maluku**

**Koperasi
Rakyat Lestari
Maluku**

Komoditas:

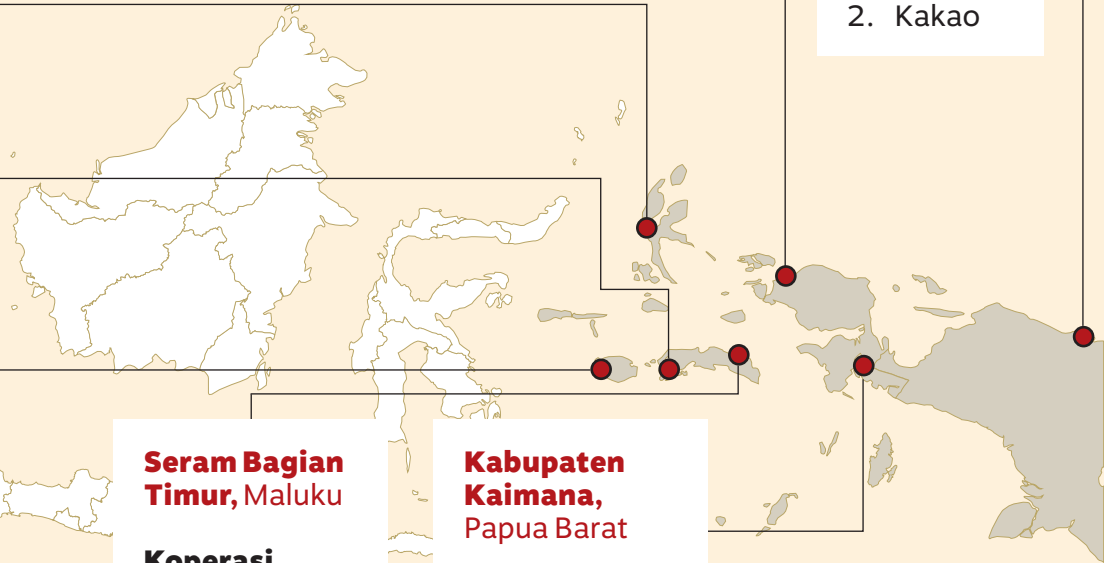
1. Pala
2. Kopra
3. Perikanan

**Kabupaten
Kaimana,
Papua Barat**

**Koperasi
Tomang Negri
Lengguru**

Komoditas:

1. Pala Papua
2. Pisang



Bersama-sama Mengayuh Seribu Sungai

KALIMANTAN Barat, inilah salah satu provinsi dengan tutupan hutan terluas di Indonesia. Masyarakat Dayak yang mendiaminya telah menjadi penjaga hutan dari generasi ke generasi. Sementara suku Melayu lebih banyak bermukim di sekitar pesisir dan daerah aliran sungai. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kalimantan Barat memiliki luas kawasan hutan mencapai 8.389.600 hektare atau sekitar 57,14 persen dari total luas wilayah Kalimantan Barat.

Provinsi ini juga memiliki kawasan gambut mencapai 2.793.331 hektare. Kawasan gambut tersebut terbagi menjadi indikatif fungsi budidaya gambut dan indikatif fungsi lindung gambut di 699 desa.

Ada pula kawasan mangrove di Kalimantan Barat, luasnya mencapai 161.557,19 hektare. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Kawasan mangrove tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kota Singkawang. Tak heran bila Kalimantan Barat juga dikenal sebagai provinsi seribu sungai.

Ada masanya provinsi ini menjadi pusat deforestasi



Warga Nanga Lauk, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjemur ikan toman hasil tangkapannya di Sungai Lauk.

FOREST DIGEST / BISMO AGUNG

yang pesat dan tertinggi. Melebihi provinsi lain. Ekonomi provinsi ini bertumpu pada agrikultur, terutama perkebunan, hasil hutan, dan perikanan. Pada periode 2011-2016, perkebunan sawit bertambah secara pesat. Sayangnya, perluasan lahan sawit itu mengancam keanekaragaman hayati hutan Kalimantan Barat, juga wilayah gambut, dan mangrove yang sangat vital untuk melindungi pelepasan karbon.

Pada 2020, pemerintah Kalimantan Barat menetapkan target untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Tiga, dari total duabelas kabupaten dan kota di provinsi ini, ingin menguatkan konsep ekonomi berkelanjutan, yaitu Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Ketiganya ingin melindungi hutannya dengan mendorong model industri hilir berbasis alam dengan skema pengembangan produk turunan dari komoditas strate-

gis lokal. Artinya, berganti haluan menuju ekonomi yang memulihkan hutan demi memenuhi target pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 14 juta ton CO₂ pada 2030.

Dari ketiganya, Sintang dan Sanggau termasuk yang lebih dahulu mengembangkan sentra kemitraan multipihak. Sentra ini menjadi wadah komitmen bersama dan upaya kolektif para pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi ekonomi restoratif. Kapuas Hulu, kabupaten ketiga menyusul pada 2020.

Melalui sentra kemitraan, pemerintah daerah duduk bersama berbagai organisasi masyarakat sipil nonpemerintah, pebisnis lokal, akademisi, dan media. Pemerintah daerah mengakui peran organisasi sipil dengan memberi surat keputusan bupati. Berbagai langkah teknis implementasi ekonomi restoratif dipersiapkan, dari regulasi, perencanaan, tata kelola multi-pemangku kepentingan, inovasi dan bisnis berkelanjutan, serta pemantauan, pelaporan, dan komunikasi.

Pola yang dijalankan di Kalimantan Barat ini sesungguhnya juga dikerjakan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; Kabupaten Siak, Provinsi Riau; Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Daroesalam; dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Semuanya menjadi kabupaten percontohan yang menerapkan moda sentra kemitraan.

Semua kabupaten ini adalah anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), asosiasi sembilan kabupaten yang sejak 2017 telah mendorong anggotanya melindungi ekosistem penting, seperti hutan dan gambut, juga me-

nyejahterakan masyarakat lokal melalui kerjasama multipihak.

Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL, mengatakan bahwa yang paling penting dalam proses kemitraan multipihak adalah menemukan para *champions*, atau tokoh-tokoh kunci eksekutor daerah. Di Sintang, menurutnya, ada tokoh seperti Kepala Bappeda, juga Sekretaris Daerah serta ekosistem multipihak yang terdiri atas CSO, komunitas lokal, maupun sektor privat yang mendorong visi ekonomi yang berkelanjutan ini. “Jadi Bupati tidak sendirian, ada para pelaku lapangan yang bisa mewujudkan visi ini di lapangan,” katanya.

Sintang Lestari dan Sabang Merah Berdempu

Di Sintang, Sekretariat Bersama Sintang Lestari bekerja di bawah mandat Bupati Sintang Jarot Winarno yang sejak 2019 mendukung konsep kemitraan multipihak. Ada 34 mitra yang tergabung di dalamnya. Di antara mereka, ada Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Kabupaten Sintang, LTKL, WWF Indonesia, Yayasan Tropenbos, Gemawan, dan Rainforest Alliance.

Dalam kolaborasi untuk mendorong ekonomi restoratif di Kalimantan Barat, selain LTKL, ikut serta Yayasan Madani Berkelanjutan, yang mendorong pemberdayaan pemuda, agroforestri, dan eko-pariwisata; juga ada Perkumpulan Huma, yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk lembaga lokal Kalimantan, ada Lembaga Bela Bana Talino, yang banyak membantu masyarakat menghadapi sengketa lahan, dan Gemawan, yang mendorong perubahan sosial di berbagai aspek. Koalisi Ekonomi Membu-



Madu hutan dikemas oleh warga di Nanga Lauk, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

FOREST DIGEST / BISMO AGUNG

mi, Supernova, dan Mandalika Katalika ikut mendorong investasi berkelanjutan demi pengembangan ekonomi.

Salah satu upaya kolektif yang didorong adalah membuat peta kolaboratif WebGIS Sekretariat Bersama dan Geoportal yang menunjukkan pemetaan kerja-kerja organisasi non-pemerintah di wilayah Sintang yang tersinkronisasi. Hasilnya, Kabupaten Sintang berhasil mendapatkan peringkat pertama di Kalimantan Barat dalam inovasi Indeks Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Sintang juga berupaya melindungi lahan yang sudah dikelola masyarakat turun-temurun yang didominasi pepohonan alami dan tutupan vegetasi berhutan, dikenal dengan istilah rimba/gupung, dengan mengeluarkan kebijakan khusus. Kabupaten ini merupakan yang pertama di Kalimantan yang menerbitkan peraturan tersebut.

Sekitar empat tahun setelah sekretariat bekerja, pada Desember 2023, Kabupaten Sintang melalui sentra kemitraannya menyelenggarakan Mitra Pembangunan Award yang memberi apresiasi bagi mitra yang telah berkontribusi dalam pencapaian target Kabupaten Sintang lestari.

Terdapat 32 dari 41 lembaga yang data dan kegiatannya berhasil dihimpun dengan temuan berikut:

- Ada 133 dari 391 desa yang menjadi wilayah dampingan mitra dan tersebar di 13 kecamatan (Sintang terdiri dari 14 kecamatan).
- Mitra telah berkontribusi langsung dalam pembangunan yang tertuang dalam 12 program utama RP-JMD yakni: pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, stunting, sanitasi dan air bersih, kabupaten layak anak, tata kelola pemerintahan, narkoba dan penanggulangan kebencanaan.
- Total nilai kontribusi mitra pada 2023 adalah Rp 21 miliar. Dalam kurun waktu tiga tahun (2021– 2023) total kontribusi para mitra untuk Kabupaten Sintang adalah Rp 50 miliar.

Kabupaten Sanggau tak mau kalah. Mereka memiliki sentra kemitraan bernama Sabang Merah Berdampu. Sentra ini beranggotakan 53 organisasi non-pemerintah, akademisi, dan media. Target yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas dan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan kearifan lokal dengan mengembangkan sektor unggulan;

- Meningkatkan investasi di kabupaten sesuai rencana penggunaan lahan.

Dr. Marina Rona, SH, MH, aparat Pemerintah Kabupaten Sanggau mengatakan, para organisasi yang telah bergabung di dalam sekretariat kemudian diajak membiarkan perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan apa saja yang tidak bisa di-cover anggaran pemerintah. “Jadi LSM bisa masuk ke wilayah yang tidak dibiayai APBN atau APBD,” katanya.

Program yang akan dilakukan, menurut Marina, dirancang bersama-sama dengan para entitas lain di sekretariat sehingga saling mengisi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target. Ketika lembaga non-pemerintah sudah masuk tahap implementasi, pemda tidak mencampuri secara administrasi keuangan tapi tetap berkoordinasi berkala tentang kendala lapangan.

“Dulu teman-teman lembaga non-pemerintah merasa pemda sebagai oposisi. Sekarang kami kerja bersama. Pemerintah tidak mungkin melakukan semuanya, seperti pemasaran dan lainnya, kami perlu dibantu,” katanya.

Dengan hadirnya sentra kemitraan berbasis kabupaten, Ristika menambahkan, pengembangan sumberdaya lokal tak hanya bertumpu pada anggaran dana pembangunan dari pemerintah. Dan dengan dorongan para tokoh, bahkan dinas-dinas teknis di pemda yang selama ini kurang banyak terpapar dengan jaringan yang lebih besar, jadi ikut terbuka dan bisa diraih.

Misalnya seperti Mandala Katalika, organisasi yang bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mendorong dana iklim sebagai salah satu insentif publik dari tingkat provinsi. Selanjutnya

memfasilitasi redistribusi ke tingkat kabupaten dan desa, untuk mendorong pengembangan ekonomi restoratif di Kalimantan Barat.

Dan untuk pengembangan pemuda, LTKL bekerja sama mendirikan sentra inkubasi bisnis dan inovasi di Sintang dan Sanggau dengan total 31 usaha kecil menengah yang dikurasi hingga saat ini serta adanya satu laboratorium riset untuk menemukan produk bernilai tambah dari komoditas berbasis alam yang akan dikembangkan melalui sentra produksi berbasis industri kecil dan menengah. Para pimpinan daerah kemudian melihat sendiri bahwa mereka bisa mengakses sumberdaya non-pemerintah melalui mitra-mitra sesuai keahliannya. Dinas-dinas ikut terbantu. “Kelembagaan multipihak ini bisa membantu mereka mencapai *key performance index*, alias KPI daerahnya,” katanya.

Memanfaatkan Kekayaan Komoditas Lokal

Moda perhutanan sosial menjadi salah satu skema pengelolaan lahan yang didorong untuk mewujudkan ekonomi restoratif di Kalimantan Barat. Jumlah area perhutanan sosial di provinsi ini mencapai 638.440 hektar dengan 247 izin yang berada di 12 kabupaten. Gemawan, salah satu lembaga masyarakat sipil yang bekerjasama dengan pemda, telah menjangkau 34 desa dan 42.885 hektare dengan membantu masyarakat mendapatkan izin dan membangun hutan desa dan hutan masyarakat.

Dari aspek komoditas, ada lima komoditas andalan Kalimantan Barat, yakni buah tengkawang, madu, kopi, buah asam maram, cokelat dan budidaya perairan.

Industri madu di Kalimantan Barat menunjukkan po-

tensi yang signifikan dengan dua jenis produksi utama: madu hutan dan madu Kelulut. Madu hutan, yang menghasilkan 10 ton per tahun, memiliki penyerapan pasar sebesar 4,6 ton, yang mencerminkan permintaan yang kuat.

Sebaliknya, madu Kelulut, meskipun produksi tahunannya mencapai 20 ton, memiliki penyerapan lokal yang jauh lebih rendah, hanya 200 kilogram, karena harganya yang lebih tinggi. Ini mendorong petani untuk mengeksportnya ke Jawa. Sebagai komoditas lokal, madu menawarkan peningkatan ekonomi meski ada ancaman eksploitasi berlebihan dan hilangnya habitat lebah. Karena itu diperlukan praktik-praktik pengelolaan komoditas madu secara berkelanjutan.

Potensi kopi lokal di Kalimantan Barat adalah tipe robusta dan liberika. Tanaman kopi robusta bisa tumbuh di area gambut dekat pohon kelapa. Ia memproduksi biji kecil dan besar yang mirip dengan biji kopi dari Pulau Jawa. Sedangkan tanaman kopi liberika tumbuh dalam lingkungan agroforestri bersama nanas, alpukat, tanaman rempah, rambutan, dan tanaman hutan lainnya, termasuk pohon akasia dan gelam.

Setiap trimester, kebun kopi robusta dapat menghasilkan sampai satu ton biji kecil dan 400 kilogram biji besar. Sedangkan, kebun kopi liberika dapat menghasilkan 400 kilogram biji merah, yang setelah kering dapat menjadi 160 kilo biji kopi.

Kopi liberika punya rasa yang unik, sekaligus berpotensi ekonomi tinggi karena bisa meraih pangsa pasar premium. Artinya, ia harus dijual kepada kalangan spesialis kopi dan konsumen yang sadar lingkungan via pasar *on-*



Petani kopi di Desa Tanjung, Mentebah, Kalimantan Barat, mengemas kopi jenis robusta hasil tanam di hutan desa.

FOREST DIGEST / BISMO AGUNG

line, bermitra dengan bisnis eko-pariwisata. Kebutuhannya diperkirakan berkisar antara 16-55 ribu ton per tahun.

Untuk cokelat, dengan suplai sekitar 1,7 – 3,4 ribu ton per tahun, komoditas ini tumbuh dengan baik di Kalimantan Barat, dalam ekosistem agroforestri. Kalara Borneo, perusahaan cokelat *bean-to-bar* lokal di Kalimantan Barat, berupaya bekerjasama dengan petani lokal, masyarakat adat, dan koperasi desa untuk memastikan biji kakao yang berkualitas dan menghasilkan cokelat vegan, bebas gluten, bebas laktosa dengan indeks glikemik rendah.

Kalara bertujuan ingin menjadi rantai pasok cokelat premium dan *cacao hub* di Kalimantan Barat. Tidak lagi sekadar mengirim biji kakao mentah ke Pulau Jawa atau Bali, tapi memproduksinya langsung dekat dengan petani. “Kami masih berupaya mengembangkan pasar. Paralel, kami juga berupaya mengenalkan praktik-praktik tani berkelanjutan yang menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan,” kata Yohana Tamara Yunisa, CEO &

Founder Kalara Borneo yang putri asli Dayak.

Selain coklat, Kalara juga mendorong pengembangan buah asam maram, yang dapat dipanen sepanjang tahun dari rawa gambut Kalimantan Barat. Kalara memperkirakan bahwa hutan rawa gambut dapat menghasilkan hingga dua ton buah maram per bulan. Perusahaan ini memproduksi sirup maram dan mendorong kreasi penggunaannya dengan industri resto dan hotel.

Salah satu komoditas unggulan lainnya adalah budidaya perairan. Ada *start-up biotech* Semesta Sintang Lesitari yang saat ini beroperasi sebagai laboratorium dengan nama Laboratorium Bestari. Laboratorium ini meneliti ikan Toman dan Gabus khas Kalimantan Barat. Kerja sama ini mengkaji populasi, ekologi, dan nilai ekonomi kedua ikan tersebut.

Mereka menemukan bahwa ikan toman memiliki kandungan gizi tinggi berupa 17,2 persen albumin dan 20.2 persen lemak Omega-3, sedangkan ikan gabus mengandung 15 persen albumin. Daging ikannya juga bermanfaat sebagai biskuit untuk konsumsi bergizi anak-anak.

Dengan pasar global untuk albumin ikan gabus yang diproyeksikan mencapai \$6,77 miliar pada 2026, Kalimantan Barat punya peluang besar mengembangkan budidaya ikan ini. Meskipun ikan gabus liar melimpah di daerah lahan gambut, pemanenan yang tidak berkelanjutan dapat merusak ekosistem, sehingga penerapan akuakultur penting untuk memastikan pasokan yang stabil tanpa gangguan ekologi.

Pada akhirnya, kerja bersama di Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu menjadi contoh bahwa kolaborasi mul-

tipihak menjadi prasyarat kemajuan tingkat kabupaten. Yang menjadi pondasi utama adalah komitmen dan kebijakan pembangunan lokal, yang diwujudkan via dokumen perencanaan pembangunan yang dikelola bersama dengan organisasi masyarakat sipil.

Kemudian, pilar regulasi mengunci kebijakan dan perencanaan daerah yang ajek. Tata kelola memastikan para pemangku kepentingan berbagi peran berdasarkan keahlian, tanpa tumpang tindih. Inovasi dan bisnis mendorong pengembangan komoditas lokal secara berkelanjutan. Tak lupa, pemberdayaan orang muda juga didorong melalui kegiatan peningkatan kapasitas berupa inkubator dan akselerator bisnis untuk kalangan muda komunitas lokal.

Setelah semua faktor di atas dilaksanakan, maka pendanaan dan investasi lebih mudah untuk masuk. Ini karena para penyandang dana dan investor perlu kepastian agar uang yang mereka tanamkan tidak hilang. Semua upaya untuk pembelajaran, evaluasi, dan komunikasi juga harus terus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kendala menjadi *blocker* yang membesar dan menghalangi pencapaian tujuan.

Pada 2026 kelak, LTKL akan menyelenggarakan Festival Lestari keenam yang pada tahun itu diadakan di Kalimantan Barat. Keberhasilan penyelenggaraan festival itu sebelumnya di berbagai wilayah lain sebelumnya, seperti Siak di Provinsi Riau, Bone Bolango di Provinsi Gorontalo, dan Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, akan menyorot kemajuan Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu dan berbagai kabupaten di Kalimantan Barat yang berhasil mendorong model ekonomi yang kian lestari. •

Tak Kunjung Melipat Harga Tengkarwang

T

ENGKAWANG, atau dalam bahasa Inggris disebut *Illipe Nut* atau *Borneo Tallow Nut*, adalah nama buah dari beberapa pohon jenis Meranti (*shorea*) yang menghasilkan minyak lemak. Jenisnya ada belasan. Setiap jenis berbeda usia panennya. Bisa setahun sekali, bisa juga 3-5 tahun sekali.

Di Hutan Adat Tae seluas 2.189 hektare, tepatnya di wilayah Ketemenggungan Adat Tae, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pohon tengkarwang setinggi-tinggi langit tersebar di mana-mana. Buahnya bertebaran di kaki pohon. Sebagian buah menumbuhkan tunas baru.

Pohon tengkarwang tumbuh di antara pohon aren, damar, durian, manggis, jambu bol, tanaman obat, tanaman bumbu dan pangan lainnya. Hutan ini adalah lahan bersama yang dikelola ketat melalui aturan adat. Hutan ini menyangga kehidupan komunal dan telah mendapat ketetapan hutan adat resmi sejak 2018. Nenek moyang warga mengharamkan tengkarwang ditebang. Mungkin karena jenis pohonnya yang tinggi besar dengan akar kuat. Buahnya

pun bermanfaat jadi pangan satwa liar. Dan, tengkawang banyak digunakan dalam ritual adat besar dan sakral Dayak Tae, menyandang status sebagai “pohon kehidupan.”

Warga Dayak Tae, pemilik hutan adat ini, tidak mengambil buah tengkawang jika belum dipastikan ada pembelinya. Harga buah keringnya hanya di angka Rp1 500/kg. Padahal, di tangan *artisan* - atau perajin dengan pengetahuan tinggi - harga mentega tengkawang berkualitas tinggi laku diekspor ke Jepang atau Eropa di kisaran harga Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu perkilogram. Bahan ini digunakan untuk bahan kosmetik, farmasi, atau makanan. Dalam dunia kosmetik, khasiat tengkawang setara dengan mentega *shea* dari kacang pohon karite yang tumbuh di Afrika Barat hingga Timur atau mentega kakao dari pohon kakao atau coklat.

Rentang harga yang jauh antara bahan mentah dan produk siap ekspor itu sayangnya tidak mudah didekatkan. Untuk konsumsi rumahan, sebagai pengganti minyak goreng misalnya, penduduk hanya memanggang manual menggunakan api kayu bakar. Lemak hasil lelehan buah kemudian disimpan dalam bilah bambu. Dalam kondisi 100 persen kering, lemak ini tahan lama. Setiap satu ton buah tengkawang akan menghasilkan 500 kilo-

Mentega olahan dari buah tengkawang.

KOLEKSI PT GEMILANG ARCIA WELLINDO,
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT



gram buah kering. Namun karena prosesnya rumit dan perlu keterampilan khusus, semakin sedikit penduduk yang melakukannya.

Biasanya mereka memilih menjual ke tengkulak atau pengepul buah di pasar. Sayangnya saat panen, harga cenderung jatuh parah sehingga tidak menguntungkan bagi penduduk untuk mengambilnya. “Paling tinggi pernah kami jual tujuh ton dengan harga Rp 1.500/kilo,” kata Marsellus Yopos, pemuka adat sekaligus Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat Dayak Tae.

Warga berharap harga mentah itu bisa ditingkatkan jika penduduk punya akses ke pasar yang lebih baik daripada dijual ke tengkulak. Juga, jika masyarakat punya alat pengering mekanis sehingga tidak sekadar menjual bahan mentah, tapi minimal setengah bahan baku dengan kualitas baik. Mereka juga memerlukan gudang sehingga bisa menyimpan buah tengkawang, terutama jika terjadi panen raya di mana buahnya berlipat-lipat hasilnya, sehingga bisa menyimpan stok sampai panen raya berikutnya. “Setidaknya jika belum ada *buyer*, buah atau lemaknya bisa disimpan,” katanya.

Hadi Susanto, pemilik kosmetik lokal Arcia di Kalimantan Barat, bertumpu pada riset sains yang menyatakan tengkawang memiliki kandungan bermanfaat untuk melembabkan dan menutrisi kulit manusia. Ia menggunakan tengkawang dan komoditas lokal lainnya seperti *aloe vera* atau lidah buaya, *virgin coconut oil* atau minyak kelapa murni, nanas, kopi, dan biji kemiri Kaliman-

Pekerja sebuah perusahaan di Kalimantan Barat sedang mengolah buah tengkawang untuk dijadikan mentega dan bahan kosmetik.

KOLEKSI PT GEMILANG ARCIA WELLINDO, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT



tan Barat dalam produk-produk Arcia, seperti perawatan rambut (sampo, kondisioner, masker rambut, minyak rambut); perawatan kulit tubuh (sabun, lulur, lotion, minyak pijat); serta perawatan wajah (pencuci wajah, pelembab wajah, dan penyegar wajah) Setelah beroperasi sejak 2019, Arcia kini sudah mencapai harga minimal Rp 35 ribu-Rp 300 ribu per produk.

Namun tidak mudah untuk meningkatkan keterampilan penduduk dalam mengolah tengkawang agar harganya bisa berlipat. Hadi perlu intens mendampingi warga di desa penghasil tengkawang untuk melatih sistem kerja demi menghasilkan mentega yang berkualitas. “Saya turun langsung ke lapangan untuk menyortir buah, menyiapkan alat dan memproses. Saya perlu waktu lebih dari satu tahun untuk mendampingi proses tersebut, dan perlu waktu sekitar satu bulan untuk memproses dari pengambilan buah sampai menjadi mentega tengkawang,” katanya.

Dengan pasar global untuk minyak pengganti mentega cocoa yang diproyeksikan mencapai US\$ 5,4 miliar pada 2027, peluang tengkawang sangat besar. Deman Huri, Koordinator Jaringan Tengkawang dan juga praktisi di Rumah Tengkawang di Universitas Tanjungpura menyampaikan perhitungan lembaganya, dengan biaya sebesar Rp 78 juta per 5-10 ton proses produksi buah tengkawang, bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,2 hingga 3 miliar per *batch* produksi.

Apalagi, Jaringan Tengkawang telah berhasil mendaftarkan tengkawang sebagai Bahan Pangan Nasional pada

Oktober 2023. Pendaftaran ini membuka pintu bagi produk apa pun yang menggunakan tengkawang sebagai bahan baku untuk dapat dipasarkan secara nasional dan memperoleh izin BPOM (setara dengan FDA). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat juga telah menetapkan tengkawang sebagai salah satu komoditas prioritas untuk dikembangkan dan dipercepat pertumbuhannya dalam Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Kalimantan Barat 2025-2026.

Namun, untuk meningkatkan nilai tengkawang sebagai komoditas unggulan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil mendorong lahirnya simpul jaringan tengkawang. Simpul multipihak ini berjejaring untuk mengkonservasi tengkawang, memberdayakan petani, dan mendorong akses pasar bersama. Ada banyak tantangan lokal mulai dari proses pemungutan buah, penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan dan tata niaga tengkawang dan juga pengembangan model bisnis dan skema pendanaan yang berbasis *community enterprise* dengan memanfaatkan modalitas yang sudah ada seperti izin perhutanan sosial dan KUPS. Standar mutu harus ditingkatkan, pabrik pengolahan baru harus dibangun, juga fasilitas gudang penyimpanan harus diadakan.

Tak heran bila sampai 2024 ini jaringan Tengkawang masih berupaya merumuskan harga bersama. Artinya, masih jauh jalan yang harus ditempuh untuk memastikan buah Tengkawang punya rantai pasok yang stabil dan melipatkan harga jualnya. •

Javara, Sang Jawara Petani Lokal

ADALAH Pak Gong, sosok petani di Jawa Timur, yang mengubah perjalanan Javara dan Helianti Hilman. “Bantu kami, Bu. Bantu petani seperti saya, supaya tidak selalu diakali perusahaan besar,” kira-kira demikian permintaan Pak Gong kepada Heli. Rincian nama dan lokasi tak bisa dibagikan di sini karena terkait perjanjian legal. “Kata-kata Pak Gong itu yang mengawali Javara,” kata Helianti, perempuan pendiri Javara Indigenous Indonesia, kepada penulis yang berkunjung ke Kebun Javara, di Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat.

Lalu, tapak jalan hidup Pak Gong dan Helianti Hilman berserobok. Sebagai penghasil gula aren berkualitas, di awal 2000-an, hati Pak Gong berbunga ketika diajak kerja sama eksklusif dengan sebuah perusahaan, kita sebut saja Maju Sikat Terus. Pak Gong hanya boleh menjual produknya kepada perusahaan. Ada sanksi penalti yang menanti jika Pak Gong ketahuan menjual produk kepada selain Maju Sikat Terus.

Persoalannya, Maju Sikat cuma beberapa kali saja membeli gula aren dari Pak Gong. Perusahaan malah

membeli produk gula aren yang lebih murah dan dikemas seolah-olah setara kualitas produk Pak Gong. Akibatnya, nasib Pak Gong jadi seperti digantung tak menentu.

Ada banyak kisah petani dengan beragam variasi yang ditangani Helianti Hilman, yang di awal 2000-an bekerja sebagai pengacara. Ada petani yang digugat perusahaan benih karena mengembangkan benih lokal, ada yang dikriminalisasi lantaran menggunakan benih yang tidak sesuai kemauan perusahaan, dan seterusnya. Berbagai kisah itu punya persamaan: nasib petani yang selalu disudutkan. Dan, lantaran terus tersudut, petani tak bisa bergerak leluasa memuliakan tanah, merawat ekosistem, juga menjaga hutan, yang ada di area sekitar mereka.

Kisah Pak Gong punya makna spesial bagi Helianti. Pak Gong memintanya membantu mengembangkan pasar bagi produk-produk petani. Agar tak ada lagi yang bernasib sama seperti Pak Gong, yang tergecet dalam perjanjian dengan korporasi yang tidak adil. Seandainya Helianti bisa membantu mengembangkan pasar, nasional dan internasional, maka ada banyak petani yang bisa tertolong. “Saya juga yakin, ada banyak produk unggulan yang kita punya karena keberagaman hayati di negeri ini luar biasa,” katanya.

Helianti menetapkan pilihan. Dia memutuskan tak lagi bekerja di ujung, yakni membantu kasus hukum para petani, tetapi lebih bergerak ke hulu. “Yakni menciptakan pasar yang adil, respek pada keberagaman hayati, dan juga pada *indigenous people*,” kata lulusan King’s College dan University of London, dengan fokus Hak Atas Kekayaan Intelektual, ini. “Yang dibutuhkan petani kita bukan

**Aktivitas interaksi
dengan petani lokal
yang dilakukan
Javara di Mustika
Jaya Bekasi.**

JAVARA





lawyer tetapi market yang adil dan *respectful*.”

Perjalanan Javara dimulai pada 2008. Helianti, yang juga hobi masak, paham betul bahwa rempah, sayur, herba, dan beraneka bahan makanan dari Indonesia sangat layak menyebar ke seluruh dunia. “Gua ‘kan *foodies*, udah keliling ke 40 negara, jadi tahu banget makanan enak di berbagai tempat. Bahan-bahan dari negara kita sudah pasti cocok,” katanya. Tumbuh besar di desa di kawasan Ijen, Jawa Timur, empat jam dari kota terdekat, Helianti terbiasa mengolah tanaman lokal, termasuk yang disepelekan dan dianggap liar seperti krokot, luntas, daun cocor bebek, dan lainnya, sebagai bahan makanan. “Terpaksa, Mbak. Kalau nggak gitu, mana bisa *survive* dan terus dapat pasokan makanan penuh gizi?”

Heli membuka inisiatif menyambungkan rantai pasok, dari petani ke pasar nasional dan internasional. Awalnya, dia menggunakan payung yayasan. Namun, perusahaan relasi tak ada yang menyambut yayasan. “Mereka meragukan keseriusan kami. Bukankah yayasan biasanya *project based*, kurang bisa diandalkan konsistensinya, dan tergantung pada donor? Lalu, bagaimana dengan prospek keberlanjutan bisnis?” katanya.

Segera Heli membentuk badan usaha, PT Kampung Kearifan Indonesia. Baru setelah terbentuk badan usaha, penawaran Helianti dkk. ditanggapi dengan serius. “Perusahaan yang sama membeli semua stok yang kami tawarkan,” kata Heli. “Padahal, barang yang kami jual sama persis dengan yang kami tawarkan dengan bendera yayasan.”

Kini, lima belas tahun perjalanan Javara, kapal sudah jauh berkembang. Sedikitnya 500 produk lokal, unggul-

an dari tanah di seluruh sudut negeri, yang dikembangkan dan dipasarkan Javara. Mulai dari berbagai varian beras, kacang-kacangan, coklat, kopi, gula aren, minyak kelapa, mi daun kelor, sampai garam dari pelepah nipah. Sebagian ada yang masih taraf *piloting*, eksperimen, yang diproduksi skala kecil dalam kerangka riset dan pengembangan, terutama untuk menjajaki dan mengukur daya serap pasar.

Heli menyebut produk eksperimen ini sebagai tahap “lucu-lucuan”, artinya belum mencapai tahap skala ekonomi. “Buat yang masih lucu-lucuan kayak gini, kami produksi dalam kemasan kecil untuk suvenir. Bisa juga kita pasok buat *amenities* hotel butik di Bali,” kata Heli. Jurus lainnya, adalah masuk dalam jejaring para *chef* restoran dan hotel terkemuka. Para *chef*, menurut Heli, adalah komunitas yang selalu mencari inovasi *ingredients* lokal. “Kalau andaliman segar, yang baru dipetik dari kebun, kita bisa tawarkan ke *chef* di hotel bintang lima di Jakarta. Mereka langsung ambil,” kata Heli. “Toko Javara di Kemang, Jakarta Selatan, adalah etalase buat produk lucu-lucuan ini, yang unik, baru, dan belum dipasarkan secara luas.”

Tim Javara juga dilengkapi dengan R&D yang kuat, yang terdiri atas ahli pangan, ahli teknologi pengelolaan pangan, sampai ahli *branding* dan *marketing*. Karena itu, tak sedikit juga produk inovatif yang merambah pasar internasional. Produk spageti yang diperkaya dengan bubuk moringa atau daun kelor, misalnya, adalah hasil inovasi produk dan upaya membangun *brand* yang sangat intensif. Hasilnya, “Kami bisa mengekspor spageti kelor ini ke Italia dan punya pasar kuat di sepanjang Sicily,” kata Heli. “Kalau spageti Javara diterima di negeri pasta, itu

sama halnya kita dapat pengakuan kuat, bukan?”

Berbagai varian beras, beras merah, beras hitam, beras merah muda, juga beras putih dari beragam daerah, adalah juga produk unggulan Javara. Produk ini sudah dipasarkan luas melalui *outlet* supermarket di kota-kota besar. Padi-padian organik menjadi salah satu *flagship* Javara, dengan proses kurasi dan sertifikasi yang cukup mumpuni.

“Kami terinspirasi kerja Mbah Suko, almarhum, yang telaten merawat dan memuliakan padi-padi varietas kuno,” kata Heli. Mbah Suko, meninggal pada 2011, adalah petani yang tinggal di Desa Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Semasa hidupnya Mbah Suko menanam puluhan jenis padi lokal bersama komunitas petani di sekitar. Di zaman Orde Baru, Mbah Suko mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk. Dia dicap sebagai anggota OT (organisasi terlarang), menentang repelita (rencana pembangunan lima tahun), tidak boleh ikut pemilu, dan lain sebagainya.

Mbah Suko bergeming. Dia terus bergerak menanam padi lokal, tanpa pupuk dan pestisida kimia. Sedikitnya terkumpul 35 jenis padi lokal yang dirawat Mbah Suko, antara lain rojo lele, ketan kuthuk, kenongo, rening, menthik wangi, menthik susu, gethok, leri, papah aren, berlian, tri pandang sari, dan si buyung. Setelah Soeharto lengser, 1998, gerakan Mbah Suko meluas ke berbagai wilayah. Pada 2001, Mbah Suko dianugerahi Kehati Award dan menjadi simbol kedaulatan pangan bagi petani.

Jalan terjal yang ditempuh Mbah Suko adalah jalan restoratif. “Yang dilakukan, *kan*, intinya adalah menyembuhkan bumi,” kata Rezal Kusumaatmadja, konsul-



Gerai tempat menjual hasil pertanian Javara Indonesia.

JAVARA

tan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM). Menyembuhkan bumi yang sudah telanjur tercemar pupuk kimia dan pestisida. Akibat penggunaan senyawa kimia, ekosistem perlahan sekarat. Tanah tak lagi gembur, ulat-ulat dan mikroba menjauh, begitu pula dengan berbagai spesies burung. Pertanian organik berusaha membalikkan situasi tersebut. Tanah digemburkan kembali, pupuk kompos demi menyuburkan kembali ulat dan mikroba, sekaligus mengundang burung dan serangga bergotong-royong menyerbuk putik bunga. “Kalau tanahnya sembuh, otomatis produk tanaman jadi maksimal,” kata Rezal.

Rezal melanjutkan, jurus yang diambil Helianti melalui Javara adalah wujud ekonomi restoratif. Tiga pilar utama yang menjadi syarat ekonomi restoratif, yakni mencari keseimbangan antara keuntungan finansial ekonomi, kesejahteraan masyarakat lokal serta *indigenous people*, dan melindungi lingkungan. “Ekonomi restoratif itu bukan hanya memberi keuntungan finansial, tetapi juga *reclaim* atau meraih kembali *dignity*, martabat, petani dan masyarakat yang terlibat,” kata Rezal. “Melihat wajah Heli, wajah tim Javara, dan wajah para petani terlibat, semuanya cerah penuh semangat. Ada aura *dignity* yang tak bisa disembunyikan, yang muncul dari upaya ekonomi restoratif ini.”

Tahun 2017, Javara melebarkan sayap. “Kami bikin Sekolah Seniman Pangan,” kata Helianti. “Karena kita membutuhkan *entrepreneur* pangan di berbagai wilayah.” Lulusan sekolah inilah, kini mencapai 2.000 orang, yang diharapkan menjadi dinamisator ekonomi restoratif di desa-desa. Mereka yang menjadi peserta dijaring dari desa dan komunitas, berdasar observasi dan usulan dari ba-

wah. “Kami menetapkan kriteria *local champion* yang bisa jadi peserta. Misalnya, yang paling rajin ikut kerja bakti, yang jadi kader posyandu, yang rajin nemenin ibu-ibu bikin dapur umum, mereka ini adalah motor lokal yang kami ajak ikut serta,” kata Heli.

Selama enam bulan, partisipan tinggal di Javara Garden, di Bekasi, dan mengelola 1.000 meter persegi lahan. “Bisa ditanami apa pun, herba, sayur, buah, apa pun,” kata Heli, “Tanaman bisa disesuaikan dengan potensi lokal di desa masing-masing, supaya muncul imajinasi pengembangan produk, dari kebun ke meja makan.” Kurikulum sekolah ini tak hanya tentang teknik bertanam, tetapi juga pengembangan teknik kuliner, plus teknik branding dan marketing. Paket komplet.

Salah satu dampak nyatanya terlihat pada alumni pertama dari Sekolah Seniman Pangan yang berasal dari Flores. Namanya Nando. Semua ilmu yang didapat dari sekolah ini diturunkan kepada komunitas lokal beranggota ratusan orang di tempat dia tinggal. Dia bahkan membuat berbagai macam produk pangan yang dikembangkan menjadi sebuah kafe. *Local champion* seperti inilah yang harapannya dapat menyebarkan ilmu baik dari Sekolah Seniman Pangan dan pastinya membumikan ekonomi restoratif di area rural.

Helianti berharap, para seniman pangan itu yang membantu menguatkan sinyal yang telah dirintis Javara. Agar nyala ekonomi restoratif, agar tanah dan ekosistem yang disembuhkan kian meluas. Agar lebih banyak lagi petani dan masyarakat lokal yang tersenyum penuh martabat. ●

Java Kirana, Bermula dari Satu Petani Saja

K

ECINTAAN kepada kopi dan empati terhadap nasib petaninya menjadi alasan bagi pendirian Java Kirana. Tapi perkembangannya hingga saat ini, empat tahun setelah memulai operasionalnya secara resmi, hanya mungkin dicapai berkat kesabaran dan ketekunan.

Noverian Aditya dan Nabila Azraini sebenarnya merintis bisnisnya sejak 2016. Kala itu mereka masih melakukannya sebagai sambilan, walau dengan *passion* yang bukan sambilan. Mereka mendampingi petani di area perkebunan kopi di kawasan Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor. “Membantu petani (kopi) untuk bisa langsung menjual ke pembeli, tanpa melalui perantara,” kata Noverian.

Semula mereka hanya bisa mendapat kepercayaan dari seorang petani. Sebut saja namanya Djun. Menurut Noverian, hanya Djun yang mau menuruti saran demi memperbaiki kualitas hasil panennya “sampai ke titik, kalau saya bilang, ‘Pak, kasih pupuk dua kilo, dia beneran *nimbang* dulu pupuknya””.

Mereka kemudian diperkuat Chandra Hendriawan, yang memang menyukai kegiatan bertani. Di hilir usaha kopi, menurut Noverian, Chandra yang paling mengerti hal ihwal kopi dari mulai menanam sampai panen. Noverian berfokus pada urusan bisnis secara umum, menjualkan ke klien-klien yang ada, dan penyangraian biji kopi supaya siap seduh; sedangkan Nabila mengurus segala hal pascapanen.

Sejak awal itu pula mereka memikirkan betul apa yang dapat mereka sumbangkan terhadap kelestarian lingkungan. Bagi Noverian, hal ini menjadi aspek yang dia hadapi saat masih bekerja di sebuah perusahaan lokapasar (*marketplace*). Dia bertugas di bagian yang mengurus aspek ESG atau *environment, social and governance*, yakni ketaatan perusahaan dalam mempertimbangkan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola pada setiap keputusan bisnis.

Isu-isu itu yang lalu menjadi dasar bagi Noverian dan kawan-kawan untuk bertekad menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Tata kelola harus baik, emisi karbon harus berkurang, dan petani juga harus semakin sejahtera.

Dari sekadar membantu promosi, supaya harga yang diterima petani layak, perlahan-lahan mereka ikut pula memikirkan hal-hal lain. Sebelum mereka melibatkan diri, petani hanya menerima , harga Rp 45 ribu per kilogram, padahal tengkulak menjual di pasar sampai Rp 85 ribu. Hampir dua kali lipatnya.

Setelah menjalankan peran yang lebih dari sekadar mempromosikan, mereka pun memperoleh kepercayaan

petani. Pada 2017 hasil panen Pak Djun mereka ikutkan di Kontes Kopi Specialty Indonesia yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Kopi Pak Djun menang.

Dari prestasi itu Noverian dan kawan-kawan dipercaya Dinas Perkebunan Jawa Barat untuk memanfaatkan lahan Perhutani, yang dialokasikan untuk program kehutanan sosial. Luas lahan ini 11 hektare. “Tujuannya...mereka pingin kami bikin efek *snowballing*, dari apa yang Java Kirana telah capai,” kata Noverian.

Di lahan itulah mereka kemudian membikin demplot. Di situ mereka mencoba menanam kopi dengan bermacam-macam metode. Maksudnya, dengan begitu, mereka juga sekaligus belajar, petani begitu pula.

Satu hal yang, pada saat bersamaan, dicari tahu jalan keluarnya adalah persoalan pupuk. Sejak awal Java Kirana berkomitmen menggunakan pupuk organik saja. Hal ini didukung Bupati Bogor kala itu. Kenapa sepenuhnya organik? Sebab harga pupuk terus melambung. Banyak petani yang tak sanggup membelinya. Pupuk kompos adalah pilihannya.

Tersebab oleh itulah mereka berupaya, melalui riset, mencari cara membuat pupuk yang efektif. Mereka beruntung mendapat uluran tangan sebuah produsen pupuk yang baik, cocok untuk tanaman kopi.

Hingga saat itu mereka harus merelakan dana tabung-an masing-masing untuk membiayai apa yang mereka kerjakan. Beli pupuk, misalnya. Juga menanam kopi sendiri sejak 2018. “Beda dengan teman-teman kami, yang nabungnya di saham,” kata Noverian.

Pada 2022, mereka untuk pertama kalinya memanen



Petani kopi menyangrai kopi hasil panennya di Koperasi Desa Mentabah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Para petani di sana menanam kopi di hutan desa yang dikelola bersama-sama.

FOREST DIGEST



Bibit pohon kopi yang ditanam sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

FOREST DIGEST

hasil dari tanaman sendiri. Hal ini menggenapi keberhasilan mereka: merangkul lebih banyak petani, dari satu menjadi empat, enam, delapan, dan saat ini telah mencapai 80 orang. Luas lahan yang bernaung di bawah binaan mereka 120 hektare.

Setelah melihat pelajaran bagi dunia bisnis pada masa pandemi, 2019, ketika banyak pemutusan hubungan kerja, mereka merasa punya motivasi untuk sekaligus membangun perusahaan, membuka lapangan kerja, *green jobs*—betapapun masih kecil. Dipercaya beberapa investor, mereka mengarahkan Java Kirana sekaligus membikin pabrik pengolahan biji kopi.

Kenapa *green jobs*? “Karena sebenarnya kita ini negara agraris, juga maritim, jadi kayaknya tidak kekurangan sumber daya alam sama sekali, tapi kenapa yang dilihat hanya sumber daya mineral, yang ditambang dan dieks-

Pada 2022, mereka untuk pertama kalinya memanen hasil dari tanaman sendiri. Hal ini menggenapi keberhasilan mereka: merangkul lebih banyak petani, dari satu menjadi empat, enam, delapan, dan saat ini telah mencapai 80 orang.

traksi. Jadi petani sebenarnya ada duitnya, kok. Banyak petani yang bahkan mobilnya Pajero,” kata Noverian.

Pada Juni 2023, Java Kirana ikut menjadi peserta di Festival Lestari 5 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pesta tahunan bagi para pelaku ekonomi “hijau” atau bisnis lestari ini diselenggarakan Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Keikutsertaan Java Kirana merupakan kelanjutan dari perkenalan Noverian dengan Rama Manusama, *co-founder* Katalys Partners, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM).

Keberadaan Java Kirana dalam KEM rupanya dipandang penting. Apa yang dijalankannya ditetapkan sebagai *pilot project*, percontohan, bagaimana bisnis, khususnya di sektor agrikultur, yang bersifat restoratif, regeneratif, dan distributif bisa dibuat dan dikelola secara baik. “Cukup bangga, sih. Harapan kami semua bisa kayak gini,” kata Noverian.

Sementara masih menunggu jam itu, mereka sudah berencana meluaskan jangkauan operasi Java Kirana. •

Alam Siak Lestari, Mengolah Ikan Gabus demi Gambut

SEMULA didirikan bukan dari niat untuk berbisnis, PT Alam Siak Lestari pada akhirnya juga harus memikirkan bagaimana produksinya laku dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk itu, mau tak mau perlu ada upaya yang memang lazim dalam bisnis.

Dengan kata lain, pengelolaan perusahaan harus dijalankan dengan cara-cara sebagaimana yang berlaku di dunia usaha. “Sejak awal pun telah dipikirkan siapa yang menjalankannya, ke mana keuntungannya disalurkan, siapa yang mendapat manfaat paling banyak,” kata Musrahmad Igun, Chief Executive Officer Alam Siak Lestari. “Itu termasuk pula bagaimana bikin *impact report*-nya.”

Resep-resep yang diperlukan agar perusahaan bisa tetap hidup itu sangat perlu. Sebab keberadaan Alam Siak Lestari, bagaimanapun, tetap berhubungan dengan jalan keluar yang paling mungkin untuk memulihkan lahan gambut, yang merupakan 57 persen dari luas wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dari akibat kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestariannya. Jalan keluar itu: membudidayakan ikan gabus di lahan gambut. Dengan begitulah lahan gambut bisa tetap basah—dan karenanya mencegah kebakaran.

Selain tempat bergantung manusia dalam memperoleh makanan, air bersih, dan berbagai manfaat lain, lahan gambut bermanfaat untuk mencegah kekeringan, banjir, dan pencampuran air asin untuk irigasi di area pertanian. Karena menyimpan dan menyerap karbon, dalam jumlah lebih banyak ketimbang hutan, lahan gambut juga berfungsi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Untuk melibatkan berbagai pihak, karena kepentingan yang sama mengenai lahan gambut yang lestari, modal terdiri atas swasta, organisasi masyarakat, dan kelompok anak muda. Organisasi masyarakat diwakili badan usaha milik desa (BUMDes). Adanya kedua kelompok masyarakat itu, dengan 15 persen saham, menurut Musrahmad, untuk “memastikan bahwa masyarakat Siak menjadi pemegang saham di perusahaan ini”.

Tahun pertama setelah urusan pendirian perusahaan selesai, sambil menunggu perizinan keluar, dilalui terutama dengan melakukan riset. Hal ini didorong kebutuhan untuk mencari produk turunan dari ikan gabus yang nilai tambahnya lebih tinggi, juga komoditas apa saja yang berpotensi di ekosistem gambut. Untuk ikan gabus, mereka mendapati produk itu adalah albumin.

Albumin adalah protein di plasma darah yang berfungsi menjaga cairan di dalam darah agar tidak masuk ke jaringan lain. Selain itu, protein ini membantu membawa beraneka macam zat, seperti hormon, vitamin, dan enzim, ke seluruh tubuh. Pemanfaatan albumin dalam kehidupan sehari-hari di antaranya untuk produk-produk kecantikan, kesehatan, dan pangan.





Proses pengolahan ikan gabus hasil panen. Oleh PT Alam Siak Lestari, ikan itu diternak di dalam kolam gambut yang banyak terdapat di kawasan itu.

DOK. ALAM SIAK LESTARI

Musrahmad menjelaskan, untuk memastikan pasokan ikan gabus lancar, perusahaan yang dipimpinnya sementara ini belum dapat mengandalkan panennya sendiri. Alam Siak Lestari juga mendekati nelayan-nelayan tangkap. “Kami membikin jaringan *supplier*,” katanya.

Menurut Musrahmad, jaringan itu hanya dapat berfungsi baik, memenuhi kelancaran dan mutu pasokan, kalau pengetahuan dan keterampilan nelayan memang mendukung. Itu sebabnya ada kegiatan edukasi ke desa-desa. Kepada nelayan diajarkan bagaimana menjaga permukaan air di lahan gambut. Pada saat yang sama, jika telah bisa dibuat kerja sama, diaturlah kebutuhan pasokan yang bisa diambil dalam jangka waktu tertentu.

Proses pendekatan untuk itu tidak mudah. Pertama, lokasi yang berbeda-beda, tersebar. Kedua, kata Musrahmad, “harus banyak ngobrol-ngobrol dulu”, bisa dengan nelayannya, bisa pula dengan kepala desanya.

Sebelum sampai ke sana, mulanya Alam Siak Lestari memetakan dulu desa-desa yang berisiko menghadapi kebakaran hutan tapi punya potensi di lahan gambutnya. Pendekatan dilakukan sesudahnya. Hambatannya: ikan gabus bukan jenis ikan yang dibudidayakan masyarakat. “Saat ini kami bekerja sama dengan empat desa,” katanya.

Untuk memproduksi albumin, Alam Siak Lestari memiliki laboratorium sendiri. Laboratorium ini dibangun sejak perusahaan mula beroperasi. Staf yang menjalankannya adalah warga Siak, anak-anak muda. Ada tak kurang dari 14 orang. Mereka menjadi bagian dari karyawan perusahaan yang semuanya merupakan warga setempat.

Setelah berjalan dua tahun, Alam Siak Lestari telah

teratur menghasilkan albumin. Penjualannya sementara ini masih di lingkup Provinsi Riau. Mereka yang berminat membelinya dari mana saja bisa melakukannya secara daring (*online*).

Produk itu sempat mendapatkan penghargaan internasional dari Massachusetts Institute of Technology. Alam Siak Lestari menyertakan produknya dalam MIT Solve Challenge 2021, kompetisi tahunan untuk mencari organisasi/perusahaan berbasis teknologi terbaik yang memberikan solusi terhadap tantangan global. Penghargaan International MIT Solver Team untuk kategori Resilient Ecosystem ini didapat setelah menyisihkan pesaing-pesaingnya.

Tetapi, untuk langkah selanjutnya, bagaimana memasarkan produknya secara lebih luas, juga mengenkannya kepada masyarakat, merupakan tantangan yang masih harus dihadapi Alam Siak Lestari. “Kami berhadapan dengan industri-industri besar, yang punya kemampuan *marketing* luar biasa,” kata Musrahmad.

Yang juga masih menuntut solusi adalah bahan baku. Hal ini berkaitan dengan masih sedikitnya desa yang bisa diajak bekerja sama. Menangkap dari alam sebanyak-banyaknya bukan opsi yang sesuai dengan tujuan perlindungan alam.

Meski demikian, Musrahmad optimistis, terutama dari aspek budidaya, karena semakin banyak yang memahami konsep dan caranya—kenapa ia penting dan sebagainya. Sebagai gerakan, hal ini bakal berguna untuk mencapai tujuan pemulihan dan penjagaan lahan gambut. ●

Conservana dan Pertanian Cerdas Iklimnya

DI satu lokasi di Ketewel, Gianyar, Bali, di pabrik milik Conservana Spices, aroma kopi yang berbaur dengan aroma *essential oil* atau minyak atsiri menguar menyambut siapa saja yang datang. Di bangunan yang baru dua bulan berdiri, per Oktober lalu, ini Conservana mengolah dan menghasilkan produk-produknya berupa vanili, kopi, minyak atsiri, dan lilin berbahan lemak dari lebah. Bagi Conservana, ini bukan bisnis biasa.

I Made Setiawan, bersama I Ketut Maliawan, membentuk Conservana pada 2018 dengan cita-cita besar untuk “memulihkan dan melestarikan hutan di Indonesia serta memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya”. Untuk mencapainya Conservana berupaya menghidupkan lagi budaya berkebun di hutan dengan cara tradisional dan memperluas apa yang disebutnya “pertanian cerdas iklim”.

Melalui Conservana, dengan strategi tersebut, doktor kesehatan masyarakat yang kini mengajar di University of Oxford, Inggris, itu percaya ekosistem hutan bisa dijaga, habitat satwa liar bisa dilindungi, dan dampak krisis iklim bisa dikurangi.

Keyakinan itu, juga jejaring I Made Setiawan serta I Ketut Maliawan, yang bertindak sebagai Chief Executive Officer Conservana, mempertemukan Conservana dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Amerta dari Dusun Yeh Buah, Desa Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Ikut berperan dalam hal itu: Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Bali Barat Agus Sugiarto, yang sudah dikenal lama oleh I Ketut Maliawan. Agus bukan orang asing di antara 121 orang anggota KTH Giri Amerta; dia, di samping pemerintah Desa Yeh Embang Kauh, ikut membantu ketika kelompok ini dibentuk, juga pada 2018.

Komunikasi dengan Conservana berlangsung beberapa waktu; sempat ada sejumlah pertemuan. “Awalnya kami tahu mereka bermain vanili dan mereka mau menampung hasil kebun kami,” kata I Made Sudjana, biasa dipanggil Pak Mangku, seorang anggota KTH Giri Amerta.

Kesimpulan dari pembicaraan di antara ke dua pihak: mereka sefrekuensi menyangkut pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan nonkayu, dan bagaimana petani hutan dapat menaikkan tingkat kesejahteraannya. Mereka bersepakat menjalin kerja sama, bermitra. Dalam kerja sama ini Conservana bertindak sebagai pembeli komoditas yang dihasilkan petani KTH Giri Amerta (belakangan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Giri Amerta, setelah izin pembentukannya keluar pada 2021), juga menyarankan penanaman komoditas lain yang berpotensi di pasar, sementara petani menjadi pemasok dan, dengan dukungan Conservana, memastikan kelestarian hutan tetap dijaga.



Aktivitas Conservana dalam melakukan pertanian dan perkebunan.

CONSERVANA

Pemeliharaan hutan oleh masyarakat di kawasan itu sebetulnya telah berlangsung lama. Petani setempat, khususnya warga Dusun Yeh Buah, mulai masuk hutan dan berkebun di dalamnya sejak sebelum 2008. Kala itu mereka menyepakati tidak akan bercocok tanam di blok inti hutan—yang statusnya adalah hutan lindung. Mereka membuat batas yang tegas.

I Made Sudjana, yang sejak 2021 menjadi Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Giri Amerta, bercerita warga kala itu menentukan lokasi kebun dengan mengundi lahan seluas 304 hektare yang telah dipetak-petak sesuai jumlah anggota kelompok tani. Sesudahnya mereka mengadakan upacara adat di batas antara hutan inti dan hutan yang dikelola warga. Hal ini dilakukan untuk mempertegas komitmen, mengikat secara adat, bahwa pengelolaan hutan dan kebun di dalamnya dilakukan tanpa menebang pohon.

Di ketinggian lebih kurang 450 meter di atas permukaan laut, setengah jam perjalanan dengan sepeda motor dari dusun, I Made Sudjana menunjukkan bidang lahan garapannya. Tutupan hutan di sini tidak rapat. Tapi tidak terlihat permukaan lahan yang gersang. Kontur tanahnya berbukit-bukit. Seperti petani yang lain, dia memperoleh jatah 2,5 hektare. Kini dia menanam vanili, kopi, duren, juga beberapa tanaman herbal.

Sejauh ini belum ada yang melanggar kesepakatan tersebut. Hutan yang dikelola KTH Giri Amerta—dengan pola tanam polikultur: vanili, pisang, kopi, coklat, termasuk pohon flora endemik lokal—kerap menjadi tujuan kunjungan berbagai kelompok masyarakat. Pada



Seorang pekerja di Conservana menunjukkan hasil panen vanili yang dikelolanya.

CONSERVANA

2022, atas undangan Conservana, peneliti dari University of Oxford, Inggris, melakukan riset ekologi di kawasan hutan.

Kemitraan dengan Conservana bukan saja membuka peluang penanaman komoditas yang nilainya tinggi dan memungkinkan para petani memperoleh harga yang lebih baik, merujuk harga di pasar internasional, melainkan juga kepastian bahwa komoditas yang dihasilkannya pasti dibeli.

“Mereka cukup memikirkan bagaimana tanaman-tanaman yang ada tumbuh dengan baik dan panen, secara bergantian, dengan baik pula,” kata I Ketut Maliawan.

Mengenai rujukan harga internasional, itu ada kaitannya dengan pasar yang dituju Conservana, khususnya untuk vanili. Melalui mitra Conservana, ada pembeli di Ing-

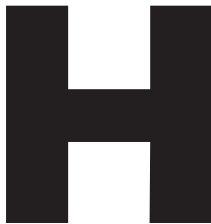
gris dan beberapa negara Eropa. Tidak mudah menembus pasar di negara-negara itu, yang meneliti dengan saksama ketaatan terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola. Conservana punya satu cara yang jitu. “Kami ajak mereka datang ke sini dan melihat langsung,” kata I Ketut Maliawan.

Kini, dengan pabrik baru, Conservana siap merespons pasar yang terus tumbuh. Vanili yang telah diproses dan dikemas, khususnya, merupakan bahan untuk industri makanan dan minuman. Masuknya Swadaya-Pandegha, perusahaan yang menawarkan platform gotong royong pendanaan dan keahlian di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang berwawasan lingkungan dan sosial, memungkinkan penggunaan fasilitas baru untuk pemrosesan. Mesin berkapasitas 1,5 ton ini—untuk pelayuan dan pengeringan—melipatkan kemampuan pemrosesan Conservana. Sebelumnya kapasitas Conservana sekitar 350 kilogram.

“Kami tertarik dengan apa yang dilakukan Conservana. Dan kebetulan kami pernah bekerja sama dengan Pak Made,” kata Muhammad Syirazi dari Swadaya-Pandegha.

Berada di lahan seluas lebih kurang 3.000 meter persegi di pinggir Gianyar, fasilitas pabrik baru itu menampung sekitar 11 pegawai. Ruang-ruang di bangunan yang dirancang mengelilingi sebuah area terbuka—tempat pengeringan vanili—ini dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda dalam proses produksi Conservana. Di sinilah, sejak Agustus lalu, Syirazi mencurahkan lebih banyak waktunya untuk ikut mengemudikan bisnis Conservana—bisnis yang tidak biasa. ●

Yang Terpadu di Bumi Langit



ARAPAN terbit di lereng timur perbukitan Imogiri, Bantul. Kawasan yang dikenal dengan musim kemarau yang panjang menggigit. Tanahnya unik, berlapis-lapis karst tandus. Di sinilah Bumi Langit Permaculture Institute menunjukkan hubungan yang saling memulihkan antara manusia dan alam.

Bumi Langit Permaculture Institute bermula dari pencarian jiwa seorang Iskandar Waworuntu, 70 tahun, sang pemilik yang pernah membuka kafe di Bali. Observasi Iskandar di berbagai tempat mendapati bahwa berbagai persoalan dan penyakit timbul lantaran hubungan yang timpang antara alam dan manusia. Hubungan yang timpang inilah yang, menurut dia dalam sebuah wawancara, membuat kita mengalami berbagai krisis.

Imogiri yang tandus pun, menurut Iskandar, merupakan hasil dari relasi yang timpang. Lebih dari setengah



Tiga pekerja sedang menyiapkan makanan di Warung Bumi Langit Resto, Mangunan, Imogiri, Yogyakarta. Restoran ini membuat hidangan menggunakan produk-produk yang sebagian besar ditanam di lingkungan sekitar.

OKA HAMIED

abad manusia memangkas gunung yang penuh kelokan, tanah padas, menjadi lahan pertanian yang lurus. Kontur tanah berubah drastis. Belum lagi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. “Tanah jadi kehilangan jalur silaturahmi dengan sumber air alami. Miskin unsur hara. Struktur tanahnya pun turun,” kata Iskandar. Akibatnya, air menumpuk di satu titik sehingga gampang mengundang longsor. Tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan terbatas pada jenis kacang tanah dan ketela.

Pada 2006, perjalanan Bumi Langit bermula. Iskandar berusaha memulihkan hubungan mutual antara manusia dan alam lingkungannya. Sejengkal demi sejengkal, tanah dipulihkan. Tanah tandus digemburkan dengan kompos. Pemulihan tanah inilah yang menjadi kunci menyehatkan ekosistem.

Perlahan ekosistem pulih. Beragam tanaman tumbuh. Serangga beraneka macam datang, menyerbuk bunga-bunga. Burung-burung singgah. Tiga hektare area Bumi Langit menjadi oase yang subur di tengah Imogiri yang panas. Penduduk di kampung sekitar pun terlibat dalam pengelolaan wilayah secara terpadu dan lestari dalam konsep permakultur.

Di Bumi Langit, penduduk sekitar terlibat menggerakkan Warung Bumi, yang seluruh bahannya diambil dari kebun. Pengunjung warung bisa leluasa menyaksikan cara menanam beraneka tanaman bahan makanan, mengolah makanan, dan utamanya cara hidup yang harmonis dengan alam. Konsep permakultur Bumi Langit memupuk rasa dan jiwa, merawat bumi, merawat kemanusiaan, dan berbagi pada semesta. ●

Yang Tumbuh Bersama Mama Bambu

M

ARI bertemu mama-mama bambu. Maria Dhiu, Rufina Moi, Hendrika Milo, Tilomena Ule, dan banyak lagi. Merekalah penggerak pemulihan ekosistem di desa-desa Flores. Bersama Yayasan Bambu Lestari, gerak mama-mama ini menandai geliat ekonomi restoratif dari timur Indonesia.

Bambu sesungguhnya adalah bagian dari hidup orang Flores. Kawasan ini dipenuhi rumpun bambu milik komunitas adat. Kerangka, dinding, lantai, rumah adat, semua terbuat dari bambu. Berbagai upacara adat, dari kelahiran sampai pemakaman, pun butuh bambu.

Sayangnya, kultur penyeragaman yang dibawa Orde Baru telah menggerus kekayaan lokal. Laju pembangunan tak peduli keberagaman budaya dan kondisi lokal. Kriteria orang miskin didefinisikan sebagai orang yang tinggal di rumah berlantai tanah dan berdinding bambu. Akibatnya, orang mulai meninggalkan bambu dan beralih ke lantai semen dan tembok bata.

Tunas-tunas bambu tak lagi tumbuh leluasa. Rumpun bambu, yang dulu ada puluhan jenis, mulai menyusut. Sumber-sumber air berkurang. Sawah kekeringan, bulir-bulir padi kosong tanpa isi. “Dulu, ambil air tak jauh dari



desa. Sekarang, kami harus berjalan jauh ke dalam hutan,” kata seorang mama yang kami jumpai.

Pada 2021, Yayasan Bambu Lestari (YBL) menggulirkan gerakan menanam bambu. Awalnya, mengajak para lelaki bergerak. Namun, gayung tak bersambut. Menanam bambu butuh waktu dan para lelaki tak sabar dengan proses.

YBL melihat peluang, yakni menggabungkan gerakan menanam bambu dengan insentif bantuan sosial. “Kuncinya, harus menggandeng mama-mama,” kata Monica Tanuhandaru, Ketua Yayasan Bambu. Bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), program pem-



Para wanita yang tergabung dalam Mama-Mama Bambu menciptakan peluang ekonomi sambil merawat lingkungannya.

ULET IFANSASTI

bibitan dan penanaman bambu diluncurkan. Setiap tunas bambu yang disemai di *polybag* dihargai Rp 2.500, yang diambil dari skema bantuan sosial.

Benar saja, gerakan tumbuh pesat dengan keterlibatan mama-mama. Kelompok perempuan yang melakukan pembibitan bambu menyebar luas di desa-desa di NTT. Setiap orang bisa menyemai dan

menanam 4.000-20.000 bibit; dan dana ditransfer langsung ke rekening mama-mama bambu. “Kami menangis, tak sangka tanam bambu bisa dapat uang untuk dapur, untuk sekolah anak dan cucu,” kata Maria Dhiu, 60 tahun.

Yayasan Bambu juga mengembangkan pabrik pengolahan bambu. Berbagai produk, misalnya papan (*timber*) dan sepeda bambu, digarap bersama komunitas lokal.

Tak hanya manfaat ekonomi, mama-mama berharap bambu-bambu yang disemai dan ditanam ini bisa membuat Bajawa lebih sejuk dan subur. Agar mata air pulih, dan mama-mama tak perlu berjalan berkilometer mencari air. Agar padi di sawah benar-benar berisi saat panen. ●

Pala, Koktel, Palapa

DENNIS Yonasa bisa saja tampak seperti seorang...musisi *heavy metal*: potongan rambutnya *buzz cut*, juga rajah beraneka motif menghiasi anggota badannya. Tapi, kontras dengan kesan itu, pria milenial ini menyimpan cerita tentang tumbuh-tumbuhan yang, kalau dia menuturkannya, bisa ajek mengalir selama pendengar betah menyimak. Pengalaman dengan tumbuh-tumbuhan ini menjadi bekalnya ketika dia mendirikan Palapa Hartara Loka, perusahaan penghasil minuman beralkohol dengan cita rasa lokal.

Dalam setahun terakhir, produk *artisanal* yang dia lahirkan, *nutmeg liqueur*, diam-diam telah beredar, mengumpulkan penggemar, di berbagai bar atau klub malam di Bali, basisnya saat ini, dan di Jakarta. Di samping keunikan cita rasa dan mutu, yang memungkinkan hal itu adalah jejaring yang dia rawat dengan telaten, terutama sejak meninggalkan dunia yang sebelumnya lama dia tekuni—dunia yang sama sekali berbeda.



Produk minuman beralkohol dengan bahan utama buah pala yang diproduksi Palapa Hartara Loka.

PALAPA NUSANTARA

Bertolak belakang memang bisa menjadi tema sentral mengenai keputusannya untuk menggeluti pembuatan minuman beralkohol yang memanfaatkan buah-buahan lokal. Pilihan jenis buah-buahan ini terhitung spesifik. Tapi tujuannya jelas: mengangkat kembali keberadaan buah-buahan itu; bersamaan, juga memperbaiki tingkat pendapatan petaninya. “Buah-buahan Indonesia ini lama diabaikan, walaupun bukan dilupakan,” katanya. Dunia baru yang dia terjuni itu diametral dengan profesinya sebelumnya, sebagai kreator *website*, *programmer*, konsultan teknologi informasi—dunia digitallah, pendek kata.

Perubahan drastis tersebut sebetulnya berlangsung tidak seketika. Ia bermula dari kegelisahan Dennis setelah lebih dari sedasawarsa bekerja di industri digital. Situasi kehidupan pribadi juga berperan dalam hal ini—dia gagal mendapatkan anak, lalu istrinya memilih meninggalkannya.

Untuk memelihara kelurusan pikiran, *healing*, kalau meminjam istilah terkini, Dennis sengaja menjauh dari keramaian Jakarta. Setiap kali kesempatan datang, dia pergi ke berbagai pulau di beberapa kawasan, menyelam, berserobok dengan orang-orang baru, masuk ke hutan, dan berkenalan dengan serta mempelajari aneka ragam tanaman yang tak bisa dijumpainya di Jakarta. “Saya sering pulang membawa tanaman yang saya coba pelihara di Jakarta,” katanya.

Sebagai tipe pribadi dengan kemampuan belajar mandiri, pengetahuan dan kecakapan yang dia dapat tentang tumbuh-tumbuhan itu sempat dia manfaatkan sebagai sumber penghasilan. Pada periode inilah, terutama ma-

nakala pandemi Covid-19 menghentikan kegiatan dan mengurung orang di rumah, dia mendapati kemungkinan untuk memproses buah pala (*nutmeg* dalam bahasa Inggris), yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia, menjadi minuman beralkohol.

“Teman saya di Bogor meminta tolong saya membantu memikirkan apa yang bisa dilakukan dengan limbah pala, daging buahnya yang tidak digunakan,” katanya.

Dennis memanfaatkannya sebagai bahan terpenting pembuatan minuman beralkohol, di samping markisa dan lemon, juga beberapa rempah-rempah. Dia mencampurkannya dengan arak Bali sebagai bahan dasar.

Dia mengategorikan minuman yang dihasilkannya sebagai *liqueur*. Dalam khasanah minuman beralkohol, *liqueur* adalah minuman yang merupakan campuran *spirit* atau minuman keras yang dibuat dari proses distilasi dengan gula, buah-buahan, herba, dan rempah-rempah.

Bisa dibilang apa yang Dennis lakukan merupakan yang pertama. Selama ini, sebagai produk minuman, buah pala hanya diproses menjadi jus atau sirup, bukan difermentasi—cara termudah menghasilkan minuman beralkohol.

Karena hal baru, Dennis harus bereksperimen demi menemukan formula atau resep yang pas. Dia bekerja secara sistematis dan teliti. Pengalamannya di industri digital memandunya untuk membikin catatan yang detail. Dia menuliskan resep yang dia coba di buku khusus. Catatan-catatan dengan tulisan tangan rapi ini bercampur dengan klipng bermacam-macam informasi.

Semula dia sempat memanfaatkan limbah pala dan fa-

silitas pengepresan milik temannya di Bogor. Misalnya, melalui perusahaan yang dia dirikan bersama Isaac Nelwan, temannya yang lain, pada 2021, dia sempat memasarkan produk dengan merek Pala Pala OG, Palapa La Koktel, La Kok Tel, dan Koktel. Tapi setelah yakin dengan apa yang bisa dia capai, juga menilai peluangnya, termasuk memastikan pasokan bahan baku, Dennis memilih menetap di Bali dan mengelola bisnis dari sana.

Di kediamannya di Pulau Dewata, di kawasan Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Denpasar, dia memperlihatkan tempatnya bekerja meracik resep *nutmeg liqueur* yang akhirnya dia pasarkan dengan merek Palapa. Di satu ruangan, dia menyimpan galon-galon plastik besar berisi stok arak Bali yang menunggu giliran diproses. Aromanya menguar di seantero rumah.

Secara bisnis, peluang jenis minuman beralkohol *artisanal* lokal seperti Palapa sangat terbuka. Konsumennya tumbuh, terutama di Bali dan kota-kota besar. Menyangkut Palapa, ada aspek perhatian terhadap keragaman potensi dan konservasi produk pertanian, limbah daging buah yang tidak digunakan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Inilah yang mengundang minat Katalys Partners, perusahaan yang berfokus pada investasi dalam bisnis yang berdampak terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, untuk ikut menyalurkan dana. Selain itu, tak kalah pentingnya, “Ada *historical significance* dari pala yang seolah-olah terlupakan,” kata Rama Manusama, salah seorang pendiri Katalys Partners.

Dalam “kepuustakaan” Dennis tentang buah-buahan, juga berbagai rempah-rempah, yang dilupakan, pala baru

Secara bisnis, peluang jenis minuman beralkohol *artisanal* lokal seperti Palapa sangat terbuka. Konsumennya tumbuh, terutama di Bali dan kota-kota besar. Menyangkut Palapa, ada aspek perhatian terhadap keragaman potensi dan konservasi produk pertanian, limbah daging buah yang tidak digunakan, dan peningkatan kesejahteraan petani.

satu contoh. Karenanya, seraya masih mengerahkan upaya untuk memasarkan minuman yang sudah dihasilkannya, Dennis mencoba kreasi lain. Misalnya, dia mengolah buni (atau di Jawa biasa disebut wuni) dan menjadikannya *wine*. Dalam obrolan dia juga menyebut tertarik dengan juwet (ada yang menamainya jamblang). Kelak entah apa lagi. “Kemungkinannya banyak; alam kita kaya,” katanya.

Mengingat hal itu, Dennis melihat perjalanannya di dunia baru ini masih panjang; masih banyak pula yang belum dilihatnya. Tapi dia mengaku lebih bersemangat menggeluti pekerjaan barunya. ●

#3

ENERGI DAN SEMANGAT DI KALANGAN GENERASI MUDA UNTUK MENGADOPSI EKONOMI RESTORATIF MENYEBAR DENGAN PASTI. PEMBUAT KEBIJAKAN PUNYA KESEMPATAN UNTUK MEMANFAATKAN LAJU ARUSNYA.





Pemetikan kopi
dilakukan oleh
petani binaan Java
Kirana di Cipanas,
Bogor, Jawa Barat.

JAVA KIRANA

Pijar Restoratif Kaum Milenial

DI satu sudut kawasan Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor, menjelang akhir 2016, Noverian Aditya rampung membuat belasan rorak. Lubang-lubang di tanah selebar 1 meter dan sedalam 1,5 meter itu digunakan untuk menumpuk dedaunan kering dan sampah kebun. Noverian memandang takjub hasil kerjanya. “Besok paginya saya tidak bisa bangun tidur. Sekujur badan dan pinggang saya rasanya patah,” katanya, mengengang.

Pengalaman “pertama kali pegang pacul” itu terpatri di ingatannya. Saat itu bersama sahabat karibnya, Nabila Azraini, dia memulai hal baru: menjalankan bisnis pengembangan kopi Arabika bersama petani di lereng Gunung Gede Pangrango. Noverian dan Nabila adalah teman sekolah menengah atas sekaligus *founder* Java Kirana. Bisnis mereka mengkombinasikan penerapan budidaya yang tepat, peran teknologi, dan tata kelola komoditas dengan standar baku mutu yang terjaga.

Sepintas bisnis mereka tidak berbeda dengan usaha kopi lainnya. Pembedanya terletak pada komitmen mereka untuk memastikan petani kopi adalah pelaku utama bisnis komoditas ini. Tanpa petani kopi tidak akan ada rantai pasok berikut tautan usaha *intangibile* lain yang

menjulang jauh ke tengah peradaban. “Jadi kami berbagi peran. Saya di manajemen, Nabila pada aspek budidaya,” kata Noverian. Mereka kemudian diperkuat Chandra Hendriawan.

Waktu memulai Java Kirana usia mereka belum 25 tahun. Mereka bermodalkan kegemaran akan kopi, pernah belajar serius tentang hal ihwal kopi dan menjadi barista, serta pengalaman bekerja di beberapa perusahaan.



ADA banyak langgam keterlibatan anak muda dalam gerakan ekonomi lestari, bisnis yang bersifat restoratif, regeneratif, dan distributif. Gerakan bisnis yang mengkomposisi devosi pada lingkungan dan sosial ini muncul dalam beragam bentuk. Seperti air, kaum milenial yang menjadi penggeraknya mengalir sesuai kontur medannya. Pembedanya ada pada proses masing-masing.

Di Ende, Nusa Tenggara Timur, Saniy Amalia Priscila memasukinya dengan pendekatan berbeda. Pada 2018 dia menggelar *bootcamp* untuk anak muda. Melalui acara itu, Saniy menggelorakan jiwa *entrepreneurship* bagi pemuda dan pemudi di Nusa Bunga. “Pembangunan tidak melulu bersifat *top down*. Dapat juga dilakukan dengan mendorong pengetahuan lokal masyarakat untuk berkiprah menuju pembangunan berkelanjutan,” ujar Saniy.

Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu mendapat inspirasi saat bergabung sebagai *volunteer* di Bandung. Programnya: Woman Earth Alliance, yang mendorong perempuan terlibat aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup. Dia tergugah. Gagasan untuk

memuliakan pun menjadi pendorong bagi Saniy, bersama Jana Broto dan Irma Sitompul, mendirikan Pratisara Bumi Foundation. Yayasan yang bermarkas di Denpasar ini memiliki platform Inkuri (Inkubator Usaha Lestari) dan Grassroot Accelerator.

Lembaga yang seluruh pengelolanya adalah perempuan milenial ini tidak lagi menggantung asap. Melalui Inkuri telah hadir beberapa usaha kreatif berkelanjutan. Di antara yang mereka bantu adalah Sukkha Citta dan Topiku.

Topiku dikembangkan dengan memikirkan pengelolaan bahan baku produk *baseball cap* yang dihasilkan sebagai realisasi dari konsep berkelanjutan. Usaha ini mampu berkembang pesat. Sementara Sukkha Citta membangun bisnis fesyen dengan konsep *farm to closet*. Dalam proses produksinya, seluruh material yang dipakai merupakan hasil pengembangan pertanian regeneratif. Selain itu, pengelola lahan pertanian yang memasok bahan bakunya adalah para perempuan desa.

Saniy dan kawan-kawan bertekad menumbuhkan bisnis serupa Sukkha Citta dan Topiku. “Ini bisnis model yang baik karena menyeimbangkan aspek lingkungan dan sosial sebagai alas keberlanjutan,” ujar Saniy.

Muhammad Syiraz punya pengalaman lain. Seperti banyak anak muda pada dekade pertama milenium ketiga, manakala teknologi komunikasi menghadirkan pesona, Syiraz juga terpikat. Pada 2012, mahasiswa Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung ini membuat *startup* khusus bagi pengguna travel dan wisata. Inisiatif itu tidak berlangsung lama dan rontok secara alami.

Kegemaran Syiraz pada aktivitas luar ruang mendo-



Para penggerak Pratisara Bumi Foundation, Saniy Amalia Priscila (kiri), Maria Agustin, dan Irma Sitompul. Bermarkas di Denpasar, lembaga ini memiliki platform Inkuri (Inkubator Usaha Lestari) dan Grassroot Accelerator.

PRATISARA BUMI FOUNDATION

rongnya untuk menginisiasi lembaga pelatihan bagi petani stroberi di Bandung. Dari interaksi dengan petani ini dia mengenal aspek “ketelanjuran”. Bertahun-tahun petani dibiarkan memikirkan sendiri persoalan lahan mereka. Tidak pernah ada intervensi terkait pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, kompetensi petani nyaris tidak berkembang selama setengah abad terakhir. Di mata Syiraz, ini adalah problem besar. Apa yang salah? Pertanyaan itu selalu bergaung di benaknya. Dia merasa dituntut untuk menemukan solusi, yang tak juga didapatnya hingga lembaga pelatihan itu bubar.

Pada 2019, ilmu planologi mengantarkan Syiraz berse-robok dengan dengan PT Rimba Makmur Utama, perusahaan yang bergiat di sektor perdagangan karbon. Perjumpaan itu membuka perspektif berbeda terkait bisnis. Dia jadi menyadari bahwa pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut urusan menjaga tegakan, tapi juga aspek lain yang saling berkait. “Ada isu global, *carbon dan climate change*, dan lokal, baik ekonomi dan sosial, yang terhubung dalam satu lokus,” katanya.

Dari rangkaian perjumpaan tersebut muncul pemahaman baru tentang konsep ekonomi restoratif. Bagi pemuda milenial seperti Syiraz, ini tantangan sekaligus peluang.

Dia pun tergerak untuk mendalami ragam ekonomi restoratif. Dia melahap pandangan-pandangan pakar di luar arus utama seperti Per Espen Stoknes, John Fullerton, hingga Kate Raworth yang mempopulerkan pendekatan ekonomi donat. Dia membuhulkan keyakinan bahwa konsepsi kegiatan ekonomi atau bisnis yang memper-



Pendiri Java Kirana, Noverian Aditya, Chandra Hendriawan, dan Nabila Azraini. Menjadikan petani kopi sebagai pelaku utama dalam bisnisnya.

JAVA KIRANA

hatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan masa depan sosial ekonomi masyarakat sangat mungkin diwujudkan.

“Dari pemahaman itu, saya jadi sadar ada isu sosial yang perlu diperhatikan juga,” kata Syiraz. Perilaku petani stroberi di Bandung, maupun yang dihadapi Noverian di Bogor, dapat dipahami.

Dari proses belajar tersebut, dia menguasai analisis perhitungan sosial hingga potensi karbon. Ini adalah hal-hal yang umumnya dianggap nonbisnis, sebagai aspek periferal, tapi dalam bayangan Syiraz justru menjadi soko-guru sebuah bisnis.

Jejak langkah Syiraz tidak berbeda dengan Rama Manusama. Pria lulusan Bisnis Administrasi Internasional di Erasmus University Rotterdam pada 2009 ini lebih dulu malang melintang di jagat bisnis pembiayaan. Mantan karyawan Royal Bank of Scotland di Amsterdam ini pada 2013 mendirikan Wikasa, sebuah *marketplace* bidang pendidikan. Dia juga mendirikan *Criticube* di Belanda sebelum kembali ke Indonesia. Puncaknya, Rama menjabat Head of Innovation & Strategy di MDI Ventures, anak perusahaan Telkom, pada 2016.

Dia mulai melirik gagasan tentang ekonomi keberlanjutan sebagai peluang besar bagi Indonesia. Ada banyak investor hijau mau masuk tapi terkendala model bisnis yang monoton dan “konservatif”. Salah satunya adalah aspek pemulihan dan pemeliharaan kondisi alam yang rusak. “Ada banyak kerusakan tanah yang berujung gagal panen dan berkorelasi dengan aspek ekonomi. Penggunaan bahan kimia, pupuk anorganik, rendahnya kemampuan petani, menjadi penyebab kerusakan,” katanya.

Ada banyak investor hijau mau masuk tapi terkendala model bisnis yang monoton dan “konservatif”. Salah satunya adalah aspek pemulihan dan pemeliharaan kondisi alam yang rusak.

Terpikat pada gagasan tentang *regenerative agriculture*, Rama banyak berpikir perihal upaya mengurangi material anorganik, teknik budidaya, hingga akses pasar. Perubahan sistemik ekosistem jadi kata kunci. “Bagaimana memastikan harga produk di pasar induk tetap bagus harus jadi pertimbangan,” katanya.

Pria kelahiran Jakarta pada 1986 ini bersemangat mengembangkan dan menumbuhkan ekosistem yang bisa berdampak melalui inovasi dan kemitraan strategis. Salah satunya dengan mendirikan Katalys Partners pada 2022. Lembaga ini menjadi *vehicle* penting penggerak komitmen keberlanjutan yang bertumpu pada *triple bottom line*—sosial, ekonomi, lingkungan. “Kalau kita sendiri tidak memahami potensi dan kapasitas kita, peluang pengembangan industri berkelanjutan jadi terhambat,” katanya.



BUKAN hal mudah bagi para milenial untuk mewujudkan gagasan bisnis yang berkelindan dengan aspek sosial dan pemeliharaan alam. Kompleksitas persoalan di lapangan adalah pengetahuan baru bagi mereka. Saat masih di bangku kuliah, mereka tak pernah membayang-

kan persoalan di tingkat tapak.

Java Kirana, umpamanya, mengalami kendala besar menyangkut kepercayaan petani. Noverian mengungkapkan kegagapannya menghadapi petani kopi yang justru menolak kontrak. “Kalau bapak mau, ya, sudah tebas saja waktu panen. *Gak* perlu pakai tanda tangan segala,” ujar Noverian menirukan kata-kata petani.

Ilmu ekonomi yang dimiliki Noverian tidak mampu memberikan solusi.

Saniy Amalia mengungkapkan hal serupa. Ketiadaan inkubator usaha mikro di daerah terjadi karena hilangnya *good will* para pihak. “Khususnya pemerintah daerah, baik dinas atau bahkan kepala daerah,” katanya. Ilmu yang diberikan kepada peserta *bootcamp* atau *workshop* khusus kerap menguap karena ketiadaan fasilitas pendukung. Akibatnya, urbanisasi terus terjadi bergelombang, karena hilangnya peluang pengembangan usaha di daerah.

Di Siak Sri Indrapura, ibu kota Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Musrahmad melihat pentingnya potensi setempat demi membuka kesempatan. “Kalau mau berkembang kita upayakan dulu hal itu,” kata Chief Executive Officer PT Alam Siak Lestari ini.

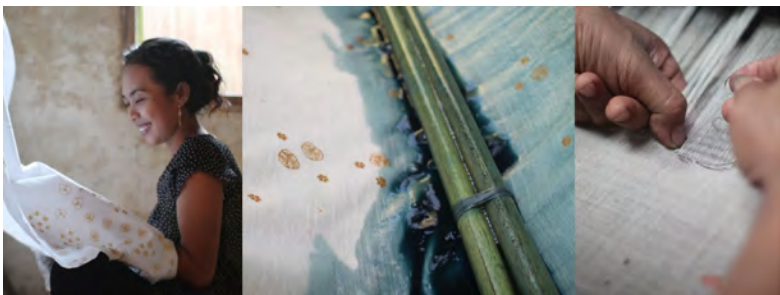
Karenanyalah dia memilih berkiprah di daerah kelahirannya. “Saya asli warga Siak. Saya paham benar perkembangan sosial budaya dan ekonomi yang terjadi,” katanya. Dia ikut mendirikan Alam Siak Lestari sebagai sarana untuk memastikan upaya merestorasi dan menjaga lahan gambut di Siak dapat melibatkan masyarakat, lewat budidaya ikan gabus. Penjagaan itu penting agar lahan gambut terhindar dari kebakaran.



Sukkha Citta salah satu yang kelahirannya dibidani Pratisara Bumi Foundation. Konsepnya membangun bisnis *fashion* dengan konsep *farm to closet*.

Pegiat dalam lembaga Inkuri (Inkubator Usaha Lestari) yang kebanyakan perempuan membangun konsep usaha kreatif berkelanjutan. Satu di antaranya adalah Topiku.

SUKKHA CITTA



Jika di Siak pola kerja restoratif sudah diterapkan, di Sintang ceritanya berbeda. Jauh di pedalaman Kalimantan Barat itu rintisan gerakan lokal yang serupa tengah dimulai.

“Saat ini sedang dimantapkan kelembagaannya, namanya Gemilang,” kata Restiana Purwaningrum.

Gemilang adalah akronim dari Gerak dari Mimpi untuk Lestarkan Sintang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengharapkan lembaga ini berkontribusi kepada penguatan usaha lestari setempat.

Sejak 2022, Resti dan beberapa anak muda Sintang kerap meriung dan berbagi gagasan soal bisnis keberlanjutan. “Inisiatif yang kami bayangkan adalah membangun wadah pengembangan kapasitas usaha kecil dan menengah. Semacam inkubator bisnis keberlanjutan,” Resti bercerita.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2016 itu melihat tingginya antusiasme anak muda Sintang terhadap kewirausahaan. Rencananya, Gemilang akan diposisikan sebagai *hub* dengan jejaring rantai pasok usaha kecil. Untuk itu, “Kami masih perlu belajar banyak terkait proses inkubator bisnis,” ujarnya.

Ada beragam problem pengelolaan usaha yang muncul dari praktik lapangan. Soal izin usaha bahan nonkayu dari hutan hingga penguatan pemasaran dan model logistik menjadi bahasan di Gemilang. Tidak mudah mencari solusi untuk semua hal itu di daerah seperti Sintang. Resti, yang juga menjadi aktivis WWF Indonesia, melihat kesenjangan ini berpotensi membatasi ruang gerak Gemilang.

“Pemda sudah cukup membantu dengan membagi jejaring bisnis di luar provinsi. Tapi penguatan kapasitas, jelas, harus jadi prioritas,” kata Resti.

Dia berharap Gemilang menjadi pemantik kesadaran tentang perlunya perhatian terhadap kondisi alam bagi usaha skala kecil. “Memang belum terlihat fungsinya,” kata Resti, “tapi kami optimistis inisiatif ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat, alam, dan ekonomi.”

Dengan potensi hutan yang melingkupi kawasan Kalimantan, inisiatif Gemilang boleh dibilang menjadi pijar gerakan ekonomi restoratif. Di samping isu sosial, kondisi sumber daya alam di Kalimantan membutuhkan kehadiran bukan saja Pemda Kabupaten Sintang, melainkan juga pihak lain seperti Koalisi Ekonomi Membumi. Perlu lebih banyak pijar sejenis.

Hal itu berlaku tidak hanya di Kalimantan, sebenarnya. Tapi juga di seantero negeri. Apalagi, mengutip konsultan keberlanjutan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Harry Seldadyo, “Kalau hanya diskusi, sudah terlalu sering dilakukan. Praktik riil di lapangan yang lebih diperlukan.”

Telah banyak anak muda terjun di lapangan. Dengan ruang gerak yang lebih leluasa, pemuda dengan kompetensi seperti Rama, Syiraz, dan lain-lain punya kesempatan menjadi pengubah paradigma bisnis. Dan boleh diharapkan akan ada lebih banyak Noverian, Nabila, Syiraz, Rama, Saniy, Igun, atau Resti yang lain.

Mereka akan menjadikan ekonomi restoratif atau bisnis keberlanjutan tidak sekedar pijar, tapi api yang terus menyala. ●

Dari Cap Orang Tua ke Cap Orang Muda

USAHA-USAHA yang diupayakan untuk dijalankan secara lestari telah bertumbuhan di Tanah Air. Mereknya dengan segera mencirikan para pendirinya, yang muda, berbeda dengan merek-merek di era sebelumnya. Berikut di antaranya, yang diolah dari laman ekonomimembumi.co.

PELALAWAN

PemPem
Sejak 2022

SIAK

Alam Siak Lestari
Sejak 2021

BENGKULU

Arconesia
Sejak 2021

BEKASI

CarbonEthics
Sejak 2019

DEPOK

Timurasa Indonesia
2017

DKI JAKARTA

Bumantala
Sejak 2020

Evo and Co.
Sejak 2016

GoodVibes
Sejak 2022

Kang Duren
Sejak 2019

klasspro.id
Sejak 2015

LindungiHutan.com
Sejak 2018

Little Joy Indonesia
Sejak 2021

Magalarva
Sejak 2017

MP Natural
Sejak 2018

Nasi Peda Pelangi
Sejak 2018

Normal Living
Sejak 2021

Oterra
Sejak 2021

PasarMIKRO
Sejak 2020

Plepah
Sejak 2019

Sampangn
Sejak 2019

Sustaination
Sejak 2018

BOGOR

Liberty Society
2019

Pandawa Agri Indonesia
2014

BANDUNG

Garden Bakery
Sejak 2009

Keju Lembang
Sejak 2015

Mycotech
2012

BANTUL

Jawa Classic
2014

SLEMAN

Herbalatte
Sejak 2016

TANGERANG SELATAN

Educourse.id
Sejak 2020

BAKU
Sejak 2019

Greenie
Sejak 2020

Greenpace
Sejak 2020

Its Buah
Sejak 2021

Kecipir
Sejak 2015

PONTIANAK

Arcia Oil
Sejak 2019

PALANGKA RAYA

HANDEP
Sejak 2019

PARIGI MOUTONG

Kaluku Food
Sejak 2019

SEMARANG

Briellnest
Sejak 2021

KEDIRI

Arrayana Honey
Sejak 2016

BALI

Arakbica
Sejak 2020

Bali Forages
Sejak 2021

Balini Organic
Sejak 2021

Djoin
2020

Griya Luhu
Sejak 2017

initempe Bali
Sejak 2016

Made Tea
Sejak 2015

Palapa Wine
Sejak 2021

Rosalie
Sejak 2019

Sebumi
2018

BANYUWANGI

**Kedelai Lokal
"Gunung Raung"**
Sejak 2014

Sirtanio
2011

PROBOLINGGO

**Shaany
Collagen Drink**
Sejak 2021

SURABAYA

Jamu Delicious
Sejak 2019

Ladang Lima
2010


SURAKARTA


Siaga Air Bersih
Sejak 2018

Automa ID
Sejak 2018


PARA PEMUNGKIN


 **Angin**
<https://www.angin.id>

 **ASYX Melati Nusantara**
<https://asyx.com>

 **EcoNusa**
<https://www.econusa.id>


 **Ecoxyztem**
<https://www.ecoxyztem.com>

 **INKURI**
<http://www.usahalestari.com>

 **Instellar**
<http://instellar.id>

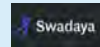
 **Local Enablers**
<https://www.thelocalenablers.id>

 **Pandegha**
<http://www.pandegha.id>

 **PLUS**
<https://usahasosial.com>

 **SIAP**
<http://socialinnovation.id>

 **Supernova**
<https://www.supernovaeco.com>

 **Swadaya**
<https://swadaya.id>

 **Teras Mitra**
<https://terasmitra.com>

Ingin mengetahui lebih jauh usaha mereka, pindai qrcode ini. Perlu koneksi internet:



DALAM pertemuan terbuka yang diselenggarakan satu saluran televisi berita Trevor Hill, seorang mahasiswa, mengajukan pertanyaan kritis kepada Nancy Pelosi, (kala itu, pada 2017) pemimpin partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pertanyaan ini menyebabkan *host* acara menyeletuk, “Oh, oh.”

Hill, yang baru dua tahun mengenyam masa kuliah, ingin tahu apakah Partai Demokrat, partai Pelosi, akan mengubah arah politik ekonominya untuk merespons perkembangan mutakhir. Dia mengutip hasil jajak pendapat Harvard University setahun sebelumnya yang memperlihatkan 51 persen warga Amerika antara usia 18 dan 29 tidak lagi mendukung kapitalisme. “Generasi muda,” katanya, “mulai bergeser ke kiri dalam isu ekonomi.... Saya ingin tahu apakah ada saatnya Anda merasa Demokrat bisa bergerak lebih jauh ke kiri ke arah pesan yang lebih populis....”

Pelosi tampak terenyak. Dia lekas-lekas menyembunyikannya dengan memasang senyum di wajahnya, lalu berkata, “Terima kasih untuk pertanyaannya, tapi maaf saya harus bilang kita ini kapitalis, dan begitulah adanya.”

Video rekaman momen itu pun viral. Hill sempat, misalnya, diwawancarai *TYT*, saluran opini berita progresif di *You-Tube* yang merupakan program utama TYT Network.

Di Indonesia survei atau penelitian serupa tentang persepsi negatif terhadap sistem ekonomi yang berlaku sejauh ini tidak dijumpai. Yang kerap dipublikasikan adalah persepsi terhadap performa ekonomi—sedang baik atau buruk.

Ada penelitian dan survei yang mungkin bisa membantu memberikan sekelumit gambaran. Pertama, penelitian Deve-

lopment Dialogue Asia bersama Communication for Change dan Kantar Indonesia pada 2021. Tidak secara spesifik dirancang untuk mendeteksi persepsi seperti itu, salah satu temuannya adalah responden—jumlahnya 3.490 orang, berusia antara 16-60 tahun dan dijarang di 34 provinsi—memandang deforestasi alias penggundulan hutan tidak jadi masalah selama menguntungkan secara ekonomi.

Jika pesimisme adalah kesan yang muncul dari temuan tersebut, survei Center for Law and Economics Studies (Celios) pada 2024 bisa menstimulasi timbulnya kesan sebaliknya, atau, sekurang-kurangnya, menangkal pesimisme itu. Secara spesifik, Celios bertanya apakah responden, yang dijarang di 31 provinsi secara daring dan jumlahnya 1.126 orang—usia di atas 18 tahun—pernah mendengar ekonomi restoratif dan manfaat-manfaatnya dalam mitigasi krisis iklim. Temuan utamanya: 69 persen responden mengaku pernah mendengar istilah ekonomi restoratif. Dan bagi mereka, istilah itu mengandung makna yang terkait dengan pemulihan sumber daya alam, penurunan emisi karbon, penurunan ketimpangan sosial, penyediaan peluang kerja, dan pembangunan ekonomi.

Dua kontras itu mengandung saran bahwa, walaupun pembuat kebijakan bisa menerima ide tentang perlunya bertransformasi ke cara menjalankan ekonomi yang bersifat restoratif, ada pekerjaan besar untuk mengedukasi masyarakat. Tapi, bagi pemerintahan yang memang berniat baik, mau sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan, lingkungan dan kehidupan di bumi yang lestari, tantangan ini mestinya bukanlah halangan.

Seperti diceritakan dimuka, di Indonesia paling tidak ada generasi muda seperti Hill. •